

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat ridlo dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pasal 17 Ayat (1) disebutkan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kebijakan Pemerintahan Daerah
- BAB III : Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- BAB V : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- BAB VI : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
- BAB VII : Penutup

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 kepada DPRD pada dasarnya menginformasikan gambaran kinerja pemerintah daerah secara utuh sepanjang tahun 2012, berdasarkan tolok

ukur kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2011–2015 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2012 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 ini. Saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di waktu yang akan datang dalam rangka mewujudkan “Gresik Bisa Lebih Baik”.

Gresik, Maret 2013

BUPATI GRESIK

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sambari Halim Radianto', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'BUPATI GRESIK' at the top.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Dasar Hukum	I-1
B. Gambaran Umum Daerah	I-2
1. Kondisi Geografis Daerah	I-2
2. Gambaran Umum Demografis	I-3
3. Kondisi Ekonomi	I-4
a. Potensi Unggulan Daerah	I-4
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	I-5
 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	 II-1
A. Visi dan Misi dan Motto	II-1
B. Tujuan dan Sasaran.....	II-2
1. Tujuan	II-2
2. Sasaran	II-6
3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	II-33
C. Prioritas Daerah.....	II-39
 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-1
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-1
2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	III-2
3. Permasalahan dan Solusi	III-4
B. Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-4
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-4
2. Target dan Realisasi Belanja.....	III-5
3. Permasalahan dan Solusi	III-6

C. Pembiayaan Daerah	III-7
1. Penerimaan Pembiayaan	III-7
2. Pengeluaran Pembiayaan	III-7
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IV-1
A. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD	IV-2
B. Urusan Wajib	IV-8
1. Urusan Pendidikan	IV-9
2. Urusan Kesehatan	IV-13
3. Urusan Pekerjaan Umum	IV-19
4. Urusan Perumahan Rakyat	IV-23
5. Urusan Penataan Ruang	IV-26
6. Urusan Perencanaan Pembangunan	IV-28
7. Urusan Perhubungan	IV-30
8. Urusan Lingkungan Hidup	IV-32
9. Urusan Pertanahan	IV-36
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-37
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-40
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-41
13. Urusan Sosial	IV-43
14. Urusan Ketenagakerjaan.....	IV-45
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	IV-47
16. Urusan Penanaman Modal	IV-49
17. Urusan Kebudayaan	IV-51
18. Urusan Pemuda dan Olahraga	IV-53
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IV-56
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	IV-60
21. Urusan Ketahanan Pangan	IV-67
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-68

23. Urusan Statistik	IV-72
24. Urusan Kearsipan	IV-73
25. Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-73
26. Urusan Perpustakaan	IV-75
C. Urusan Pilihan	IV-76
1. Urusan Pertanian	IV-76
2. Urusan Kehutanan	IV-81
3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	IV-82
4. Urusan Pariwisata	IV-83
5. Urusan Kelautan dan Perikanan	IV-84
6. Urusan Perdagangan	IV-87
7. Urusan Industri.....	IV-89
8. Transmigrasi	IV-89
D. Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	IV-90
E. Pelaksanaan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Pemerintah Desa	IV-94
F. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga	IV-95
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V-1
I. Urusan Pemberdayaan Masyarakat	V-1
II. Urusan Tenaga Kerja	V-3
III. Urusan Pertanian	V-7
IV. Urusan Kelautan dan Perikanan	V-14
V. Urusan kesehatan	V-19
VI. Urusan Pekerjaan Umum	V-20
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
A. Kerjasama Antar Daerah.....	VI-1
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	VI-4
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	VI-5
D. Pembinaan Batas Wilayah	VI-6

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI-7
E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI-24
BAB VII PENUTUP	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011–2015;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2012.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah

1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa yang terdiri dari 658.786 laki-laki dan 649.209 perempuan, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 1.270.351 jiwa sehingga dari tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 37.644 jiwa atau 2,9 %.

Pada tahun 2012 jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebesar 356.685 keluarga dan kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2012 sebesar 1.098 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2012 sebesar 101,48%.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Perkembangan potensi unggulan Kabupaten Gresik pada tahun 2012 antara lain:

- 1) Dalam bidang industri pada tahun 2012 di Kabupaten Gresik telah diterbitkan 45 Tanda Daftar Industri (TDI) dengan nilai investasi sebesar Rp7.186.559.000,00 yang menyerap 360 orang tenaga kerja.
- 2) Dalam bidang perdagangan di Kabupaten Gresik tahun 2012 telah diterbitkan 1.041 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) baru yang terdiri dari 40 SIUP Perusahaan Mikro, 761 SIUP Perusahaan Kecil dan 188 SIUP Perusahaan Menengah dan 52 SIUP Perusahaan Besar. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 11.137 orang dan nilai investasi sebesar Rp907.559.800.000,00;
- 3) Dalam bidang pertanian di Kabupaten Gresik tahun 2012, jumlah produksi padi sebanyak 386.800 ton, jagung sebanyak 152.274 ton dan kedelai sebanyak 2.132 ton, kacang tanah sebanyak 3.756 ton, kacang hijau sebanyak 1.537 ton, ubi kayu sebanyak 12.830 ton ubi jalar sebanyak 2.797 ton. Sedangkan areal panen padi seluas 59,177 hektar, areal produksi jagung seluas 24,46 hektar dan areal produksi kedelai seluas 1,783 hektar.
- 4) Dalam bidang Perkebunan di Kabupaten Gresik pada tahun 2012, jumlah produksi tembakau sebanyak 46,8 ton, tebu sebanyak 9.971 ton, kelapa sebanyak 1.636 ton, cengkeh sebanyak 2,0 ton, kopi sebanyak 4,31 ton, jambu mente sebanyak 60 ton, kapuk randu sebanyak 10,28 ton, kakao sebanyak 7,52 ton, kunyit sebanyak 760,9 ton, dan siwalan sebanyak 17,0 ton. Sedangkan areal produksi kopi seluas 6,13 hektar, tembakau seluas 52 hektar, kakao seluas 7,5 hektar, tebu seluas 2.191,45 hektar, Jambu mente seluas 119 hektar, Cengkeh seluas 28,25 hektar dan kelapa seluas 1.228,89 hektar.
- 5) Jumlah populasi ternak di Kabupaten Gresik pada tahun 2012 sebanyak 3.574.955 ekor yang terdiri dari sapi potong 58.268 ekor, sapi perah 415 ekor, kerbau 297 ekor, kuda 236 ekor, kambing

65.210 ekor, domba 30.396 ekor, ayam ras petelur 133.045 ekor, ayam buras 645.838 ekor, ayam ras pedaging 2.600.000 ekor, itik 27.990 ekor, entok dan angsa 13.260 ekor. Adapun produksi hasil ternak pada tahun 2012 sebanyak 9.935,53 ton yang terdiri dari telur 7.969,54 ton, susu sebanyak 228,15 ton dan daging sebanyak 2.010,84 ton.

- 6) Produksi bidang perikanan di Kabupaten Gresik pada tahun 2012 mencapai 91.329,48 ton yang terdiri dari penangkapan di laut sebesar 16.965 ton, sungai sebesar 111,50 ton, waduk sebesar 308,50 ton, budidaya tambak payau sebesar 39.009,73 ton, kolam sebesar 82,87 ton, dan tambak tawar sebesar 34.099,88 ton. Jumlah perahu/kapal penangkap ikan sebanyak 4.478 unit dan areal budidaya seluas 33.502,02 hektar yang terdiri dari tambak payau seluas 17.835,02 hektar, tambak tawar seluas 14.629,05 hektar, kolam seluas 100,95 hektar, waduk seluas 617,37 hektar, sungai seluas 320,32 hektar.
- 7) Investasi daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2011 berdasarkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp503.210.000.000,00. dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 606.880.000.000,00. Keberhasilan dalam peningkatan investasi tersebut didukung oleh adanya potensi daerah, infrastruktur yang memadai dan iklim investasi yang kondusif serta pelayanan perizinan yang semakin baik.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2012 mencapai 7,38%, lebih tinggi jika dibanding tahun 2011 sebesar 7,36%. Sedangkan inflasi pada tahun 2012 sebesar 7,09%, lebih tinggi dibanding pada tahun 2011 sebesar 6,53%.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp44.330.663.550.000,00, kemudian pada

tahun 2012 meningkat menjadi Rp50.976.371.490.000,00. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada tahun 2011 sebesar Rp18.076.663.840.000,00, kemudian pada Tahun 2012 meningkat menjadi Rp19.409.867.960.000,00.

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku pada tahun 2011 (angka sementara) didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 50,16%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,09%, dan Sektor Pertanian sebesar 8,94%. Demikian pula pada tahun 2012 juga didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,31%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 24,44%, dan Sektor Pertanian sebesar 8,61%. Sehingga secara ekonomi Kabupaten Gresik adalah Daerah Industri dan Perdagangan dengan didukung Pertanian yang mantap.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan oleh dan untuk masyarakat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua aspirasi dan segala kepentingan daerah yang tumbuh dari masyarakat harus diarahkan untuk menjaga keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional.

Dalam upaya menjaga keserasian dan keselarasan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, yang kemudian telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) 2011–2015.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015 antara lain Visi, Misi, Motto, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Daerah sebagai berikut.

A. Visi, Misi, dan Motto

Visi : **Gresik yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas”.**

Misi : 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan

ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Motto : "Gresik Bisa Lebih Baik".

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan.

- a. Untuk melaksanakan Misi 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri", ditetapkan tujuan:

- **Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis**

Perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati merupakan harapan setiap warga masyarakat. Kondisi ini selain akan menciptakan kesejahteraan batin bagi masyarakat, juga akan menjadi pendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sehingga pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengamalan nilai-nilai agama dan moral menjadi sangat penting. Pentingnya pemahaman tentang kehidupan yang sejuk, santun dan saling menghormati harus senantiasa diberikan kepada masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Angka kriminalitas pada tahun 2012 diprediksi sebanyak 630 kejadian.
- 2) Kejadian gangguan tramtib pada tahun 2012 diprediksi 159 kejadian.

Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan sosial, urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan kebudayaan.

- b. Untuk melaksanakan Misi 2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan tujuan:

– **Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata**

Peran utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanannya pemerintah kabupaten harus berupaya memberikan yang terbaik, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan filosofi keberadaan pemerintah sebagai pelayan masyarakat sekaligus bentuk komitmen dari setiap kepala daerah yang berjanji akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap warganya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Persentase unit pelayanan yang melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2012 ditargetkan 40%.
- 2) Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) pada tahun 2012 ditargetkan 50%.
- 3) Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2012 ditargetkan 25%.

Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan sosial, urusan perumahan, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan komunikasi dan informatika, urusan pertanahan, urusan penataan ruang, urusan perencanaan pembangunan, urusan statistik, urusan kearsipan dan urusan transmigrasi.

- c. Untuk melaksanakan Misi 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, ditetapkan tujuan:

– **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat**

Peningkatan perekonomian daerah merupakan indikator utama dalam usaha mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingkat pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten ke depan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat dan penurunan angka pengangguran.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 ditargetkan 7 %.
- 2) Pendapatan per kapita pada tahun 2012 ditargetkan Rp. 30.000.000,00.
- 3) Angka pengangguran pada tahun 2012 ditargetkan 5 %.

Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan perdagangan, urusan perindustrian, urusan koperasi dan UKM, urusan penanaman modal, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan perikanan dan kelautan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan ketenagakerjaan, urusan pariwisata, urusan pekerjaan umum dan urusan energi dan sumber daya mineral.

- d. Untuk melaksanakan Misi 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, ditetapkan tujuan:

- **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya .**

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tugas utama pemerintah daerah. Kualitas hidup masyarakat diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan ketersediaan pangan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mengukur kualitas hidup masyarakat menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan pengukuran indeks pendidikan yang terdiri dari Lama rata-rata masyarakat mengenyam sekolah dan angka melek huruf, indeks kesehatan yang berupa usia harapan hidup masyarakat dan indeks paritas daya beli yang menggambarkan kemampuan masyarakat membelanjakan pendapatannya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 ditargetkan 75,47.

Tujuan Ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, urusan perpustakaan, urusan ketahanan pangan, urusan kepemudaan dan olah raga.

2. Sasaran

Sasaran (*objective*) pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya aktivitas keagamaan

Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengamalan nilai–nilai agama dan moral serta kesetiakawanan sosial sangat penting, karena dapat menciptakan kesejahteraan batin bagi masyarakat, dan menjadi pendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah hari besar yang dirayakan pada tahun 2012 ditargetkan 5 kegiatan;
- b) Persentase realisasi bantuan sarana ibadah pada tahun 2012 ditargetkan 90%.

2) Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Meningkatkan suasana kehidupan yang sejuk, santun dan saling menghormati merupakan harapan seluruh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten akan melakukan upaya sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang kesatuan bangsa dan kerukunan kehidupan beragama.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah Parpol yang mendapat sosialisasi pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 11 parpol;
- b) Jumlah LSM/Ormas/OKP yang dibina pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 164 LSM Ormas/ OKP;
- c) Persentase konflik yang dapat diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%.

3) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah yang mengatur kehidupan masyarakat pada lingkup kabupaten memerlukan pengawalan dan upaya penegakan agar dapat berfungsi secara efektif. Penegakan hukum tersebut melalui sosialisasi dan operasi oleh satuan kerja terkait.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 55%;
- b) Persentase demo/protes terhadap PERDA/Perbub yang dilaksanakan secara tertib pada tahun 2012 ditargetkan 96,00 % ;
- c) Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum pada tahun 2012;
- d) Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras pada tahun 2012;

- e) Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada tahun 2012 ditargetkan 0,04% per 10.000 penduduk.

4) Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kampanye terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan melalui pemberdayaan perempuan. Perempuan seharusnya bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi dapat lebih aktif menjadi subyek pembangunan. Perempuan harus dipacu kemampuannya agar terwujud kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan dengan tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Perlindungan lainnya dilakukan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemungkinan adanya kasus perdagangan (*human trafficking*) terhadap perempuan dan anak.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%;
- b) Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 88 %;
- c) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%;
- d) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di

Puskesmas dan Rumah Sakit pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%;

- e) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 86%;
- f) Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 20%.

5) Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

Untuk menjaga kekayaan seni dan budaya daerah harus ada upaya untuk melestarikan keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 6 kegiatan;
- b) Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang tersedia pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 6 unit;
- c) Persentase peninggalan / Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan ditargetkan sebesar 36,36%.

- b. Untuk mencapai tujuan Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan

Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah melalui lembaga kemasyarakatan desa berupa PKK dan Posyandu yang ada di masyarakat. Masyarakat dibimbing dan dibantu agar mampu mandiri secara ekonomi dan diberikan ketrampilan dan pelayanan dasar kesehatan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase PKK aktif tahun 2012 ditargetkan sebesar 83,23%;
- b) Persentase Posyandu Aktif tahun 2012 ditargetkan sebesar 98,60%;
- c) Persentase keluarga miskin tahun 2012 ditargetkan sebanyak 20,48%.

2) Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilaksanakan melalui pemberian bantuan dan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian secara ekonomi sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah PMKS yang ada.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang tersedia pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 18 unit;
- b) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2012 ditargetkan 350 PMKS;
- c) Jumlah PMKS pada tahun 2012 diestimasi sebanyak 73.871 jiwa;
- d) Persentase realisasi bantuan santunan kematian pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%;
- e) Penyaluran Raskin ditargetkan pada tahun 2012 sebesar 100%.

3) Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

Sarana permukiman yang sehat dan layak merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya melalui program dan bantuan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 58%;
- b) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 16 %;
- c) Persentase Rumah Layak Huni pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 89 %.

4) Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum

Produk hukum daerah yang dihasilkan, baik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten atau lembaga legislatif harus mampu dijaga kualitasnya. Produk hukum yang baik harus dapat diaplikasikan di masyarakat sehingga efektivitasnya dapat diandalkan. Sedangkan untuk kepastian hukum diharapkan semua permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga harus ada upaya hukum yang jelas pada setiap masalah hukum yang dihadapi.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 10 Perda;
- b) Jumlah Perda yang dibatalkan pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 0 Perda;
- c) Persentase Kasus hukum yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 80%;
- d) Persentase Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti/dilaksanakan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%;
- e) Persentase Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 100%.

5) Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Guna memperoleh kepastian atas kesuksesan pembangunan daerah, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan

bukan hanya bersifat penindakan (represif) tetapi juga bersifat pencegahan (preventif), sehingga diharapkan dapat terwujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan akuntabilitas tersebut dapat diukur tingkat keberhasilan kinerja dari setiap instansi pemerintahan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%;
- b) Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi pada tahun 2012 ditargetkan 25%;
- c) Persentase informasi pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%.

6) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, harus dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilan kinerjanya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 34 kali;
- b) Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD) pada tahun 2012 ditargetkan baik.

7) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik pula, sehingga seiring dengan standarisasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 maka pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan akurasi dan kecepatan pengolahan datanya. Produk akhir pengelolaan keuangan daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan harus selesai selambat lambatnya akhir Maret tahun berikutnya. Selain itu Pengelolaan asset daerah adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban pengelolaan asset daerah ini sehingga pemanfaatannya dapat lebih maksimal.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:

- a) Opini laporan keuangan pada tahun 2012 ditargetkan (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP;
- b) Laporan keuangan yang disusun pada tahun 2012 ditargetkan tepat waktu;
- c) Penetapan APBD pada tahun 2012 ditetapkan tepat waktu;
- d) Keberadaan Perubahan PERDA Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Persentase peningkatan PAD pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 5,27%;
- f) Rasio keberadaan kemandirian daerah ditargetkan 20,88%;
- g) Jumlah Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat pada tahun 2012 ditargetkan 1 buah;
- h) Persentase Aset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan) pada tahun 2012 ditargetkan 88,84.

8) Meningkatkan peran legislatif dalam tugas pemerintahan

Melalui sekretariat DPRD, Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan layanan atas kebutuhan administrasi dan keuangan

lembaga legislatif. Sehingga diharapkan legislatif sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dapat berfungsi secara maksimal khususnya dalam hal penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berfihak kepada kepentingan publik serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Pelaksanaan voting yang dilakukan dalam sidang paripurna;
- b) Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda ditargetkan 100%;
- c) Jumlah perda inisiatif DPRD ditargetkan sebesar 10 perda.

9) Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional

Jumlah SDM yang besar memerlukan pengelolaan yang baik sehingga akan terwujud sinergi yang positif serta menghasilkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut meliputi penetapan ketrampilan, keahlian, kesejahteraan sampai dengan sistem karir yang transparan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya ditargetkan sebesar 91,20 %;
- b) Rasio jabatan yang terisi ditargetkan sebesar 100%;
- c) Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal ditargetkan sebesar 100%;
- d) Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan ditargetkan sebesar 100%;
- e) Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang SOTK ditargetkan sebesar 100%;
- f) Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan ditargetkan 40%.

10) Meningkatnya kerjasama Daerah

Kerjasama Daerah diperlukan untuk semakin meningkatkan kemampuan sumber daya Kabupaten.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga pada tahun 2012 ditargetkan 16 buah.

11) Meningkatnya Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kabupaten harus dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Keberadaan unit pelayanan pengadaan pada tahun 2012;
- b) Keberadaan E-procurement pada tahun 2012;
- c) Jumlah Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada tahun 2012 ditargetkan 25 orang.

12) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Layanan administrasi kependudukan yang dilakukan berupa pelayanan KTP, KK dan akte catatan sipil harus terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga semakin meningkat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Kepemilikan KTP ditargetkan sebesar 86,90%;
- b) Akta kelahiran yang diterbitkan untuk bayi yang lahir pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 31.300 lembar;
- c) Lama pengurusan KTP ditargetkan 1 hari.

13) Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa

Komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan dalam rangka mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, sehingga dapat terjadi sinergi yang positif dalam pembangunan. Mengingat banyaknya segmen masyarakat, maka sistem komunikasi yang dilakukan juga harus menggunakan berbagai macam metode sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Keberadaan website Pemerintah Daerah ditargetkan;
- b) Pengunjung website tahun 2013 ditargetkan 665.113 netter;
- c) Jumlah Sistem informasi yang tersedia ditargetkan 27 buah;
- d) Jumlah pemberitaan di media ditargetkan 370 kali;
- e) Keberadaan Persuratan secara elektronik.

14) Meningkatnya penanganan pertanahan

Pelayanan pertanahan di daerah perlu dikoordinasikan antara pemerintah kabupaten dengan instansi pemerintah pusat badan pertanahan, sehingga diharapkan permasalahan pertanahan yang ada dapat diselesaikan untuk kepastian hukum di masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Penyelesaian Kasus Tanah Negara.

15) Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

Kebijakan penataan ruang daerah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2011. Agar penerapan kebijakan pemanfaatan ruang dapat berhasil dalam pencapaian sasaran sesuai yang diharapkan, maka dalam implementasinya Pemerintah Daerah telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) melalui Keputusan Bupati Gresik yang mempunyai tugas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah HPL/HGB target tahun 2012 sebesar 29,71;
- b) Keberadaan Perda RTRW pada Tahun 2012;
- c) Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW pada tahun 2012.

16) Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan

Mengingat adanya keterbatasan sumber daya daerah baik SDM maupun keuangan maka perencanaan daerah harus disusun secara efektif dengan berupaya menyiapkan dokumen perencanaan yang baik sesuai dengan kemampuan SDM dan keuangan yang ada. Selain itu perlu juga adanya pelibatan secara aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Ketersediaan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada tahun 2012;
- b) Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD pada tahun 2012 ditargetkan 80%.

17) Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu

Data pembangunan yang disusun adalah Kabupaten Gresik dalam angka, perhitungan PDRB, pengukuran IPM dan dokumen lainnya. Data ini harus disediakan sebelum laporan pertanggungjawaban tahunan disusun dan sebelum perencanaan tahun berikutnya dibuat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Ketersediaan dokumen statistik (Kabupaten dalam Angka dan PDRB Kabupaten) pada tahun 2012.

18) Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal

Pengelolaan arsip oleh satuan kerja perangkat harus tertib, rapi dan handal. Oleh karena itu prioritas yang harus dilakukan adalah menyiapkan sistem dan sarana penyimpanan arsip sesuai standar.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Penerapan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2012 ditargetkan 40,67%.

19) Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian

Untuk mendapatkan peserta transmigran yang siap diberangkatkan perlu dilakukan sosialisasi dan seleksi yang ketat serta pembinaan yang intensif kepada masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Jumlah calon transmigran yang dibina ditargetkan 25 orang.

- c. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya usaha perdagangan

Untuk meningkatkan perekonomian daerah perlu ditingkatkan usaha perdagangan di daerah. Oleh karena itu keberadaan pasar komoditas dan pasar umum harus tersedia di setiap wilayah. Kemudahan akses transportasi dan prasarana yang memadai menjadi suatu kebutuhan untuk meningkatkan sektor ini.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Pertumbuhan penerbitan SIUP yang ditargetkan 10,8 %.
- b) Pertumbuhan penerbitan TDP yang diterbitkan sebanyak 9,6%;
- c) Pertumbuhan penerbitan TDG yang ditargetkan 15,8 %;
- d) Pertumbuhan nilai investasi perdagangan yang ditargetkan 1,4 %;

- e) Jumlah Pameran/Ekspo per tahun yang diikuti/dilaksanakan targetkan 3 even.

2) Meningkatnya sektor industri

Untuk meningkatkan sektor industri perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan para pelaku industri di daerah. Beberapa produk dari industri di wilayah kabupaten perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu meningkatkan ekonomi daerah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Pertumbuhan Industri pada tahun 2012 ditargetkan 1%;
- b) Pertumbuhan Nilai Produksi pada tahun 2012 ditargetkan 2,5%.

3) Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang paling banyak menyerap pelaku ekonomi di kabupaten, sehingga upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha mereka harus dilakukan. Antara lain dengan meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan UKM, meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan jiwa wirausaha pelaku ekonomi serta memberikan kemudahan akses permodalan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Koperasi aktif yang pada tahun 2012 ditargetkan 82% ditahun 2012;
- b) Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang pada tahun 2012 ditargetkan 60%;
- c) Koperasi yang mendapatkan penilaian baik pada tahun 2012 ditargetkan 75%.

4) Meningkatnya investasi di daerah

Untuk meningkatkan investasi di daerah perlu dilakukan berbagai upaya mulai dari promosi potensi daerah, regulasi perijinan, kesiapan infrastruktur sampai dengan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha. Usaha ini harus dilakukan oleh lintas SKPD yang bersangkutan secara simultan sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:

- a) Kenaikan Nilai Realisasi PMDN pada tahun 2012 ditargetkan 772,30 milyar rupiah;
- b) Persentase Penyelesaian Permohonan: Ijin Lokasi, Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Prinsip Ijin Usaha pada tahun 2012 ditargetkan 100%.

5) Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura diperlukan pembinaan yang intensif.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Produksi Pertanian pada tahun 2012 ditargetkan untuk Padi ditargetkan 382.952 ton, Jagung 105.032 ton, kedelai 3.345 ton, Kacang tanah 4.965 ton, Kacang hijau 2.140 ton, Ubi kayu 27.524 ton dan Ubi jalar 5.737 ton.
- b) Produksi Sayur pada tahun 2012 ditargetkan untuk Bawang merah 3.332 ton, Sawi 592 ton, Kacang panjang 506 ton, Cabe 769 ton, Tomat 357 ton, Terong 8.826 ton, Ketimun 783 ton, Labu Siam 592 ton, Kangkung 1.133 ton dan Bayam 609 ton.
- c) Produksi Buah pada tahun 2012 ditargetkan untuk Jambu biji 5.423 Kuintal, Jeruk 1.852 Kuintal, Mangga 316.646 Kuintal,

Pepaya 8.628 Kuintal, Pisang 176.774 Kuintal, Belimbing 2.367 Kuintal, Sawo 1.131 Kuintal dan buah Sirsak 966 Kuintal.

6) Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan

Produksi perkebunan di Kabupaten Gresik cukup mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan potensi perkebunan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : produksi hasil perkebunan pada tahun 2012 ditargetkan untuk tembakau 11 ton, tebu 8.114 ton, kelapa 3.153 ton, cengkeh 29 ton, kopi 50 ton, jambu mente 119 ton, kapuk randu 54 ton, kakao 3 ton, kunyit 925 ton dan siwalan 930 ton.

7) Meningkatnya produksi dan populasi peternakan

Untuk menjaga kecukupan gizi masyarakat perlu dilakukan pembangunan di bidang peternakan. Pembangunan ini ditujukan untuk menjaga persediaan kebutuhan daging, susu dan telur serta populasi binatang ternak.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Produksi peternakan pada tahun 2012 ditargetkan untuk daging 10.821,71 ton, telur 2.516,39 ton, dan susu 352,69 ton;
- b) Populasi binatang ternak dan unggas pada tahun 2012 ditargetkan untuk sapi potong 52.984 ekor, sapi perah 851 ekor, kerbau 208 ekor, kambing 52.600 ekor, domba 30.067 ekor, kuda 245 ekor, ayam buras 649.159 ekor, ayam ras petelur 130.878 ekor, ayam ras pedaging 2.558.090 ekor, itik 25.640 ekor dan entok 13.282 ekor.

8) Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan

Untuk menjaga pemanfaatan sumber daya alam agar terjaga kelestariannya maka diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sehingga pengawasan pada lingkungan eksploitasi alam harus dilakukan secara ketat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2012 ditargetkan 0,013;
- b) Jumlah Produksi hasil hutan pada tahun 2012 ditargetkan untuk kayu jati 600 m³ dan non kayu jati 50 m³.

9) Meningkatnya Produksi dan produktivitas perikanan

Agar dapat mengembangkan sektor perikanan perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum. Untuk itu diperlukan jumlah benih ikan yang cukup. Peningkatan perikanan budidaya dilakukan melalui budidaya kolam dan tambak sedangkan untuk produksi perairan umum dilakukan melalui penyebaran benih ikan pada perairan umum serta hasil tangkapan laut oleh nelayan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Produksi Perikanan Budi daya pada tahun 2012 ditargetkan untuk udang windu 1.420,00 ton, udang vannamee 3.874,00 ton, bandeng 29.400,00 ton, kerapu 9,90 ton, nila 1.032,00 ton;
- b) Produksi Perikanan Budi daya penangkapan pada tahun 2012 ditargetkan 16.900,00 ton;
- c) Produksi Perikanan Budi daya perairan umum pada tahun 2012 ditargetkan 525,00 ton;
- d) Produksi tambak payau pada tahun 2012 ditargetkan 92,49 ton/Ha;
- e) Produksi tambak tawar pada tahun 2012 ditargetkan 111,09 ton/Ha.

10) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan dapat dipicu dari perkembangan industri. Oleh karena itu setiap industri seharusnya memiliki instalasi pengolahan limbah yang baik sehingga dapat meminimalkan pencemaran lingkungan, Hal ini memerlukan ketegasan dari Pemerintah Kabupaten untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku industri yang melakukan pencemaran lingkungan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Luas Lahan Kritis pada tahun 2012 ditargetkan seluas 17.239 Ha;
- b) Rasio Luas Kawasan Lindung pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 8%;
- c) Persentase usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 80%;
- d) Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 40%;
- e) Persentase Luas RTH perkotaan ditargetkan pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 57%.

11) Meningkatnya penanganan persampahan

Agar kesehatan lingkungan dapat terjaga dengan baik maka setiap sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus mampu terangkut dan terbuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Persentase Penanganan sampah pada tahun 2012 sebesar 88%;
- b) Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2012 sebanyak 0,028 m³/penddk.

12) Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau

Agar dapat menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang di wilayah Kabupaten Gresik diperlukan pelayanan transportasi yang baik. Pelayanan dimaksud bukan hanya berupa sarana angkutan umum yang layak jalan saja tetapi juga sarana lalu lintas seperti rambu, marka, halte dan sebagainya sebagai pendukung keselamatan dan kenyamanan transportasi daerah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Presentase Ketersediaan Angkutan darat pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 3 %;
- b) Presentase Ketersediaan rambu–rambu lalu lintas pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 25%;
- c) Presentase Angkutan Umum darat dalam kondisi layak jalan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 40%;
- d) Ketersediaan angkutan laut penyeberangan pada tahun 2012 kapasitas kapal ditargetkan sebesar 96.805, penumpang ditargetkan sebesar 336 penumpang;
- e) Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100 %;
- f) Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100 %.

13) Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja

Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua warganya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten. Sehingga melalui kebijakan publik yang terencana dan jelas harus mampu menurunkan angka pengangguran terbuka kabupaten, menciptakan lapangan kerja baik formal maupun informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 66,83%;
- b) Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 31,03%;
- c) Angka pengangguran penduduk usia 15-24 tahun pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 17,53%.

14) Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja

Agar dapat menjamin setiap pekerja memperoleh hak-haknya maka perlu dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan terhadap tenaga kerja, yang meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 62,50%;
- b) Kepatuhan Terhadap Norma kerja pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 65,25%;
- c) Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 90,04%;
- d) Angka Kecelakaan Kerja pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 4,57%;
- e) Angka Penuntasan/ penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 93,98%;
- f) Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 7,42%;
- g) Kepatuhan atas ketentuan mengenai Kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 2,65%.

15) Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

Untuk meningkatkan pariwisata daerah salah satu ukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan obyek–obyek pariwisata daerah yang dapat menarik kunjungan masyarakat. Disamping itu, agar kunjungan dapat meningkat perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha pariwisata baik di dalam maupun luar Kabupaten.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: jumlah kunjungan wisata pada tahun 2012 ditargetkan 1.325.000 orang.

16) Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

Pemenuhan infrastuktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah. Ketersediaan jalan dan jembatan yang baik akan mampu mendorong pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu pemerintah kabupaten harus mendorong tersedianya jalan dan jembatan yang memadai terutama untuk daerah pengembangan ekonomi yang telah direncanakan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2012 ditargetkan 71%;
- b) Jembatan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2012 ditargetkan 94,88%;
- c) Persentase Jalan Poros Desa Yang Terbangun pada tahun 2012 ditargetkan 75%.

17) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi

Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Oleh

karena itu upaya prioritas dalam pengelolaan air adalah ketersediaan air untuk pertanian.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2012 ditargetkan 52%;
- b) Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik 45,57%.

18) Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah

Energi dan Sumber daya mineral yang dimiliki oleh daerah merupakan karunia Tuhan yang perlu dijaga kelestariannya. Eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya akan menyebabkan potensi tersebut menjadi habis dan hilang. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pertambangan yang ada di masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase ABT berijin yang membayar pajak pada tahun 2012 ditargetkan 71,47%.

- d. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas hidup masyarakat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah

Pembangunan pendidikan terfokus kepada dua hasil yang ingin dicapai yaitu pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih menekankan kepada kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah kepada kualitas hasil anak didik.

Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar seperti buku, laboratorium dan ruang praktik, peningkatan manajemen sekolah, peningkatan metodologi pembelajaran.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2012 ditargetkan 64%;
- b) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) pada tahun 2012 ditargetkan 80%;
- c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2012 ditargetkan 94,2%;
- d) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 74,3 %;
- e) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C pada tahun 2012 ditargetkan 69%;
- f) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2012 ditargetkan 0,028%;
- g) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2012 ditargetkan 0,28%;
- h) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada tahun 2012 ditargetkan 0,002%;
- i) Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada tahun 2012 ditargetkan 100%;
- j) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs pada tahun 2012 ditargetkan 100%;
- k) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA pada tahun 2012 ditargetkan 94%;

- l) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2012 ditargetkan 99,20%;
- m) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2012 ditargetkan 90%;
- n) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2012 ditargetkan 89%.

2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diharapkan usia harapan hidup masyarakat juga meningkat. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah, pelayanan imunisasi, pelayanan pengobatan/perawatan, pelayanan kesehatan jiwa, pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan gizi, pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif, pelayanan gawat darurat, penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa dan gizi buruk, pencegahan dan pemberantasan penyakit endemis, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan pengendalian vektor, pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum, penyuluhan perilaku sehat, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat, pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan penggunaan obat generik, penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rentan, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan lanjut usia, pelayanan gizi, pencegahan dan pemberantasan HIV-AIDS serta pelayanan dasar dan rujukan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 92%;

- b) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 80%;
- c) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 92%;
- d) Cakupan Pelayanan Nifas pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 92%;
- e) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 80%;
- f) Cakupan Pelayanan Anak Balita pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 69%;
- g) Cakupan Kunjungan Bayi pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 86%;
- h) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%;
- i) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 80%;
- j) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%;
- k) Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 80%;
- l) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%;
- m) Cakupan Balita yang Mendapat Vitamin A pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 90%;
- n) Persentase Rumah Sehat pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 81%;
- o) Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 98,08%;
- p) Pengadaan Obat Esensial pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 99,19%;

- q) Pengadaan Obat Generik pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 99,55%;
- r) Cakupan Rawat Jalan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 15%;
- s) Cakupan Rawat Inap pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 3,70%;
- t) Cakupan rumah tangga sehat ditargetkan sebesar 67%;
- u) Posyandu Purnama pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 68%.
- v) Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 1,61%;
- w) Bed Occupancy Rate pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 67,65%;
- x) Average Length Of Stay pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 4,75 hari;
- y) Turn Over Internal pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 2,29 hari;
- z) Bed Turn Over pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 51,44 kali.

3) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana

Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan pada pelayanan peserta KB secara menyeluruh. Sebagai bagian dari program pengendalian jumlah penduduk, maka urusan ini memegang peranan penting dalam menekan pertumbuhan penduduk. Dengan didasari oleh kesadaran yang tinggi dari masyarakat tentang pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk maka pelayanan alat KB kepada pasangan usia subur harus ditingkatkan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Prevalensi peserta KB Aktif pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 78,25 %;
- b) Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 1,15%;
- c) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 21,60%;

- d) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 20,65%;
- e) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 100%.

4) Meningkatnya minat baca masyarakat

Untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dilakukan upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Diantaranya dengan cara meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepada perpustakaan umum serta melakukan penambahan buku bacaan dan tempat baca yang lebih banyak di masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2012 ditargetkan 104.142 buku;
- b) Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2012 ditargetkan 529.458 orang;
- c) Jumlah anggota perpustakaan 26.830 orang.

5) Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat

Dengan dijadikannya urusan pertanian menjadi prioritas pembangunan maka diharapkan surplus stok pangan daerah dapat semakin meningkat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Keberadaan regulasi ketahanan pangan pada tahun 2012;
- b) Ketersediaan pangan pada tahun 2012 ditargetkan 197,23 kg/kapita/tahun;
- c) Rata-rata konsumsi bahan pangan utama pada tahun 2012 ditargetkan 94,35 kg/kapita/tahun.

6) Meningkatnya prestasi olah raga daerah

Untuk meningkatkan prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui kerja sama dengan KONI kabupaten dan organisasi persatuan olahraga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul pemuda dan olahragawan yang berprestasi di daerah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase organisasi kepemudaan yang aktif pada tahun 2012 ditargetkan 100%;
- b) Jumlah gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) pada tahun 2012 ditargetkan 2 unit;
- c) Jumlah Lapangan Olah Raga pada tahun 2012 ditargetkan 26 unit;
- d) Persentase cabang olah raga yang aktif 86,21%.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

a. Strategi

Untuk mencapai tujuan daerah dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan untuk menjadikan Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas, maka strategi pembangunan Kabupaten Gresik untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 :

Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah :

- 1. Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui fasilitasi dan bantuan kepada aktivitas keagamaan;
- 2. Membangun suasana yang kondusif bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

3. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam membangun kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
4. Melakukan pembinaan kepada pemuda dan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan olah raga di daerah;
5. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan pembinaan secara berkala;
6. Memelihara dan menjaga eksistensi seni dan budaya lokal.

Misi ke-2 :

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan;
2. Memperluas jangkauan pelayanan sosial dan penanganan PMKS;
3. Menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan secara lebih intensif;
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pada semua jenjang;
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
8. Meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada kinerja yang baik.

Misi ke-3 :

Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah :

1. Membangun akses yang luas kepada masyarakat dalam mengembangkan industri dan perdagangan di daerah;

2. Mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal;
3. Meningkatkan investasi penanaman modal di daerah melalui pelayanan perijinan yang baik;
4. Meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan;
5. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan pembinaan pada bidang perikanan dan kelautan;
6. Meningkatkan infrastruktur daerah baik dalam bidang bina marga maupun pengairan.

Misi ke-4 :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pendidikan yang murah;
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pemerataan akses dan keterjangkauan biaya kesehatan bagi masyarakat;
3. Menekan pertumbuhan penduduk melalui pelayanan keluarga berencana yang terjangkau;
4. Menjaga tingkat ketersediaan pangan daerah demi terwujudnya ketahanan pangan di daerah.

b. Arah Kebijakan Daerah

1. **Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan misi “Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri” adalah :**

- 1) Membantu/ memfasilitasi peningkatan kegiatan keagamaan di masyarakat;
- 2) Meningkatkan rasa sejuk , santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3) Mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan;
- 4) Meningkatkan prestasi olah raga melalui pembinaan induk organisasi dan komite olah raga;
- 5) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga pemerintah, sektor industri dan lembaga non formal;
- 6) Melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal.

2. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan misi “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik” adalah :

- 1) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan rehabilitasi dan bantuan dasar kesejahteraan sosial Meningkatkan sarana dan prasarana dasar pemukiman;
- 3) Mendorong percepatan pencapaian good governance melalui pengembangan produk hukum;
- 4) Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme aparat pengawasan dan monitoring tindak lanjut;
- 5) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
- 6) Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan sumberdaya penerimaan daerah;

- 7) Meningkatkan fungsi legislatif melalui pemberdayaan dan penampungan aspirasi masyarakat;
- 8) Meningkatkan profesionalisme aparat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan;
- 9) Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan;
- 10) Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI);
- 11) Meningkatkan pengelolaan pertanahan;
- 12) Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya;
- 13) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan;
- 14) Mendokumentasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan;
- 15) Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah.

3. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan misi “Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan” adalah :

- 1) Mengembangkan sistem pemasaran produk unggulan/andalan;
- 2) Mengembangkan industri kecil dan menengah;
- 3) Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi melalui pembinaan intensif;
- 4) Meningkatkan investasi di daerah melalui instrumentasi prosedur pelayanan investasi serta pengembangan kawasan industri dan infrastruktur;
- 5) Mengembangkan jaringan pemasaran produk pertanian;

- 6) Optimalisasi sumberdaya pertanian baik penyuluh maupun petani;
- 7) Mengembangkan komoditas perkebunan, melalui kimbun (kawasan industri masyarakat perkebunan);
- 8) Meningkatkan wilayah pengembangan sentra-sentra produksi dan populasi peternakan serta didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan;
- 9) Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan tanamannya secara berkelanjutan;
- 10) Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap perairan umum, kolam, laut dan tambak;
- 11) Meningkatkan pembinaan atas usaha/kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran pada tanah, air, dan udara;
- 12) Meningkatkan penanganan sampah secara berkelanjutan dengan mendorong swadaya masyarakat;
- 13) Meningkatkan kelancaran angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan;
- 14) Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 15) Mengembangkan produk-produk wisata dan meningkatkan promosi
- 16) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan ;
- 17) Meningkatkan pelayanan irigasi;
- 18) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral daerah.

4. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan misi “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.” adalah :

- 1) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- 2) Meningkatkan pemerataan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama dengan membebaskan biaya pemeriksaan di puskesmas untuk penduduk miskin;
- 3) Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat;
- 4) Menjadikan perpustakaan sebagai sarana penambah pengetahuan;
- 5) Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan sumber karbohidrat dan sumber protein.

C. Prioritas Daerah

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Revitalisasi birokrasi.
3. Pembangunan ekonomi daerah dengan titik berat ekonomi kerakyatan.
4. Revitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah.
5. Revitalisasi pelayanan kesehatan.
6. Penanggulangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2012, prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan;
3. Pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan ketahanan pangan daerah serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha;
4. Peningkatan sarana dan prasarana umum serta pembangunan infrastruktur;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola;
6. Pemanfaatan sumberdaya alam dan energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah unsur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu berbagai upaya dan kebijakan strategis perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kondisi makro ekonomi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menyusun kebijakan peningkatan kemampuan keuangan daerah. Pola kebijakan dan upaya-upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dilakukan melalui program dan kegiatan yang terukur, simultan dan berkelanjutan dengan lebih mengedepankan aspek pelayanan publik diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah yang sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam artian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian dasar hukum penerimannya.

Upaya - upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah antara lain :

- a. Peningkatan manajemen pemungutan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas, kemudahan, ketetapan dan kecepatan pelayanan;
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya;
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah;
- d. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD yang baru) dan mengoptimalkan kinerja badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada agar memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan ungsi penyertaan modal dan menargetkan pendapatan secara rasional;
- e. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundangan sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kondisi terkini;
- g. Peningkatan koordinasi dan dukungan pemungutan bagi hasil pajak pemerintah dan propinsi;
- h. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Sumber dari Pendapatan Daerah tahun 2012 diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Komposisi dari masing-masing sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- Pajak Daerah dengan target sebesar Rp211.633.950.000,00, terealisasi sebesar Rp252.405.752.927,50 atau 119,27%;

- Hasil Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp45.378.032.500,00, terealisasi sebesar Rp63.099.218.949,16 atau 139,05%;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target sebesar Rp8.683.627.604,33 terealisasi sebesar Rp8.981.313.161,33 atau 103,43%;
- Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target sebesar Rp98.521.249.797,84 terealisasi sebesar Rp103.102.420.952,56 atau 104,65%.

Total target untuk Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp364.216.859.902,17 terealisasi sebesar Rp427.588.705.990,55 atau 117,40%.

2) Dana Perimbangan terdiri dari:

- Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak dengan target sebesar Rp 118.935.567.692,16 terealisasi sebesar Rp153.246.269.810,00 atau 128,85%;
- Dana Alokasi Umum (DAU) dengan target sebesar Rp711.868.321.000,00 terealisasi sebesar Rp711.868.321.000,00 atau 100%;
- Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan target sebesar Rp82.505.060.000,00 terealisasi sebesar Rp82.505.060.000,00 atau 100%.

Total target Dana Perimbangan sebesar Rp913.308.948.692,16 terealisasi sebesar Rp947.619.650.810,00 atau 103,76%.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp278. 747.665.128,00 terealisasi sebesar Rp275.394.980.195,00 atau 98,80%. Terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan target sebesar Rp107.392.854.128,00 terealisasi sebesar Rp104.040.169.195,00 atau 96,88%.

- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dengan target sebesar Rp132.383.521.000,00 terealisasi sebesar Rp132.383.521.000,00 atau 100%;
- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dengan target sebesar Rp38.971.290.000,00 terealisasi sebesar Rp38.971.290.000,00 atau 100%.

Total Target untuk Pendapatan Daerah tahun 2012 adalah sebesar Rp1.556.273.473.722,33 terealisasi sebesar Rp1.650.603.336.995,55 atau 106,06%.

3. Permasalahan dan Solusi

Realisasi Pendapatan daerah tahun 2012 secara keseluruhan dapat mencapai target, bahkan melampaui sebagaimana data diatas, namun terdapat satu jenis pendapatan tidak mencapai target yaitu dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tercapai sebesar 96,88%. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dalam pemetaan target pendapatan sehingga didasarkan pada penerimaan tahun sebelumnya.

Solusi:

Agar pencapaian pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang lebih optimal dan mampu mencapai target, akan dilakukan upaya koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait khususnya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah dibagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

1) Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- Belanja Pegawai dengan alokasi sebesar Rp705.867.025.889,00 terealisasi Rp692.857.652.655,95 atau 98,16%;
- Belanja Bunga dengan alokasi sebesar Rp955.367.476,00 terealisasi sebesar Rp600.892.650,43 atau 62,90%;
- Belanja Hibah dengan alokasi sebesar Rp118.228.801.000,00 terealisasi sebesar Rp112.124.659.700,00 atau 94,84%;
- Belanja Bantuan Sosial dengan alokasi sebesar Rp28.459.379.065,00 terealisasi sebesar Rp17.618.925.345,00 atau 61,91%;
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemdes dengan alokasi sebesar Rp109.791.131.300,00 terealisasi sebesar Rp 107.062.942.300,00 atau 97,52%;
- Belanja Tidak Terduga dengan alokasi sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi Rp1.220.210.057,00 atau 40,67%;

Total alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp958.498.245.730,00 terealisasi sebesar Rp924.092.279.008,38 atau 96,41%.

2) Belanja Langsung terdiri dari:

- Belanja Pegawai dengan alokasi sebesar Rp89.409.253.663,00 terealisasi sebesar Rp80.810.992.834,00 atau 90,38%;
- Belanja Barang dan Jasa dengan alokasi sebesar Rp307.972.186.236,00 terealisasi sebesar Rp286.798.862.532,00 atau 93,12%;
- Belanja Modal dengan alokasi sebesar Rp246.240.055.627,00 terealisasi sebesar Rp159.428.666.382,00 atau 64,75%;

Total alokasi Belanja Langsung sebesar Rp643.621.495.526,56 terealisasi sebesar Rp527.038.521.748,00 atau 81,89%.

Total Alokasi Belanja Daerah untuk Kabupaten Gresik sebesar Rp1.602.119.741.256,56 terealisasi sebesar Rp1.451.130.800.756,38 atau 90,58%.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Gresik cukup baik yaitu sebesar 90,58%. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sebagian besar program pembangunan di Kabupaten Gresik juga sudah terlaksana dengan baik. Namun apabila dicermati secara lebih mendalam, penyerapan beberapa jenis belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung ternyata menumpuk pada Triwulan IV tahun 2012. Hal ini disebabkan antara lain karena perencanaan yang kurang akurat, lemahnya monitoring dan pengendalian, prosedur penatausahaan keuangan dan pengadaan barang/jasa yang membutuhkan banyak waktu dan lain-lain.

Terkait dengan permasalahan tersebut, dalam penyusunan jadwal kegiatan diharapkan disusun secara cermat dan diupayakan telah selesai pada Triwulan III kecuali kegiatan yang bersifat rutin dan membutuhkan waktu sepanjang tahun. Dengan demikian diharapkan penumpukan penyerapan keuangan pada Triwulan IV dapat dihindari.

C. Pembiayaan Daerah

Alokasi Pembiayaan Netto berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp45.846.267.534,23 terealisasi sebesar Rp49.727.404.300,27 atau 108,47% yang terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan dialokasikan dana sebesar Rp102.038.329.669,23 terealisasi sebesar Rp100.746.257.035,23 atau 98,73% yang terdiri dari:
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dialokasikan sebesar Rp100.038.329.669,23 terealisasi sebesar Rp100.038.329.669,23 atau 100%;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dialokasikan sebesar Rp2.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp707.927.366,00 atau 35,40%.
- 2) Pengeluaran pembiayaan dialokasikan dana sebesar Rp56.192.062.135,00, terealisasi sebesar Rp51.018.852.734,96 atau 90,79% yang terdiri dari:
 - Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah dengan alokasi sebesar Rp50.389.000.000,00, terealisasi sebesar Rp45.289.000.000,00 atau 89,88%;
 - Pembayaran pokok hutang dialokasikan sebesar Rp5.803.062.135,00, terealisasi sebesar Rp5.729.852.734,96 atau 98,74%.
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp249.199.940.539,44.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam program dan kegiatan pada setiap SKPD, 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

A. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD

Program dan kegiatan pada setiap SKPD merupakan belanja operasional rutin pada masing-masing SKPD untuk mendukung penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tugas SKPD dengan alokasi anggaran untuk seluruh SKPD sebesar Rp108.546.181.021,18 terealisasi sebesar Rp98.163.481.116,00 tidak terserap Rp10.382.699.905,18.

Adapun rincian jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPD serta alokasi anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.290.610.000,00 terealisasi sebesar Rp7.355.147.541,00, tidak terserap Rp935.462.459,00;
- 2) Dinas Kesehatan melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.642.468.500,00, terealisasi sebesar Rp5.400.478.426,00 tidak terserap Rp241.990.074,00;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA melaksanakan 4 program terdiri 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.757.030.297,00, terealisasi sebesar Rp6.956.879.688,00, tidak terserap Rp1.800.150.609,00;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.270.208.900,00 terealisasi sebesar Rp3.175.446.025,00, tidak terserap Rp94.762.875,00;
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 4 program terdiri 16 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp799.597.000,00, terealisasi sebesar Rp782.780.725,00 tidak terserap Rp16.816.275,00;
- 6) Dinas Perhubungan melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.444.855.010,00 terealisasi sebesar Rp1.357.193.360,00, tidak terserap Rp87.661.650,00;

- 7) Badan Lingkungan Hidup melaksanakan 4 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp800.242.150,00 terealisasi sebesar Rp778.629.707,00 tidak terserap Rp21.612.443,00;
- 8) Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil melaksanakan 4 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.822.180.450,00 terealisasi sebesar Rp2.481.377.088,00 tidak terserap Rp340.803.362,00;
- 9) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 5 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.966.416.403,00 terealisasi sebesar Rp2.726.432.066,00, tidak terserap Rp239.984.337,00;
- 10) Dinas Sosial melaksanakan 2 program terdiri 14 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp207.929.800,00 terealisasi sebesar Rp194.069.099,00, tidak terserap Rp13.860.701,00;
- 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.104.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.029.267.437,00, tidak terserap Rp74.732.563,00;
- 12) Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 3 program terdiri 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp371.492.000,00 terealisasi sebesar Rp363.009.366,00 tidak terserap Rp8.482.634,00;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 4 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.278.987.750,00, terealisasi sebesar Rp1.258.774.700,00, tidak terserap Rp20.213.050,00;
- 14) Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 4 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.055.100.000,00 terealisasi sebesar Rp1.044.711.032,00 tidak terserap Rp10.388.968,00;
- 15) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.132.478.150,00, terealisasi sebesar Rp1.007.346.938,00, tidak terserap Rp125.131.212,00;

- 16) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 3 program terdiri 12 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp262.214.000,00, terealisasi sebesar Rp261.770.150,00 tidak terserap Rp443.850,00;
- 17) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 program terdiri 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp396.112.000,00 terealisasi sebesar Rp389.280.884,00, tidak terserap Rp6.831.116,00;
- 18) Sekretariat Daerah melaksanakan 5 program terdiri 36 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.119.314.911,18, terealisasi sebesar Rp41.896.595.062,00 tidak terserap Rp3.222.719.849,18;
- 19) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan 5 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.708.000,00 terealisasi sebesar Rp3.999.050.337,00, tidak terserap Rp1.001.657.663,00;
- 20) Inspektorat Kabupaten melaksanakan 3 program terdiri 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp257.220.000,00, terealisasi sebesar Rp257.127.900,00, tidak terserap Rp92.100,00;
- 21) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.671.248.500,00, terealisasi sebesar Rp6.035.571.943,00, tidak terserap Rp1.635.676.557,00;
- 22) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 5 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.329.306.200,00 terealisasi sebesar Rp1.221.098.482,00, tidak terserap Rp108.207.718,00;
- 23) Kecamatan Gresik melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.326.000,00, terealisasi sebesar Rp296.308.826,00 tidak terserap Rp4.017.174,00;
- 24) Kecamatan Kebomas melaksanakan 3 program terdiri 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp233.265.750,00 terealisasi sebesar Rp231.253.638,00, tidak terserap Rp2.012.112,00;

- 25) Kecamatan Manyar melaksanakan 3 program terdiri 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp242.500.000,00 terealisasi sebesar Rp241.615.804,00, tidak terserap Rp884.196,00;
- 26) Kecamatan Cerme melaksanakan 3 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp297.456.000,00 terealisasi sebesar Rp295.758.300,00, tidak terserap Rp1.697.700,00;
- 27) Kecamatan Benjeng melaksanakan 3 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp221.211.750,00 terealisasi sebesar Rp216.543.105,00, tidak terserap Rp4.668.645,00;
- 28) Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 3 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp305.500.000,00, terealisasi sebesar Rp295.904.189,00 tidak terserap Rp9.595.811,00;
- 29) Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 3 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp330.583.500,00 terealisasi sebesar Rp314.459.255,00 tidak terserap Rp16.124.245,00;
- 30) Kecamatan Driyorejo melaksanakan 3 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp285.500.000,00, terealisasi sebesar Rp281.461.017,00, tidak terserap Rp4.038.983,00;
- 31) Kecamatan Wringinanom melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.500.000,00 terealisasi sebesar Rp290.788.490,00, tidak terserap Rp1.711.510,00;
- 32) Kecamatan Kedamean melaksanakan 3 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp289.624.000,00 terealisasi sebesar Rp287.762.965,00 tidak terserap Rp1.861.035,00;
- 33) Kecamatan Menganti melaksanakan 3 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp274.081.000,00, terealisasi sebesar Rp268.636.751,00 tidak terserap Rp5.444.249,00;
- 34) Kecamatan Sidayu melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.500.000,00, terealisasi sebesar Rp290.117.646,00, tidak terserap Rp2.382.354,00;

- 35) Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 3 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp305.500.000,00, terealisasi sebesar Rp303.335.914,00, tidak terserap Rp2.164.086,00;
- 36) Kecamatan Panceng melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp254.362.900,00, terealisasi sebesar Rp252.627.367,00, tidak terserap Rp1.735.533,00;
- 37) Kecamatan Bungah melaksanakan 4 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.500.000,00, terealisasi sebesar Rp284.832.248,00, tidak terserap Rp7.667.752,00;
- 38) Kecamatan Dukun melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp295.500.000,00, terealisasi sebesar Rp292.066.600,00, tidak terserap Rp3.433.400,00;
- 39) Kecamatan Sangkapura melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp358.500.000,00 terealisasi sebesar Rp270.730.842,00, tidak terserap Rp87.769.158,00;
- 40) Kecamatan Tambak melaksanakan 3 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp352.500.000,00, terealisasi sebesar Rp348.256.527,00 tidak terserap Rp4.243.473,00;
- 41) Sekretariat KORPRI melaksanakan 3 program terdiri 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00, terealisasi sebesar Rp98.114.250,00 tidak terserap Rp1.885.750,00;
- 42) Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 3 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp460.477.500,00, terealisasi sebesar Rp408.316.360,00, tidak terserap Rp52.161.140,00;
- 43) Kantor Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 3 program terdiri 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp222.695.000,00, terealisasi sebesar Rp219.935.300,00, tidak terserap Rp2.759.700,00;
- 44) Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan 3 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp397.600.500,00 terealisasi sebesar Rp378.406.322,00 tidak terserap Rp19.194.178,00;

- 45) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 4 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.315.765.000,00 terealisasi sebesar Rp1.233.666.176,00, tidak terserap Rp82.098.824,00;
- 46) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melaksanakan 3 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp846.012.100,00, terealisasi sebesar Rp790.545.268,00, tidak terserap Rp55.466.832,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD tersebut antara lain digunakan untuk:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- Penyediaan jasa surat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- Jaminan barang milik daerah;
- Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Penyediaan bahan logistik kantor;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- Penyediaan jasa belajar mengajar;
- Penyediaan jasa administrasi perkantoran;
- Penyediaan jasa pelayanan
- Penyediaan jasa operasional;
- Penyediaan jasa pelayanan pimpinan/pejabat;
- Kajian sistem administrasi perkantoran;

- Pemeliharaan rutin/berkala mebelair;
- Penyediaan peralatan rumah tangga.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- Pengadaan mebeleur;
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas;
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- Pembangunan gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/kendaraan operasional;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- Rehabilitasi gedung/berat kendaraan dinas/operasional;
- Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas;
- Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas;
- Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal;
- Pendidikan dan pelatihan non formal;
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan sinergi lerja aparatur;
- Peningkatan kualitas SDA SKPD;
- Penilaian angka kredit;
- Pembinaan dan evaluasi kepegawaian SKPD.

4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- Peyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;

- Penyusunan rencana kinerja SKPD;
- Penyusunan rencana strategis SKPD;
- Penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pengembangan sistem akutansi;
- Penyusunan laporan keuangan semesteran;
- Penyusunan laporan akhir tahun.

5. Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS

- Pemulangan pegawai yang pensiun.

B. Urusan Wajib

Dalam rangka penyelenggaraan 26 urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp349.786.984.774,00, terealisasi sebesar Rp319.647.142.430,63, tidak terserap sebesar Rp30.139.841.843,37. Adapun penyelenggaraan masing-masing urusan wajib adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Pada tahun 2012 Urusan Pendidikan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 9 program terdiri 73 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp96.893.142.614,00, terealisasi sebesar Rp93.668.398.059,00, tidak terserap Rp3.224.744.555,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1. Dinas Pendidikan melaksanakan 7 program terdiri 68 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp95.101.879.114,00, terealisasi sebesar Rp92.122.446.009,00, tidak terserap Rp2.979.433.105,00, disebabkan adanya efisiensi Rp2.859.433.105,00 Tidak dilaksanakan Rp120.000.000,00
- 1.2. Dinas Kesehatan melaksanakan 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.092.263.500,00, terealisasi sebesar

Rp1.030.276.655,00 tidak terserap Rp61.986.845,00, disebabkan adanya efisiensi.

1.3. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp699.000.000,00, terealisasi sebesar Rp515.675.395,00 tidak terserap Rp183.324.605,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pembinaan peningkatan Karakter Pendidikan tenaga Pendidik sebanyak 250 orang;
- Terpilihnya gugus TK terbaik untuk mengikuti lomba gugus TK Tingkat Provinsi Jatim;
- Terselenggaranya pelaksanaan Hari Anak Nasional;
- Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, pendampingan proses penerimaan dana Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOP) kepada Kepala Sekolah;
- Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) sebagai sarana bermain Anak TK;
- Terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan SD dan SMP serta peningkatan sarana mutu pendidikan pada 70 lembaga;
- Tersedianya alat praktek dan peraga siswa sebagai media pembelajaran;
- Tersedianya alat dan layanan kantin kejujuran pada 3 lembaga;
- Rehabilitasi gedung sekolah dan sarana peningkatan mutu pendidikan pada 321 lembaga;
- Meningkatnya prestasi siswa sesuai dengan kompetensi diri;
- Terpenuhinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 439 lembaga;
- Terlaksananya Ujian Nasional tingkat SD, SMP dan SMA;
- Terwujudnya inovasi pembelajaran mata pelajaran;
- Tersedianya data Bantuan Beasiswa Miskin (BSM SD) yang akurat;
- Terlaksananya pembinaan SMP Negeri Satu Atap;
- Terlaksananya penerimaan murid baru pada sekolah negeri;
- Terlaksananya Pembinaan SMP Inklusi pada 2 lembaga;

- Terlaksananya pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- Terlaksananya kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Propinsi Jawa Timur;
- Terlaksananya pelatihan guru Sekolah Standart Nasional sebanyak 192 peserta;
- Tersedianya gedung sekolah pada 2 lembaga;
- Terealisasinya pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah pada 4 lembaga;
- Tersedianya mebelair sekolah pada 2 lembaga;
- Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah pada 6 lembaga;
- Tersedianya data SMK di Kabupaten Gresik pada 30 SMK;
- Terlaksananya Operasi Sayang Siswa;
- Terlaksananya kegiatan pekan seni pelajar di kabupaten dan propinsi;
- Tercapainya partisipasi dalam kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan sebanyak 94 orang;
- Tercapainya angka partisipasi Wajar Diknas 12 tahun;
- Terlaksananya penyebaran informasi pendidikan melalui siaran radio;
- Terlaksananya Ujian Nasional paket A,B dan C yang memenuhi Standar Kurikulum sebanyak 1.920 siswa.
- Terpilihnya Juara 1 – 3 untuk 5 jenis lomba pada 15 lembaga;
- Terlaksananya Sertifikasi Pendidikan sebanyak 1.000 guru;
- Meningkatnya kompetensi guru sebanyak 108 guru pemula;
- Terbinanya satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
- Terlaksananya Penilaian Angka Kredit PNS dan CPNS secara periodik dan terlaksananya sosialisasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan swasta sebanyak 700 orang;
- Terlaksananya pembinaan sekolah model yang berbasis keunggulan lokal di masing – masing Kecamatan;
- Tersedianya jurnal pendidikan sebanyak 2.150 buku;
- Terlaksananya pembinaan KTSP;
- Terlaksananya pembinaan penelitian Tindakan Kelas;
- Tersedianya Pelaporan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan;

- Terpenuhi Data Pendidikan formal / Sekolah dan Madrasah;
- Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan BOS;
- Tersalurnya dana bantuan hibah daerah sesuai dengan sasaran;
- Tersusunnya dokumen rencana pengembangan pendidikan dasar dan menengah sebagai pedoman pengembangan pendidikan dasar dan menengah;
- Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan;
- Terpeliharanya BTS Jardiknas di lingkungan Dinas, Pendidikan dan terkoneksi jaringan internet di UPTD Kec. Serta guru mampu menghasilkan media pembelajaran yang atraktif berbasis macromedia flash;
- Terbentuknya kelompok Budaya Kerja (KBK);
- Terpeliharanya lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar;
- Terlaksananya pengadaan sarana prasarana AKPER dan kelengkapan fasilitasnya;
- Terlaksananya pembelian buku literatur

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pendidikan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditargetkan 64% realisasi sebesar 63,07%;
- Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) ditargetkan 80% realisasi sebesar 100%;
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ditargetkan 94,2% realisasi sebesar 98,02%;
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B ditargetkan sebesar 74,3 % realisasi sebesar 85,59%;
- Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/ MA/Paket C ditargetkan 69% realisasi sebesar 65,03%;
- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI ditargetkan 0,028% realisasi sebesar 0,05%;

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ditargetkan 0,28% realisasi sebesar 0,17%;
- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA ditargetkan 0,002% realisasi sebesar 0,43%;
- Angka Kelulusan (AL) SD/MI ditargetkan 100% realisasi sebesar 100%;
- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ditargetkan 100% realisasi sebesar 100%;
- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA ditargetkan 94% realisasi sebesar 100%;
- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs ditargetkan 99,20% realisasi sebesar 94,17%;
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ditargetkan 90% realisasi sebesar 90,70%;
- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV ditargetkan 89% realisasi sebesar 83,65%.

2. Urusan Kesehatan

Pada tahun 2012 Urusan Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 18 program terdiri 65 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp98.512.195.266,38, terealisasi sebesar Rp92.617.879.758,00 tidak terserap sebesar Rp5.894.315.508,38 dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Dinas Kesehatan melaksanakan 13 program terdiri 44 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp38.784.474.641,00 , terealisasi sebesar Rp35.500.365.745,00 tidak terserap Rp3.284.108.896,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp 618.267.472,00
 - 2) Sisa Lelang/kegiatan tidak Rp 2.665.841.424,00
- dilaksanakan

2.2. Badan Pengelola Rumah Sakit melaksanakan 5 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp59.727.720.625,38, terealisasi sebesar

Rp57.117.514.013,00, tidak terserap sebesar Rp2.610.206.612,38, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya obat esensial dan generik sesuai kebutuhan;
- Terlaksananya pendistribusian obat secara merata ke 32 Puskesmas;
- Terlaksananya pelayanan kefarmasian sesuai standar pada sarana kesehatan;
- Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
- Tercukupinya alat kesehatan di puskesmas, pusku dan puskesdes sesuai standar;
- Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar khusus, rujukan dan penunjang di puskesmas dan jaringannya dan sarana kesehatan swasta;
- Terlaksananya pelayanan kesehatan di posyandu, Puskesmas keliling, Upaya Kesehatan Gigi Mulut di Sekolah (UKGS) dan daerah rawan bencana;
- Terlaksananya pengawasan kualitas air, Sarana Air Bersih (SAB), Tempat-Tempat Umum (TTU), Depot Air Minum (DAM), Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2) dan perumahan;
- Terlaksananya pelayanan kesehatan Ibu, Anak, remaja dan KB;
- Terlaksananya pemeriksaan kualitas makanan terhadap bahan tambahan pangan yang berbahaya;
- Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat;
- Tercapainya peningkatan kualitas posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam pengembangan desa siaga;
- Tersedianya data dan peta status Gizi balita;
- Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk dan Ibu hamil;
- Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Zat Gizi Mikro;
- Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi;
- Terlaksananya penanggulangan Gizi lebih;

- Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan;
- Terlaksananya penyuluhan menciptakan lingkungan sehat;
- Terlaksananya pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat;
- Terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk (membatasi penularan DBD);
- Terlaksananya pengadaan vaksin menular;
- Terlaksananya pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit menular;
- Terlaksananya Imunisasi Bayi dan anak Sekolah Kelas I, II, III;
- Terlaksananya Surveyance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;
- Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan;
- Terlaksananya Pembangunan dan Pemutakhiran data Dasar Standart Pelayanan Kesehatan;
- Terlaksananya audit internal dan Pelaksana audit Surveylans International Organization for Standardization (ISO);
- Terlaksananya pembangunan dan peningkatan pelayanan Puskesmas;
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas;
- Terpeliharannya alat-alat kesehatan;
- Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu);
- Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan masyarakat;
- Terlayaninya pasien jamkesmas, jamkesda dan Jampersal di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya pelayanan perizinan bidang kesehatan;
- Terwujudnya pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia;
- Terlaksananya pengawasan industri pangan, supermarket dan pasar;
- Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga;
- Terlaksananya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dalam Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- Peningkatan Pemanfaatan sarana kesehatan Rumah Sakit;
- Meningkatnya mutu pelayanan dan pendapatan rumah sakit;
- terselesaikannya gedung VIP Lantai 4 RSUD Ibnu Sina;

- Tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga rumah sakit;
- Tercukupinya sarana dan prasarana tempat ibadah;
- Tercukupinya kebutuhan alat-alat kedokteran paru dan radiologi;
- Terpeliharanya mobil Ambulance/Jenazah Rumah Sakit;
- Terpeliharanya seluruh perlengkapan rumah sakit.

Adapun permasalahan pada Urusan Kesehatan adalah:

- Cakupan komplikasi neonatal yang ditangani, pelayanan kesehatan anak balita, dan frekwensi pembinaan di sekolah belum mencapai target;
- Anggaran yang tersedia untuk media promosi termasuk sarana promosinya belum semua tercukupi;
- Honor kader posyandu, perbulan, perorang Rp10.000 sejak dulu belum pernah ada kenaikan;
- Pembangunan Puskesmas Aloon-Aloon ditunda pelaksanaannya karena ada kendala tukar guling dengan BPN;
- Penyerapan dana Program Pelayanan Kesehatan JAMKESMASDA berdasarkan klaim dari puskesmas dan klaim untuk bulan Desember baru bisa dilaksanakan di bulan Januari Tahun 2013. Jadi sisa dana JAMKESMASDA Tahun 2012 adalah perkiraan klaim JAMKESMASDA bulan Desember;
- Masih minimnya kader lanjut usia (lansia) di posyandu lansia;
- Masih kurangnya cakupan pelayann di posyandu lansia karena kurangnya kesadaran lansia tentang pentingnya kesehatan;
- Belum semua desa mengembangkan P4K dengan dana mandiri dan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan donor darah tidak ditindaklanjuti oleh 12 kecamatan yang lain;
- Belum semua desa menganggarkan dana ADD untuk keperluan P4K Desa;
- Motivator desa tidak bisa mengembangkan sampai ke desa-desa yang lain;
- Dengan adanya Jampersal akan menyulitkan tersedianya dana tabungan persalinan (tabulin) dan dana sosial persalinan (dasolin);
- Sulitnya pemberdayaan lintas program dan lintas sektor.

Solusi permasalahan pada Urusan Kesehatan adalah:

- Melaksanakan kunjungan neonatal dengan menggunakan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
- Meningkatkan kapasitas petugas tentang Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan meningkatkan koordinasi dengan lintas instansi (Dinas pendidikan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan PKK);
- Anggaran ditingkatkan sehingga pengadaan media promosi di Kabupaten Gresik tercukupi karena media promosi sebagai sarana promotif dibidang kesehatan;
- Bila anggaran APBD memungkinkan honor kader posyandu diusulkan menjadi Rp15.000 perbulan, perorang;
- Perencanaan dana JAMKESMASDA untuk Tahun 2013 lebih cermat;
- Klaim JAMKESMASDA bulan Desember untuk Tahun 2013 direalisasi pertengahan Bulan Desember;
- Mengadakan pelatihan bagi kader lansia;
- Melaksanakan penyuluhan posyandu lansia secara rutin;
- Diharapkan semua desa bisa mengembangkan P4K dari dana ADD;
- Donor darah agar dilaksanakan di semua kecamatan dengan melibatkan lintas terkait;
- Menggalang kembali dana tabulin dan dasolin;
- Mengaktifkan kembali jadwal kunjungan dari Forum Komunikasi P4K Kabupaten Gresik;
- Sosialisasi kembali pemanfaatan dana jampersal;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana, forum komunikasi P4K agar pemberdayaan masyarakat, lintas sektoral, lintas program agar berjalan lebih mudah.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kesehatan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 ditargetkan sebesar 92% realisasi 91,81%;

- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ditargetkan sebesar 80% realisasi 139,77%;
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ditargetkan sebesar 92% realisasi 102,91%;
- Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan sebesar 92% realisasi 101,62%;
- Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, ditargetkan sebesar 80% realisasi 61,91%;
- Cakupan Pelayanan Anak Balita ditargetkan sebesar 69% realisasi 73,9%;
- Cakupan Kunjungan Bayi ditargetkan sebesar 86% realisasi 102,6%;
- Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) ditargetkan sebesar 100% realisasi 88,49%;
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) ditargetkan sebesar 80% realisasi 63,97%;
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin ditargetkan sebesar 80% realisasi 53,32%;
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Cakupan Balita yang mendapat Vitamin A ditargetkan sebesar 90% realisasi 85,00%;
- Persentase Rumah Sehat ditargetkan sebesar 81% realisasi 87%;
- Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan ditargetkan sebesar 98,08% realisasi 96,3%;
- Pengadaan Obat Esensial ditargetkan sebesar 99,19% realisasi 96%;
- Pengadaan Obat Generik ditargetkan sebesar 99,55% realisasi 99,6%;
- Cakupan Rawat Jalan ditargetkan sebesar 15% realisasi 63,5%;
- Cakupan Rawat Inap ditargetkan sebesar 3,70% realisasi 0,36%;
- Cakupan Rumah Tangga Sehat ditargetkan sebesar 67% realisasi 54,05%;
- Posyandu Purnama ditargetkan sebesar 68% realisasi 78,68%.

- Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda ditargetkan sebesar 1,61% realisasi 46,98%;
- Bed Occupancy Rate ditargetkan sebesar 67,65% realisasi 73,41%;
- Average Length Of Stay ditargetkan sebesar 4,75 hari realisasi 3,9 hari;
- Turn Over Internal ditargetkan sebesar 2,29 hari realisasi 1,4 hari;
- Bed Turn Over ditargetkan sebesar 51,44 kali realisasi 69,7 kali.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Kesehatan antara lain:

- Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) tidak tercapai karena mobilitas penduduk musiman, ada bayi yang tidak mau di imunisasi dan koordinasi bidan kurang maksimal.
- Cakupan Balita yang mendapat Vitamin A tidak mencapai target karena data yang digunakan dalam penghitungan target menggunakan Intercensal Population Surveys (*SUPAS*) sedangkan bila menggunakan data riil Kabupaten Gresik mencapai 100%.
- Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan tidak mencapai target karena Kebutuhan Obat Kurang untuk mengatasinya memakai obat pendamping dari bidan (swadana).

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kesehatan adalah:

- Juara III Lomba KB Perusahaan Tingkat Nasional;
- Juara I Lomba Kader Tiwisada (Juara I);
- Lomba Duta Kesehatan Remaja (Juara I);
- Lomba Capaian Pelayanan KB IUD Terbanyak dalam rangka TNI manunggal KB Kesehatan (Juara I);
- Lomba KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang (Puskesmas Kebomas) (Juara II);
- Lomba LSS (Juara III);
- LOMBA Puskesmas Terbaik (Harapan III).

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pada tahun 2012 Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 16 program terdiri 52 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp157.271.819.525,00, terealisasi sebesar Rp103.878.619.481,00, tidak terserap Rp53.393.200.044,00, dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 14 program terdiri 50 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp156.821.819.525,00, terealisasi sebesar Rp103.622.514.272,00 tidak terserap Rp53.199.305.253,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 1.608.987.388,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp | 3.667.413.975,00 |
| 3) Belum dapat dilaksanakan | Rp | 47.922.903.890,00 |

3.2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp200.000.000,00, terealisasi sebesar Rp196.986.209,00, tidak terserap sebesar Rp3.013.791,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|----------------|----|--------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 2.563.791,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp | 450.000,00 |

3.3. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp250.000.000,00, terealisasi sebesar Rp59.119.000,00, tidak terserap sebesar Rp190.881.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya Sarana Transportasi Jalan yang memadai pada 11 Ruas Jalan (Kecamatan Dukun, Benjeng, Tambak dan Sangkapura);
- Perencanaan (DED) saluran drainase / gorong-gorong di 11 lokasi;

- Tersedianya Sarana dan prasarana drainase di 3 Kecamatan (Gresik, Kebomas dan Manyar);
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan se Kabupaten Gresik;
- Peningkatan/pemeliharaan Infrastruktur jalan (DAK) di 5 ruas;
- Peningkatan/pemeliharaan Infrastruktur jalan (BK Provinsi) di 3 ruas;
- Tersedianya dokumen kondisi jalan kabupaten;
- Tersedianya Kendaraan Operasional sebanyak 5 unit;
- Tersedianya Alat Laboratorium sebanyak 12 unit;
- Tersedianya Data Test Laboratorium jalan dan jembatan untuk kegiatan proyek di 116 lokasi;
- Rehabilitasi/pemeliharaan alat – alat berat sebanyak 11 unit;
- Terpasangnya PJU di 16 Kecamatan;
- Terawatnya lampu PJU di 16 Kecamatan;
- Tertatanya perijinan dan penggunaan kekayaan daerah sebanyak 2 macam perijinan;
- Terpasangnya patok kilometer dan hektometer jalan untuk petunjuk jarak antar kota;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan air Bersih di 6 lokasi;
- Terbangunnya pintu air sebanyak 8 bangunan air dan tersedianya dokumen perencanaan.
- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi sebanyak 10 jaringan irigasi;
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air;
- Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan Irigasi yang terbangun sebanyak 14 saluran irigasi;
- Mengevaluasi pengajuan ijin pemanfaatan tanah pengairan sebanyak 150 ijin;
- Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur irigasi sebanyak 15 jaringan irigasi;
- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan pengairan sebanyak 5 Jaringan Irigasi;
- Terlaksananya pengamananan antara batas tanah waduk dan tanah warga di 9 Kecamatan;

- Terlaksananya pengamanan batas tanah negara di wilayah Gresik selatan dan utara;
- Pembinaan petugas dan anggota HIPPA di bidang sumber daya air sebanyak 35 orang dan 2 kelompok HIPPA;
- Pembangunan dan Prasarana pengambilan dan saluran pembawa (BK Provinsi) sebanyak 4 paket;
- Terbangunannya embung dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 5 buah bangunan dan tersedianya dokumen perencanaan;
- Rehabilitasi/perbaiki waduk sebanyak 16 waduk;
- Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 10 waduk;
- Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau sebanyak 7 waduk;
- Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali di 23 saluran pembuang;
- Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali (BK Provinsi) di 11 saluran pembuang;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dilingkungan kawasan religius, RTH, Pantai, Tugu Selamat Datang dan Wahana Kreasi;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkungan Kawasan religius di 2 lokasi;
- Pembangunan/peningkatan infrastruktur (BK Provinsi) di Kawasan RTH, Pantai, Tugu Selamat Datang dan Balai Rakyat;
- Terealisasinya Stadion Olah Raga di Kabupaten Gresik;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkungan perdesaan di 18 Kecamatan;
- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan di 4 Kecamatan;
- Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih perdesaan di 6 lokasi;
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan di 5 Kecamatan;
- Penataan Lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (BK Provinsi) di 11 lokasi;

- Meningkatnya jumlah asosiasi/rekanan yang memahami tentang Sosialisasi regulasi dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi standar ISO sebanyak 12 Asosiasi.
- Sertifikat Jasa Konstruksi yang diterbitkan sebanyak 117 sertifikat;
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong – gorong di 3 Kecamatan;
- Tersedianya Dokumen Perencanaan Program ke PU-an yang disusun dalam setahun sebanyak 6 dokumen;
- Tersedianya dokumen harga satuan bahan dan upah kerja sebanyak 210 exlembar;
- Tercapainya operasional pengamanan prasarana dan sarana ke Pu-an di 4 cabang dinas;
- Terlaksananya lelang di Lingkungan Dinas PU;
- Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi penguatan kelembagaan di 5 kecamatan;
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penataan lingkungan berbasis komunitas di 1 kawasan.
- Terlaksananya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 88 Tahun 2012 di Desa Kandangan Kecamatan Duduksampeyan
- Tersedianya dokumen laporan hasil pengawasan.

Adapun permasalahan pada Urusan Pekerjaan Umum adalah:

- Pembangunan Stadion Olahraga Gresik dana tidak terserap seluruhnya karena kegiatan tersebut bersifat multiyears yang sampai akhir tahun anggaran 2012 masih dalam proses pelelangan fisik.
- Pada kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur ada anggaran yang tidak terserap untuk tenaga ahli karena belum diperlukan.

Solusi permasalahan pada Urusan Pekerjaan Umum adalah:

- Anggaran tidak diserap dan diusulkan dianggarkan kembali.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 70,40 %, realisasi 71,06 %;

- Jembatan kabupaten dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 94,88%, realisasi 98 %;
- Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Gresik dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 52 %, realisasi 52,25 %;
- Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 45,57 %, realisasi 58,41 %;

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pekerjaan Umum adalah:

- Penghargaan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Gresik atas Pencapaian Kinerja Terbaik sebanyak 3 kali berturut-turut Sub Bidang pembinaan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota dari Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Pada tahun 2012 Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Sosial.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 15 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp8.590.494.000,00, terealisasi sebesar Rp7.717.465.223,00, tidak terserap Rp873.028.777,00 dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 5 program terdiri 13 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.199.322.500,00, terealisasi sebesar Rp7.339.130.723,00, tidak terserap Rp860.191.777,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 768.716.577,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 91.475.000,00 |

4.2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp148.000.000,00, terealisasi sebesar Rp138.065.000,00, tidak terserap Rp9.935.000,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1) Efisiensi | Rp 9.060.000,00 |
|--------------|-----------------|

2) Sisa Lelang Rp 875.000,00

4.3. Dinas Sosial melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp243.171.500,00, terealisasi sebesar Rp240.269.500,00 tidak terserap Rp2.902.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan sebanyak 4 kegiatan;
- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana rusunawa di Kecamatan Kebomas, Gresik dan Driyorejo;
- Terealisasinya pelayanan terhadap penghuni rusunawa di Kecamatan Kebomas, Gresik dan Driyorejo yang nyaman;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas rumah gakin yang layak huni di 18 Kecamatan;
- Tersedianya sarana sanitasi yang layak di 5 lokasi lingkungan permukiman;
- Tersedianya infrastruktur pengolahan limbah komunal yang layak di 7 lokasi;
- Terselenggaranya sosialisasi pembinaan dan monitoring program Sanitasi *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI)-PNPM di 21 lokasi;
- Terealisasinya sarana dan prasarana perumahan yang layak huni bagi MBR di 2 lokasi;
- Terselenggaranya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran;
- Tersedianya Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran sebanyak 2 Unit pompa air, 1 unit kendaraan pick up, 1 paket alat sound system, 3 unit alat komunikasi;
- Operasional dan pemeliharaan sarana PMK;
- Tersedianya sarana dan prasarana pemakaman;
- Terselenggaranya sosialisasi dalam rangka penyediaan areal pemakaman;
- Terselenggaranya Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Perumahan;
- Terpeliharanya Makam Pahlawan di 4 TMP.

Adapun permasalahan pada Urusan Perumahan Rakyat adalah:

- Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman berbasis masyarakat yang sebagian dananya tidak terserap adalah merupakan sisa DAK Tahun 2011 yang tidak jadi dilaksanakan di Tahun 2012;

Solusi permasalahan pada Urusan Perumahan Rakyat adalah:

- Anggaran tidak terserap

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih target tahun 2012 sebesar 58 %, realisasi meningkat menjadi 72,46 %;
- Lingkungan Permukiman Kumuh tahun 2011 sebesar 0,863%, tahun 2012 berkurang menjadi 0,862%;
- Rumah Layak Huni target tahun 2012 sebesar 89 %, realisasi 87,01 %.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Perumahan Rakyat adalah:

- Juara I Lomba HIPPAM Tingkat Propinsi Jawa Timur untuk Kategori HIPPAM menengah atas nama HIPPAM KURNIA Desa Doudo Kecamatan Panceng Kab.Gresik.

5. Urusan Penataan Ruang

Pada tahun 2012 Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Badan Penanaman Modal dan Perijinan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 12 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.195.000.000,00, terealisasi sebesar Rp1.959.214.750,00, tidak terserap Rp235.785.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 5.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp500.000.000,00, terealisasi sebesar

Rp489.413.700,00, tidak terserap Rp10.586.300,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|----------------|----|---------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 150.000,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp | 10.436.300,00 |

5.2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 2 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.480.000.000,00, terealisasi Rp1.255.569.250,00, tidak terserap Rp224.430.750,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|-----------------|----|----------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 42.194.150,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp | 2.236.600,00 |
| 3) Lelang gagal | Rp | 180.000.000,00 |

5.3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp215.000.000,00, terealisasi Rp214.231.800,00, tidak terserap Rp768.200,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya Peraturan Bupati tentang standar Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan di bidang Penataan Ruang, Peraturan tentang Garis Sempadan, Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Banjir dan RTBL, Penyusunan RPIJM, Verifikasi Perizinan dan Peninjauan Lokasi;
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pembuatan SIM Geo Pengawasan Penataan Ruang;
- Tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sangkapura;
- Terkendalinya pembangunan sesuai peruntukan tata ruang dan terinventarisasinya PSU Perumahan di Kabupaten Gresik;
- Tersusunnya dokumen Ranperda RDTR BWP Perkotaan;
- Tersusunnya dokumen Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Alon-alon Sidayu;

- Tersusunnya Dokumen Renstra Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Terpencil;
- Terpeliharanya Sistem GIS penataan dan pemanfaatan ruang;
- Tersusunnya dokumen Rencana Penyatuan antar Moda Transportasi dan perubahan struktur ruang;
- Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebanyak 500 SK.

Adapun permasalahan pada Urusan Penataan Ruang adalah:

- Penyusunan rencana RDTR Kecamatan Dukun tidak dapat dilaksanakan karena terjadi lelang gagal dan waktu tidak mencukupi.

Solusi permasalahan pada Urusan Penataan Ruang adalah:

- Dana tidak diserap dan dianggarkan kembali.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penataan Ruang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Perda RTRW Kabupaten Gresik sudah disahkan pada Tahun 2011;
- Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW target tahun 2012 ada realisasi ada.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada tahun 2012 Urusan Perencanaan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 11 program terdiri 42 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp7.094.438.000,00, terealisasi sebesar Rp6.389.094.155,00 tidak terserap Rp705.343.845,00 dengan rincian sebagai berikut:

6.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 8 program terdiri 36 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.154.251.500,00 terealisasi sebesar Rp5.583.685.255,00 tidak terserap Rp570.566.245,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp	186.111.245,00
2) Sisa Lelang	Rp	65.757.000,00

3) Lelang gagal	Rp	166.500.000,00
4) Kegiatan yang belum dilaksanakan	Rp	152.198.000,00
6.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar 934.573.000,00 terealisasi sebesar 799.795.400,00 tidak terserap 134.777.600,00		
1) Efisiensi	Rp	22.520.100,00
2) Lelang gagal	Rp	49.500.000,00
3) Kegiatan yang belum dilaksanakan		62.757.500,00
6.3. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.613.500,00, terealisasi sebesar Rp5.613.500,00.		

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- Tersedianya profile data potensi dan aspek-aspek ekonomi serta informasi potensi tiap-tiap kecamatan;
- Tersedianya informasi profil daerah Kabupaten Gresik;
- Tersedianya dokumen DED Jaringan Irigasi Kawasan Agropolitan sebagai acuan dalam pengembangan jaringan irigasi untuk pengembangan hortikultura di kawasan Gresik Utara;
- Tersusunnya memorandum percepatan pembangunan sanitasi permukiman;
- Terselenggaranya Musrenbang RKPD untuk membahas usulan program/kegiatan dari Bottom up maupun Top down;
- Tersusunnya RKPD Kabupaten Gresik tahun 2013;
- Tersusunnya buku laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah akhir tahun anggaran 2011;
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah;
- Terselenggaranya Workshop perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik;
- Tersusunnya buku potensi dan investasi Kabupaten Gresik;

- Tersedianya dokumen data base analisa pembangunan ekonomi dan keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- Tersusunnya buku perencanaan pengembangan kluster industri kecil sebagai acuan dalam pengembangan dan promosi produk unggulan di Kabupaten Gresik;
- Tersusunnya Buku Review Perencanaan Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya sosialisasi manajemen perencanaan pengembangan BUMDES;
- Tersusunnya buku laporan pengendalian program bantuan pengentasan kemiskinan;
- Tersedianya data PPLS 2011 yang telah diverifikasi sebagai acuan program pengentasan kemiskinan;
- Tersusunnya buku strategi penanggulangan kemiskinan;
- Terlaksananya fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) PNPM-Mandiri perkotaan;
- Tersusunnya masterplan pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup;
- Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah;
- Terpasangnya pilar batas dan pembuatan peta garis batas antara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya;
- Terpasangnya Pilar Batas Kelurahan/Desa dan pembuatan Peta Garis Batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Gresik;
- Tersusunnya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab. Gresik.

Adapun permasalahan pada Urusan Perencanaan Pembangunan adalah:

- Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Irigasi tidak dapat dilaksanakan karena lelang gagal;
- Pemasangan patok pilar batas apabila tepat di tengah sungai atau di tengah jalan dan di dalam areal pabrik sulit dilaksanakan;

Solusi permasalahan pada Urusan Perencanaan Pembangunan adalah:

- Kegiatan yang lelang gagal dana tidak diserap dan dianggarkan kembali;
- Pemasangan patok pilar batas digeser di tempat yang aman namun masih dalam garis batas dan masing-masing ada berita acaranya.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- Program RKPD yang diakomodir dalam APBD ditargetkan sebesar 80% realisasi 80%.

7. Urusan Perhubungan

Pada tahun 2012 Urusan Perhubungan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 24 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.931.172.613,00, terealisasi sebesar Rp3.756.813.156,00, tidak terserap Rp174.359.457,00 dengan rincian sebagai berikut:

7.1. Dinas Perhubungan melaksanakan 6 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.893.262.613,00, terealisasi sebesar Rp3.728.361.156,00, tidak terserap Rp164.901.457,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 18.359.981,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 49.541.476,00 |
| 3) Kegiatan tidak dilaksanakan | Rp 97.000.000,00 |

7.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp37.910.000,00, terealisasi sebesar Rp28.452.000,00, tidak terserap Rp9.458.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat;
- Tersedianya dokumen / data Masterplan Jaringan Transportasi Kota Gresik;

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Terminal / Pelabuhan;
- Perawatan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) sebanyak 9 unit traffic, 14 unit flash light;
- Terpeliharanya Marka Jalan;
- Terpeliharanya Rambu – rambu lalu lintas;
- Pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum sebanyak 205 armada;
- Penataan Pengelolaan Parkir;
- Terlaksananya Operasi Personil pengendalian Tertib Lalu Lintas sebanyak 15 orang;
- Operasional kepelabuhanan;
- Operasional Pengawasan dan pemantauan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
- Terlaksananya sosialisasi keselamatan angkutan laut;
- Operasional Pengawasan Peraturan Angkutan Barang dan Minerba di Jalan;
- Pembangunan sarana prasarana lalu lintas;
- Operasional pengujian kendaraan bermotor;
- Pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat di 3 Kecamatan;
- Pendataan menara telekomunikasi, warung internet dan jasa pos;
- Penguatan dan pengembangan model kelompok informasi masyarakat.
- Pemantapan Koordinasi Bidang Perhubungan

Adapun permasalahan pada Urusan Perhubungan adalah:

- Pengadaan sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat dilaksanakan karena rincian kegiatan dalam DPA tidak sesuai dengan yang akan dikerjakan

Solusi permasalahan pada Urusan Perhubungan adalah:

- Anggaran untuk kegiatan dimaksud tidak terserap dan diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perhubungan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Persentase Ketersediaan Angkutan Darat target pada Tahun 2012 sebesar 3 %, realisasi 1,6 %;
- Persentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas target pada Tahun 2012 sebesar 25 %, realisasi 37,8 %;
- Persentase Angkutan Umum darat dalam kondisi layak jalan target tahun 2012 sebesar 40 %, realisasi 80.%;
- Ketersediaan angkutan laut penyeberangan target pada tahun 2012 sebesar 114 %, realisasi 126 %;
- Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean target tahun 2012 sebesar 100 %, realisasi 98 %;
- Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang diselesaikan target tahun 2012 sebesar 100 %, realisasi 100 %.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2012 Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program terdiri 32 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp10.355.422.850,00, terealisasi sebesar Rp10.102.960.315,00, tidak terserap Rp252.462.535,00 dengan rincian sebagai berikut:

8.1. Badan Lingkungan Hidup melaksanakan 6 program terdiri 28 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.536.707.850 terealisasi sebesar Rp9.345.769.315,00, tidak terserap Rp190.938.535,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 152.799.385,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 38.139.150,00 |

8.2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp381.615.000,00, terealisasi sebesar Rp332.852.000,00, tidak terserap Rp48.763.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

8.3. Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp437.100.000,00, terealisasi sebesar Rp424.339.000,00, tidak terserap Rp12.761.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tercukupinya kebutuhan pengelolaan persampahan di 5 Kecamatan;
- Tertanganinya volume sampah sebanyak 730 m³/hari;
- Tersedianya tenaga pengelolaan persampahan di Kabupaten Gresik;
- Tersedianya dokumen sosialisasi tempat pemrosesan akhir baru sebanyak 1.200 bendel;
- Tertanganinya volume sampah di 2 kecamatan sebanyak 3 m³/hari,
- Bertambahnya Sarana dan Prasarana TPA di 1 lokasi;
- Pembuatan, pengiriman Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan cetak karcis retribusi kebersihan sebanyak 1.200 bendel;
- Tersusunnya buku study Kelayakan TPA Wringinanom sebanyak 38 buku;
- Terlaksananya Uji Kualitas Lingkungan sebanyak 56 sampel;
- Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan dan Penurunan jumlah kegiatan/usaha yang melakukan pencemaran;
- Tersusunnya Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- Terlaksananya koordinasi penyusunan Amdal dan terbentuknya komisi amdal sebanyak 3 orang/1 komisi;
- Meningkatnya partisipasi warga terhadap pengelolaan lingkungan;
- Meningkatnya Kualitas lingkungan kota yang bersih, hijau dan sehat sehingga teraihnya Piala ADIPURA;
- Tersedianya bahan dan perlengkapan laboratorium;
- Tingginya partisipasi masyarakat terhadap konservasi Sumber Daya Alam;
- Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pertambangan sebanyak 2 kali pembinaan dan 24 kali sasaran;
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup;

- Tersedianya data sumber daya alam yang dipantau dan data base perusahaan;
- Tersusunnya buku NSDH Kabupaten Gresik Tahun 2012 ;
- Tersedianya data hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- Terlaksananya uji emisi kendaraan bermotor roda empat sebanyak 120 sampel;
- Terwujudnya penetapan kawasan rokok;
- Penambahan wawasan pengetahuan tentang pengelolaan dan pemanatan lingkungan sebanyak 50 orang;
- Penataan taman kota ruang terbuka hijau di 2 Kecamatan kota;
- Perawatan, peremajaan dan penyulaman RTH (taman & jalur hijau kota) di 4 Kecamatan;
- Meningkatnya pembangunan taman dan sarana penunjangnya di 3 Kecamatan Kota;
- Tersusunnya Dolumen Kelayakan Lingkungan akibat adanya pembangunan waduk dan jaringan irigasi di Wilayah Kawasan Pesisir Pantai Utara Gresik;
- Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya pembinaan dan pemantauan perusahaan pemakai Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (AP) sebanyak 60 orang;
- Tersedianya informasi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Gresik.

Adapun permasalahan pada Urusan Lingkungan Hidup adalah:

- Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan belum dilaksanakan dikarenakan masyarakat belum siap.

Solusi permasalahan pada Urusan Lingkungan Hidup adalah:

- Anggaran tidak diserap dan diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Lingkungan Hidup tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Luas Lahan Kritis target tahun 2012 seluas 17.239 Ha, realisasi 16.960,58 Ha;

- Rasio Luas Kawasan Lindung Target Tahun 2012 sebesar 8%, realisasi 11,75%;
 - Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada Tahun 2011 sebanyak 49 perusahaan sedangkan pada Tahun 2012 sebanyak 55 Perusahaan sehingga terdapat kenaikan kesadaran perusahaan untuk mengurus Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sebesar 12,2 %;
 - Jumlah usaha/kegiatan yang melaporkan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara pada Tahun 2011 sebanyak 78 Perusahaan sedangkan tahun 2012 sebanyak 104 Perusahaan sehingga terdapat kenaikan sebesar 33,3 %;
 - Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan ditargetkan Tahun 2011 seluas 712,36 Ha Tahun 2012 seluas 917,066 Ha;
 - Penanganan sampah, Target Tahun 2012 sebanyak 88% terealisasi 93 %;
 - Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk ditargetkan Tahun 2012 sebanyak 0,028 m³/penduduk terealisasi 0,044 m³/penduduk;
- Prestasi yang diperoleh pada Urusan Lingkungan Hidup adalah:
- Adipura Bangun Praja;
 - Adiwiyata.

9. Urusan Pertanahan

Pada tahun 2012 Urusan Pertanahan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 4 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp34.325.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.706.770.250,00, tidak terserap Rp23.618.229.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 9.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program yang terdiri atas 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp34.320.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.701.770.250,00, dan tidak terserap sebesar Rp23.618.229.750,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 23.812.500,00 |
| 2) Kegiatan yang belum dilaksanakan | Rp | 23.594.417.250,00 |

9.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program yang terdiri atas 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.000.000,00, terealisasi sebesar Rp5.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanahan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Gerak Sembayat (BGS) dan pembangunan lapangan terbang perintis di Pulau Bawean;
- terselesaikannya konflik-konflik pertanahan;

Adapun permasalahan pada Urusan Pertanahan adalah:

- Pembebasan lahan untuk Bendung Gerak Sembayat (BGS) belum tuntas karena masih ada masyarakat yang belum bersedia melepaskan tanahnya;
- Pembebasan lahan untuk pembangunan Lapter belum tuntas karena syarat administrasi belum dipenuhi.
- Belum diterbitkannya hasil pengukuran lahan untuk pembangunan stadion di gunung lengis.
- Sertifikasi bidang tanah milik Pemkab belum dapat direalisasikan karena adanya perbedaan persepsi dalam prosedur pensertifikatan tanah.

Solusi permasalahan pada Urusan Pertanahan adalah:

- Perlu adanya pendekatan dan Sosialisasi yang lebih giat secara intens kepada masyarakat ;
- Koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk menerbitkan hasil ukur peta bidang;
- Perlu adanya kesamaan pemahaman antara Pemkab dengan instansi yang berwenang dan instansi vertikal yang lain agar tanah aset Pemkab dapat disertifikatkan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pertanahan tahun 2012 adalah penyelesaian kasus pertanahan sebanyak 15 kasus dari 22 kasus yang ada atau terselesaikan 68%.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada tahun 2012 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, serta Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 19 program terdiri 39 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp5.308.931.500,00, terealisasi sebesar Rp4.777.607.134,00, tidak terserap Rp531.324.366,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 10.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 2 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.049.932.000,00, terealisasi sebesar Rp4.518.607.634,00, tidak terserap Rp531.334.366,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 10.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp28.752.000,00, terealisasi sebesar Rp28.752.000,00;
- 19.5. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, terealisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 19.6. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 ;
- 19.7. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.521.000,00, terealisasi sebesar Rp13.521.000,00 ;
- 19.8. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.190.500,00, terealisasi sebesar Rp25.190.500,00;

- 19.9. Kecamatan Ballongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 19.10. Kecamatan Duduk Sampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 19.11. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 19.12. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 19.13. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.876.000,00, terealisasi sebesar Rp12.876.000,00;
- 19.14. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.660.000,00, terealisasi sebesar Rp13.660.000,00 ;
- 19.15. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 19.16. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 19.17. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terealisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 19.18. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;

19.19. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;

19.20. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;

19.21. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya tenaga pengelola SIAK yang handal dan profesional;
- Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan;
- Terlaksananya cetak e-KTP;
- Tercatatnya dan tersusunnya arsip akta capil;
- Tersedianya Kutipan Akta Perkawinan dan Akte Kelahiran;
- Tersedianya data hasil perekaman e-KTP yang akurat;
- Tersusunnya prosedur teknis migrasi data pencatatan sipil dari simduk ke siak beserta software pendukungnya;
- Tersedianya informasi pelayanan publik tentang kependudukan dan pencatatan sipil.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan KTP ditargetkan sebesar 86,90% realisasi 86,90%;
- Akta kelahiran yang diterbitkan untuk bayi yang lahir pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 31300 lembar terealisasi sebanyak 38619 lembar;
- Pengurusan KTP ditargetkan 1 hari realisasi 1 hari.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2012 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 8 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp357.299.950,00 terealisasi sebesar Rp352.134.950,00 tidak terserap Rp5.165.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 11.1. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp289.999.950,00 terealisasi sebesar Rp285.384.950,00, tidak terserap Rp4.615.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 11.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp32.300.000,00, terealisasi sebesar Rp31.750.000,00, tidak terserap Rp550.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 11.3. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 11.4. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.000.000,00, terealisasi sebesar Rp5.000.000,00;
- 11.5. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terealisasi sebesar Rp20.000.000,00;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terpenuhinya Kebutuhan Kelembagaan GFP dan KAG;
- Terselenggaranya workshop PUG dan sosialisasi Penguatan jejaring Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Terlaksananya Pembinaan Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan;
- Terselenggaranya Evaluasi Gerakan Sayang Ibu dan Pembinaan P2WKSS;
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaraan gender.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan ditargetkan sebesar 100% terealisasi 100%;
- Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan ditargetkan sebesar 88 % realisasi 100%;
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan Rumah Sakit ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan ditargetkan sebesar 86% realisasi 100%;
- Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi ditargetkan sebesar 20% realisasi 100%.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada tahun 2012 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 10 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.055.544.547,00, terealisasi sebesar Rp1.965.120.500,00, tidak terserap Rp90.424.047,00, disebabkan antara lain adanya efisiensi, sisa lelang dan kegiatan tidak dilaksanakan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- Terlaksananya Pelayanan KIE;
- Tercapainya Peserta Keluarga Berencana Sesuai Dengan PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat);

- Terpenuhiya Permintaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Keluarga Berencana;
- Terpenuhiya Sarana KIE PIK-KRR;
- Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana;
- Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Remaja Peduli KB;
- Terlaksananya Pendataan Keluarga Sejahtera;
- Terbantunya Kelompok PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja);
- Terpenuhiya Tenaga Pendamping;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Prevalensi peserta KB Aktif ditargetkan sebesar 78,25% realisasi 78%;
- Cakupan Pasangan Usaha Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun ditargetkan sebesar 1,15% realisasi 1,2%;
- Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*unmeet need*) ditargetkan sebesar 21,60% realisasi 12,07%;
- Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ditargetkan sebesar 20,65% realisasi 81,5%;
- Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Juara III Lomba KB Perusahaan Tingkat Nasional.

13. Urusan Sosial

Pada tahun 2012 Urusan Sosial di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 12 program terdiri 20 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.405.186.885,00, terealisasi sebesar Rp2.156.610.290,00, tidak terserap Rp248.576.595,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 13.1. Dinas Sosial melaksanakan 4 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp854.817.000,00, terealisasi sebesar Rp811.870.000,00, tidak terserap Rp42.947.000,00, disebabkan antara lain:
- | | | |
|----------------|----|---------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 41.747.000,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp | 1.200.000,00 |
- 13.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.483.188.885,00, terealisasi sebesar Rp1.277.783.290,00, tidak terserap Rp205.405.595,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 13.3. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.521.000,00, terealisasi sebesar Rp13.297.000,00, tidak terserap Rp224.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 13.4. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.297.000,00, terealisasi sebesar Rp13.297.000,00, tidak terserap sebesar Rp224.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 13.5. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 13.6. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.660.000,00, terealisasi sebesar Rp13.660.000,00.
- 13.7. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 13.8. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Taman Makam Pahlawan;
- Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga pendamping pemberdayaan Keluarga Harapan;
- Terlaksananya pemberian bantuan bagi keluarga rentan sosial;
- Terlaksananya pelatihan bagi lansia;
- Terlaksananya pelatihan bagi anak cacat;
- Terpenuhinya layanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dan PSKS;
- Terlaksananya pemakaman Mr.X sebanyak 20 Mr.X
- Terlaksananya pengiriman tagana ke daerah bencana;
- Terciptanya lembaga sosial yang mandiri;
- Terlaksananya peran serta aparat pemerintah dan lembaga sosial dalam menangani PMKS anak;
- Terlaksananya pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial;
- Terlaksananya pembinaan dan konsolidasi karang taruna;
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penyampaian Santunan Kematian;
- Terlaksananya pembinaan dan operasional penyaluran bantuan Raskin;
- Terselenggaranya Peringatan Hari Lansia;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Sosial tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi ditargetkan sebesar 18 unit realisasi 17 unit;
- Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ditargetkan 350 PMKS terealisasi 421 PMKS;
- Jumlah PMKS diestimasi sebanyak 73.871 jiwa realisasi 41.526 jiwa;
- Bantuan santunan kematian ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Penyaluran Raskin ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%.
- Jumlah hari besar agama yang dirayakan ditargetkan sebanyak 5 kegiatan realisasi 5 kegiatan;
- Bantuan sarana ibadah ditargetkan sebesar 90% realisasi 90%;

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Sosial adalah:

- PKH Awards Tingkat Nasional, di bidang Apresiasi Pemerintah Daerah terhadap Program Keluarga Harapan;
- Karang Taruna Berprestasi Harapan I Tingkat Propinsi Jawa Timur.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2012 Urusan Ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 10 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.260.070.000,00, terealisasi sebesar Rp1.690.183.380,00, tidak terserap Rp569.886.620,00, disebabkan adanya efisiensi dan kegiatan tidak dilaksanakan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- Tersedianya informasi ketenagakerjaan data AK1 yang akurat;
- Meningkatnya jumlah penempatan TKI dan mengurangi pengiriman TKI ilegal;
- Tersedianya informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
- Terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial;
- Terwujudnya standar upah yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- Fasilitasi kegiatan Dewan Ketenagakerjaan;
- Berkurangnya pelanggaran-pelanggaran norma ketenagakerjaan.

Adapun permasalahan pada Urusan Ketenagakerjaan adalah:

- Jumlah pegawai fungsional Mediator Hubungan Industrial dan pengawas ketenagakerjaan yang terbatas;
- Kenaikan upah diatas UMK masih sering menjadi penyebab perselisihan hubungan industrial.

Solusi permasalahan pada Urusan Ketenagakerjaan adalah:

- Diusulkan menambah pegawai Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan pengawas ketenagakerjaan;
- Dilaksanakan sosialisasi struktur dan skala upah.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Ketenagakerjaan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Tingkat partisipasi angkatan kerja ditargetkan sebesar 66,83% realisasi 67,54 %;
- Pencari kerja yang ditempatkan ditargetkan sebesar 31,03% realisasi 34,43%;
- Angka pengangguran penduduk usia 15-24 tahun ditargetkan sebesar 17,53% realisasi 5,5%;
- Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditargetkan sebesar 62,50% realisasi 70,97%;
- Kepatuhan Terhadap Norma kerja ditargetkan sebesar 65,25% realisasi 92,8%;
- Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja ditargetkan sebesar 90,04% realisasi 99,58%;
- Angka Kecelakaan Kerja ditargetkan sebesar 4,57% realisasi 2,17%;
- Angka Penuntasan/ penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditargetkan sebesar 93,98% realisasi 100%;
- Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama ditargetkan sebesar 7,42% realisasi 9%;
- Kepatuhan atas ketentuan mengenai Kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit ditargetkan sebesar 2,65% realisasi 4,24%.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Ketenagakerjaan adalah:

- Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terbaik Tingkat Nasional;
- Zerro Accident Award Tingkat Nasional;
- Penerapan SMK3 Tingkat Nasional;
- Pembinaan Hubungan Industrial Tingkat Provinsi.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pada tahun 2012 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 19 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.056.471.000,00 terealisasi sebesar Rp1.562.577.644,00 tidak terserap Rp493.893.356,00 rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 15.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 4 program terdiri 13 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.504.850.000,00 terealisasi sebesar Rp1.037.343.150,00, tidak terserap Rp467.506.850,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 15.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp541.621.000,00 terealisasi sebesar Rp515.234.494,00, tidak terserap Rp26.386.506,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 15.3. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM);
- Tersebar nya informasi produk unggulan koperasi dan usaha kecil menengah;
- Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi petani tembakau;
- Terlaksananya pameran sebagai media promosi produk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya fasilitasi kegiatan DEKRANASDA;
- Terselenggaranya sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian;
- Terlaksananya Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
- Terselenggaranya jaringan kerjasama usaha koperasi;

- Terselenggaranya penyuluhan dan pembentukan koperasi;
- Terbentuknya koperasi kelompok tani tembakau;
- Terpenuhinya sarana prasarana pasar kabupaten;
- Terwujudnya peningkatan mutu industri kecil;
- Terbentuknya standar mutu barang ber SNI;
- Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi produk hasil tembakau;
- Tersusunnya Ranperda tentang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- Terwujudnya peningkatan usaha UMKM;
- Terciptanya percepatan transfer aplikasi teknologi secara simultan dalam rangka peningkatan efisiensi kualitas daya saing pelaku industri kreatif;
- terselesaikannya tunggakan pinjaman dana bergulir.

Adapun permasalahan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

- Adanya alamat penerima pinjaman dana bergulir tidak jelas;
- Kurang adanya evaluasi pasca pameran;
- Kurang maksimalnya laporan hasil kerja BUMD sehingga terjadi kesulitan dalam evaluasi kinerja BUMD.

Solusi permasalahan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

- Koordinasi dengan kepala desa mengenai kejelasan alamat yang menerima pinjaman dana bergulir;
- Meningkatkan koordinasi dengan UMKM tentang laporan pasca pameran;
- Memaksimalkan evaluasi kinerja BUMD secara periodik dan melakukan kerjasama.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Koperasi aktif yang ditargetkan 82 % ditahun 2012 sedangkan realisasinya sebesar 83 %;

- Usaha Mikro dan Kecil yang ditargetkan 60 % ditahun 2012 sedangkan realisasinya 95 %;
- Koperasi yang mendapatkan penilaian baik ditargetkan 75 % ditahun 2012 sedangkan realisasinya 75 %.

16. Urusan Penanaman Modal

Pada tahun 2012 Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 24 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.960.500.000,00 terealisasi sebesar Rp2.830.395.100,00 tidak terserap Rp130.104.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

16.1. Badan Penanaman Modal dan Perijinan melaksanakan 2 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.537.000.000,00, terealisasi sebesar Rp2.474.660.600,00, tidak terserap Rp62.339.400,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 35.016.400,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 27.323.000,00 |

16.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp423.500.000,00, terealisasi sebesar Rp355.734.500,00, tidak terserap Rp67.765.500,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya koordinasi pengendalian pelaksanaan PMA/PMDN di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya pertemuan Forum Komunikasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi;
- Tersusunnya laporan hasil pengawasan dan evaluasi penanaman modal;

- Terwujudnya pengembangan pelayanan investasi sesuai dengan *International Organization for Standardization (ISO 9001:2008)*;
- Tersedianya data tata ruang potensi investasi;
- Terlaksananya peningkatan relisasi investasi;
- Terwujudnya peningkatan penyerapan relisasi investasi PMA PMDN dan sektor migas oleh perusahaan.
- Terlaksananya izin penyelenggaraan reklame, izin gangguan, izin usaha industri, izin usaha tetap, izin prinsip dan lokasi, izin galian C, izin air tanah dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan Masterplan Gresik Selatan;
- Terselenggaranya pasar dan lelang bandeng tradisional;
- Terlaksananya fasilitasi kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha;
- Tercapainya peningkatan kinerja BUMD.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penanam Modal tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Kenaikan Nilai Realisasi PMDN ditargetkan sebesar 772,30 milyar rupiah realisasi 660,88 milyar rupiah;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Lokasi ditargetkan sebesar 100% realisasi 90 %;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) ditargetkan sebesar 100% realisasi 100 %;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Gangguan (HO) ditargetkan sebesar 100% realisasi 77 %;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ditargetkan sebesar 100% realisasi 75 %;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Prinsip ditargetkan sebesar 100% realisasi 90 %;
- Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Usaha ditargetkan sebesar 100% realisasi 96 %.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Penanaman Modal antara lain:

- Adanya beberapa permohonan izin yang masih dalam proses;
- Adanya pemohon yang belum melunasi SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah);
- Adanya beberapa berkas izin yang lampiran dan dokumennya belum dapat dinyatakan lengkap dan benar.

17. Urusan Kebudayaan

Pada tahun 2012 Urusan Kebudayaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 9 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.494.587.950,00 terealisasi sebesar Rp2.225.398.900,00, tidak terserap Rp269.189.050,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 16.1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 4 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.484.637.950,00, terealisasi sebesar Rp2.215.448.900,00, tidak terserap Rp269.189.050,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 16.2. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.950.000,00, terealisasi sebesar Rp9.950.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pelestarian adat budaya daerah;
- Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- Terlaksananya pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno;
- Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air;

- Terselenggaranya pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
- Terlaksananya fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah;
- Terlaksananya fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah;
- Terlaksananya pengiriman delegasi budaya daerah;
- Tersusunnya buku kumpulan cerita rakyat, sejarah desa-desa di kecamatan benjeng.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kebudayaan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya ditargetkan sebanyak 6 kegiatan realisasi 12 kegiatan;
- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ditargetkan sebesar 6 unit realisasi 4 unit;
- Peninggalan / Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan ditargetkan sebesar 36,36% realisasi 100 %.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kebudayaan adalah:

- Juara II Penata Stand Terbaik pada Pameran Koleksi Unggulan Museum Daerah se Jawa Timur;
- Juara II Lomba Visualisasi Fragmen Kesejarahan (Teater) Tingkat Jawa Timur;
- Penyaji Terbaik dan Penata Musik Terbaik pada Festival Lagu Daerah se Jawa Timur;
- Penata Tari Terbaik pada Festival Tari Daerah se Jawa Timur.

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pada tahun 2012 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 17 program terdiri 24 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.395.868.100,00, terealisasi sebesar Rp2.019.444.950,00, tidak terserap Rp376.423.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 18.1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 5 program terdiri 14 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.794.042.900,00, terealisasi sebesar Rp1.434.600.500,00, tidak terserap Rp359.442.400,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 18.2. Dinas Sosial melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp100.000.000,00, terealisasi sebesar Rp99.668.800,00 tidak terserap Rp331.200,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 18.3. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp376.825.200,00, terealisasi sebesar Rp360.175.650,00 tidak terserap Rp16.649.550,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 18.4. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 18.5. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, terealisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 18.6. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terealisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 18.7. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 18.8. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 18.9. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;

- 18.10. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 18.11. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terealisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 18.12. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya sosialisasi kebijakan kepemudaan;
- Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba;
- Terlaksananya pembinaan dan penyeleksian pemuda pelopor;
- Terlaksananya pameran hasil ekonomi kreatif pemuda;
- Terlaksananya pembinaan pemuda berprestasi;
- Terlaksananya pelatihan pengembangan kelompok usaha pemuda produktif;
- Terlaksananya pembinaan tenaga keolahragaan;
- Terlaksananya senam kesegaran jasmani karyawan/karyawati Pemerintah Daerah;
- Terlaksananya pelatihan atlet olahraga berprestasi;
- Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan;
- Terlaksananya pembinaan keimanan dan ketaqwaan pemuda.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Persentase organisasi kepemudaan yang aktif ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) ditargetkan sebanyak 2 unit realisasi 2 Unit;
- Lapangan Olah Raga ditargetkan sebesar 26 unit realisasi 218 unit;

- Persentase cabang olah raga yang aktif ditargetkan sebesar 86,21% realisasi 100%.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah:

- Juara I Pemuda Pelopor Bidang Kewirausahaan Tingkat Nasional;
- Juara Pemuda Pelopor Bidang Kelautan dan Kebaharian Tingkat Nasional;
- Juara I Tolak Peluru Putra, Juara II Bola volley putra, kaligrafi murni putri, cipta puisi kandungan Al-Qur'an putra, dan pidato bahasa inggris putra, Juara III cipta puisi kandungan Al-Qur'an putrid dan pidato bahasa inggris puti pada Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA).

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun 2012 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 47 program terdiri 76 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp10.154.821.200,00 terealisasi sebesar Rp8.911.758.430,00 tidak terserap Rp1.243.061.770,00 dengan rincian sebagai berikut:

19.1. Kantor Kesbanglinmas melaksanakan 6 program terdiri 14 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.361.536.000,00 terealisasi sebesar Rp1.352.637.175,00, tidak terserap Rp8.898.825,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp 8.136.400,-
- 2) Sisa Lelang Rp 762.425,-

19.2. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar

- Rp1.939.698.000,00 terealisasi sebesar Rp1.929.110.000,00, tidak terserap Rp10.588.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 19.3. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.699.150.200,00, terealisasi sebesar Rp3.575.376.400,00, tidak terserap Rp1.123.773.800,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 19.4. Kecamatan Gresik melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.990.000,00, terealisasi sebesar Rp65.990.000,00;
- 19.5. Kecamatan Kebomas melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terealisasi sebesar Rp65.000.000,00 ;
- 19.6. Kecamatan Manyar melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp60.000.000,00, terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 19.7. Kecamatan Cerme melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp49.960.000,00, terealisasi sebesar Rp49.960.000,00 ;
- 19.8. Kecamatan Benjeng melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp77.110.500,00, terealisasi sebesar Rp77.110.500,00;
- 19.9. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp50.000.000,00;
- 19.10. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp40.516.000,00, terealisasi sebesar Rp40.515.000,00, tidak terserap Rp1.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 19.11. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 ;

- 19.12. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 19.13. Kecamatan Kedamean melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 19.14. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp53.660.000,00, terealisasi sebesar Rp53.660.000,00 ;
- 19.15. Kecamatan Sidayu melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp49.975.000,00, tidak terserap sebesar Rp25.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 19.16. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 19.17. Kecamatan Panceng melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp49.999.500,00, tidak terserap Rp500,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 19.18. Kecamatan Bungah melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 19.19. Kecamatan Dukun melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 19.20. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp60.000.000,00, terealisasi sebesar Rp59.970.000,00, tidak terserap sebesar Rp30.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

- 19.21. Kecamatan Tambak melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp60.000.000,00, terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 19.22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 1 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.172.200.000, terealisasi sebesar Rp1.072.455.355,00, tidak terserap Rp99.744.645,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya Pelatihan Dasar (Latsar) dan Kursus Kader Perlindungan Masyarakat (Suskalinmas);
- Terlaksananya kegiatan pengamanan hari-hari besar dan unjuk rasa;
- Terlaksananya sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia (RANHAM);
- Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- Terlaksananya upacara peringatan hari-hari besar Nasional.
- Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan bagi siswa SMA.
- Terlaksananya pelatihan peningkatan ketrampilan anggota Paskibraka dalam upacara Bendera 17 Agustus 2012;
- Terlaksananya Pembinaan anggota Korsik Pemerintah Daerah;
- Tersedianya Data Ipoleksosbud dan masalah strategis daerah;
- Terlaksananya Tertib Administrasi dana Bantuan Parpol;
- Terlaksananya forum Komunitas Intelijen Daerah;
- Terlaksananya operasi penertiban, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar PERDA;
- Terlaksananya Pembinaan Kesamaptaan Jasmani bagi anggota Pol PP;
- Terlaksananya operasi penertiban pelanggaran PERDA Miras dan PSK;
- Terselenggaranya MTQ Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya Peringatan Hari besar Islam;
- Terlaksananya pembinaan bagi pengelola tempat ibadah dan zakat;

- Meningkatnya kualitas tempat ibadah;
- Terlaksananya fasilitasi pemberangkatan Jamaah Haji;
- Terlaksananya santunan fakir miskin dan anak yatim;
- Terciptanya situasi keamanan lingkungan yang kondusif di wilayah Kecamatan se kab.Gresik.
- Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama.
- Terlaksananya pembinaan Simkamswakarsa;
- Terlaksananya pembinaan terhadap paguyuban PKL;
- Terlaksananya sosialisasi tentang bahaya narkoba dan miras;
- Terlaksananya pencegahan secara dini praktek prostitusi;
- Tersedianya Informasi Wilayah Potensi Rawan Bencana
- Terpenuhi Alat Evakuasi Bencana;
- Terlaksananya sosialisasi dan pembentukan Desa Tangguh Bencana;
- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana tandon air bersih;
- Terlaksananya pelatihan tanggap darurat bencana.

Adapun Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Jumlah Parpol yang mendapat sosialisasi ditargetkan sebanyak 11 parpol realisasi 11 parpol;
- Jumlah LSM/ Ormas/ OKP yang dibina ditargetkan sebanyak 164 LSM realisasi sebanyak 183 LSM/Ormas/OKP;
- Konflik yang dapat diselesaikan ditargetkan sebesar 100% realisasi 96 %;
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kabupaten Gresik ditargetkan sebesar 55% realisasi 63%,
- Demo/protes terhadap PERDA/Perbub ditargetkan 96,00 % terealisasi 96 %
- Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum ditargetkan ada realisasi ada.
- Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras ditargetkan ada realisasi ada

- Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk ditargetkan 0,04 per 10.000 penduduk terealisasi 1,19.
- Sistem pengendalian dan penanggulangan bencana alam ditargetkan ada realisasi ada.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

- Juara harapan Lomba Peratuaran Baris Berbaris (PBB) dalam rangka Jambore Satpol PP Ke-X Tahun 2012 se Jawa Timur.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada tahun 2012 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 28 program terdiri 128 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp52.254.557.450,00, terealisasi sebesar Rp42.667.595.909,00, tidak terserap Rp9.586.961.541,00 dengan rincian sebagai berikut:

20.1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 1 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp900.000.000,00, terealisasi sebesar Rp804.106.865,00, tidak terserap Rp95.893.135,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp 17.579.600,00
2) Sisa Lelang	Rp 78.313.535,00

- 20.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 11 program terdiri 47 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.382.114.900,00, terealisasi sebesar Rp8.736.189.228,00, tidak terserap Rp1.645.925.672,00, disebabkan antara lain:
- 1) Efisiensi Rp 1.633.509.072,00
 - 2) Sisa Lelang Rp 12.416.600,00
- 20.3. Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program terdiri 13 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp21.163.566.000,00, terealisasi sebesar Rp17.251.791.930,00, tidak terserap Rp3.911.774.070,00, disebabkan antara lain:
- 1) Efisiensi Rp 3.893.474.070,00
 - 2) Sisa Lelang Rp 18.300.000,00
- 20.4. Inspektorat Kabupaten melaksanakan 2 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.467.780.000,00, terealisasi sebesar Rp1.411.316.000,00, tidak terserap Rp56.464.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 20.5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 1 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.311.559.500,00, terealisasi sebesar Rp8.153.937.295,00, tidak terserap Rp3.157.622.205,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 20.6. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 3 program terdiri 33 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.966.358.700,00, terealisasi sebesar Rp6.247.076.241,00, tidak terserap Rp 719.282.459,00, disebabkan antara lain:
- 1) Efisiensi Rp 336.980.009,00
 - 2) Sisa Lelang Rp 42.827.500,00
 - 3) Kegiatan tidak dilaksanakan Rp 339.474.950,00
- 20.7. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.521.000,00, terealisasi sebesar Rp13.521.000,00;

- 20.8. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.154.750,00, terealisasi sebesar Rp6.154.750,00;
- 20.9. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 20.10. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.842.600,00, terealisasi sebesar Rp9.842.600,00.
- 20.11. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya penerbitan jurnal penelitian di Kabupaten Gresik;
- Tersusunnya strategi peningkatan PAD dalam rangka penciptaan kemandirian keuangan daerah;
- Terlaksananya kajian perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah;
- Tersediannya dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- Tersusunnya buku rencana kemitraan pembangunan yang berkelanjutan;
- Tersusunnya dokumen kajian lingkungan rencana pembangunan jalan lingkar barat Kabupaten Gresik;
- Tersusunnya buku kajian potensi pasar desa;
- Terselenggaranya rapat koordinasi unsur Muspida;
- Tersusunnya buku standar satuan harga barang;
- Tersediannya buku pedoman kerja dan penekatan tugas;
- Terlaksananya evaluasi alokasi DBH cukai kabupaten;
- Tersediannya pedoman, gambar perencanaan dan dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian kegiatan jalan poros desa;

- Terlaksananya sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa;
- Tersedianya software legal dan software anti virus;
- Terlaksananya fasilitasi penanganan pengaduan Masyarakat;
- Terselenggaranya sosialisasi dan bintek pengelolaan dana kelurahan;
- Terlaksananya Gelar Otomi Award dan tersusunnya Buku Profil Otomi Daerah;
- Terlaksananya evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah;
- Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan;
- Terlaksananya legislasi produk hukum daerah;
- Terselesaikannya kasus pelanggaran Perda;
- Tersedianya data produk hukum daerah dan nasional;
- Terlaksananya sosialisasi Perda;
- Terlaksananya penetapan APBD dan PAPBD tepat waktu;
- Tersusunnya laporan pelaksanaan APBD TA 2011 sesuai ketentuan berlaku;
- Tersedianya perangkat SIPKD dan operasionalisasi SIPKD;
- Terlaksananya Rekonsiliasi dan Pendataan Aset;
- Tersedianya RKA, DPA, dan DPPA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Terwujudnya peningkatan Jumlah Wajib Pajak;
- Terwujudnya peningkatan Penerimaan bagi hasil pajak;
- Terlaksananya pemutakhiran piutang PBB;
- Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi;
- Terlaksananya review atas laporan keuangan daerah;
- Terlaksananya kegiatan Diklat Auditor;
- Terlaksananya diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
- Terselenggaranya diklat, sosialisasi, seminar, workshop dan lokakarya yang diikuti PNS;
- Terselenggaranya pelantikan pejabat struktural;

- Terlaksananya bimbingan teknis pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas;
- Tersusunnya laporan hasil kerja komisi dan hasil rapat-rapat;
- Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat;
- Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah;
- Terlaksananya pelatihan peningkatan pengetahuan/ketrampilan SDM Anggota DPRD.

Adapun permasalahan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah:

- Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sampai dengan akhir tahun 2012 sejumlah 228 orang dengan rincian Eselon II sebanyak 16 orang, eselon III sebanyak 90 orang, dan eselon IV sebanyak 122 orang;
- Adanya Pejabat yang pensiun mengakibatkan beberapa jabatan yang belum terisi.

Solusi permasalahan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah:

- Secara bertahap akan diajukan anggaran untuk kegiatan Diklat Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjangnya pada tahun yang akan datang;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Perda yang ditetapkan ditargetkan sebanyak 10 Perda realisasi 38 Perda;
- Jumlah Perda yang dibatalkan ditargetkan sebanyak 0 Perda realisasi 0 Perda;

- Kasus hukum yang diselesaikan ditargetkan sebanyak 80% realisasi 125%;
- Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti/dilaksanakan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100 %;
- Peraturan Bupati yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% realisasi 100 %;
- Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi ditargetkan 25% terealisasi 100%;
- Prosentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% realisasi 158 %;
- Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditargetkan sebanyak 34 kali realisasi sebanyak 100 Kali;
- Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD) ditargetkan baik realisasi Baik;
- Opini laporan keuangan ditargetkan (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP realisasi Menunggu hasil audit BPK;
- Laporan keuangan yang disusun ditargetkan tepat waktu realisasi tepat waktu;
- APBD ditetapkan tepat waktu realisasi tepat waktu;
- Tersedianya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peningkatan PAD ditargetkan sebesar 5,27% realisasi 52,42 %;
- Keberadaan kemandirian daerah ditargetkan 20,88% realisasi 294,66%;
- Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat ditargetkan 1 buah realisasi 3 buah;
- Aset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan) ditargetkan 88,84% realisasi 90%;

- Voting yang dilakukan dalam sidang paripurna ditargetkan sebesar 0% realisasi 4 %;
- keterlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda ditargetkan 100% realisasinya 100%;
- perda inisiatif DPRD ditargetkan sebesar 10 perda realisasi 10 perda;
- Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya ditargetkan sebesar 91,20 % realisasi 73,6 %;
- Rasio jabatan yang terisi ditargetkan sebesar 100% realisasi 92,8%;
- Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal ditargetkan sebesar 100 % realisasi 100 %;
- Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan ditargetkan sebesar 100 % realisasi 100 %;
- Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang SOTK ditargetkan sebesar 100% realisasi 100 %;
- Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan ditargetkan 40% terealisasi 100%
- Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga ditargetkan sebesar 16 MOU realisasi 16 MOU;
- Keberadaan unit pelayanan pengadaan ditargetkan ada realisasi Belum Ada;
- Keberadaan E-procurement (pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik) ditargetkan ada realisasi Ada yaitu melalui LPSE Kab. Gresik;
- Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah ditargetkan 25 orang realisasi 78 orang.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2012 Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 14 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.472.562.500,00 terealisasi

sebesar Rp1.450.140.825,00 tidak terserap Rp22.421.675,00 dengan rincian sebagai berikut:

21.1. Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 1 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp742.522.500,00 terealisasi sebesar Rp726.287.500,00 tidak terserap Rp16.235.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

21.2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 1 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp730.040.000,00, terealisasi sebesar Rp723.853.325,00 tidak terserap Rp6.186.675,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terselenggaranya lomba pemanfaatan pekarangan tingkat kabupaten;
- Terpenuhinya kebutuhan gabah untuk mengantisipasi kerawanan pangan;
- Teridentifikasinya lokasi desa rawan pangan;
- Teridentifikasinya lokasi desa sentra beras;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang bermutu dan aman;
- Terselenggaranya festival pangan lokal;
- Terlaksananya pembinaan manajemen pemanfaatan modal pembelian gabah;
- Terwujudnya kebijakan ketahanan pangan;
- Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi;
- Terlaksananya bimbingan teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- Terlaksananya pelatihan peningkatan produksi hortikultura;
- Terlaksananya sosialisasi peningkatan mutu produk perkebunan (kelapa dan jambu mente);
- Terwujudnya peningkatan SDM peserta yang mengikuti sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu;

- Terlaksananya pelatihan penanganan panen dan pasca panen tanaman tembakau.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Ketahanan Pangan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya regulasi ketahanan pangan;
- Ketersediaan pangan yang ditargetkan 197,23 Kg/kapita/tahun terealisasi sebesar 201,34 Kg/kapita/tahun;
- Rata-rata konsumsi bahan pangan utama ditargetkan 94,35 Kg/kapita/tahun terealisasi sebesar 95,40 Kg/kapita/tahun.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2012 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 57 program terdiri 81 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.175.317.500,00, terealisasi sebesar Rp3.075.968.997,00, tidak terserap Rp99.348.503,00, dengan rincian sebagai berikut:

22.1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 5 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.207.525.000,00, terealisasi sebesar Rp2.128.925.447,00, tidak terserap Rp78.599.553,00 disebabkan antara lain :

- | | | |
|-----------------|----|---------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 74.910.700,00 |
| 2) Sisa Kontrak | Rp | 3.688.853,00 |

22.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp437.388.000,00, terealisasi sebesar Rp416.667.650,00, tidak terserap Rp20.720.350,00, disebabkan adanya efisiensi.

22.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, terealisasi sebesar Rp15.000.000,00;

- 22.4. Kecamatan Kebomas melaksanakan 4 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp60.000.000,00, terealisasi sebesar Rp59.999.400,00, tidak terserap sebesar Rp600,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 22.5. Kecamatan Manyar melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp50.000.000,00;
- 22.6. Kecamatan Cerme melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp23.521.000,00, terealisasi sebesar Rp23.493.000,00, tidak terserap sebesar Rp28.000,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 22.7. Kecamatan Benjeng melaksanakan 4 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.269.000,00, terealisasi sebesar Rp50.269.000,00;
- 22.8. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terealisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 22.9. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terealisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 22.10. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp40.000.000,00, terealisasi sebesar Rp40.000.000,00;
- 22.11. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.000.000,00
- 22.12. Kecamatan Kedamean melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, terealisasi sebesar Rp30.000.000,00

- 22.13. Kecamatan Menganti melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp32.320.000,00, terealisasi sebesar Rp32.320.000,00
- 22.13. Kecamatan Sidayu melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, terealisasi sebesar Rp30.000.000,00;
- 22.14. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, terealisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 22.15. Kecamatan Panceng melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp24.294.500,00, terealisasi sebesar Rp24.294.500,00;
- 22.16. Kecamatan Bungah melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, terealisasi sebesar Rp30.000.000,00;
- 22.17. Kecamatan Dukun melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terealisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 22.18. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, terealisasi sebesar Rp30.000.000,00;
- 22.18. Kecamatan Tambak melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, terealisasi sebesar Rp30.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa;
- Terlaksananya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif;
- Terpilihnya Desa/Kelurahan Berhasil;
- Tersusunnya profil desa;
- Terlaksananya PNPM Mandiri Perdesaan;
- Terlaksananya pelatihan pengurus UPK;

- Terlaksananya program PMT-AS;
- Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelatihan TTG bagi kelompok masyarakat;
- Terbentuknya SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- Terlaksananya Pilot Project bimbingan teknis aplikasi data dasar keluarga pada sistem informasi pendayagunaan profil desa dan kelurahan SI-P2DK;
- Terlaksananya Program Kegiatan PKK, DWP dan Organisasi Wanita;
- Pembinaan Kader dan warga binaan P2W-KSS;
- Terlaksananya Pembinaan Posyandu di Desa;
- Terlaksananya ujian penyaringan perangkat Desa;
- Terlaksananya Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Tersusunnya ranperda bidang Pemerintahan Desa;
- Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
- Terlaksananya fasilitasi musyawarah pembangunan desa;
- Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- PKK aktif ditargetkan sebesar 83,23% realisasi 100%;
- Posyandu Aktif ditargetkan sebesar 98,60% realisasi 100%;
- Persentase keluarga miskin ditargetkan sebanyak 20,48% terealisasi %;

23. Urusan Statistik

Pada tahun 2012 Urusan Statistik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 2 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar 157.416.000, terealisasi sebesar 143.438.500, tidak terserap 13.977.500, dengan rincian sebagai berikut:

23.1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar 150.000.000, terealisasi sebesar 136.022.500, tidak terserap 13.977.500, disebabkan adanya efisiensi.

23.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar 7.416.000, terealisasi sebesar 7.416.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

1. Terwujudnya hasil perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ;
 2. Tersusunnya data di Kecamatan Gresik yang valid dan mutakhir;
- Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Statistik tahun 2012 adalah sebagai berikut:
- Keberadaan dokumen "Gresik Dalam Angka" ditargetkan ada realisasi ada;
 - Keberadaan dokumen "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)" ditargetkan ada realisasi ada.

24. Urusan Kearsipan

Pada tahun 2012 Urusan Kearsipan di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp137.951.000,00 terealisasi sebesar Rp135.531.500,00 tidak terserap sebesar Rp2.419.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

24.1. Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar 134.735.000, terealisasi sebesar 132.315.000, tidak terserap 2.419.500,00, disebabkan adanya efisiensi;

24.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar 3.216.000,00 terealisasi sebesar 3.216.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pemeliharaan arsip daerah;
- Terjaganya kelestarian dokumen/arsip daerah;
- Terlaksananya pembinaan pengelolaan arsip daerah bagi petugas kearsipan;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kearsipan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku ditargetkan sebesar 40,67% realisasinya 40,67%.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2012 Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 18 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp7.289.939.500,00 terealisasi sebesar Rp6.335.821.293,00 tidak terserap Rp954.118.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

25.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program terdiri 16 kegiatan dengan alokasi dana sebesar 6.838.012.500,00 terealisasi sebesar Rp5.895.280.528,00 tidak terserap Rp942.731.972,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi Rp 134.650.250,00

2) Sisa Lelang Rp 722.629.300,00

25.2. Sekretariat DPRD melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp451.927.000, terealisasi sebesar Rp440.540.765,00 tidak terserap Rp11.386.235,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Bertambahnya alat-alat studio dan komunikasi sebanyak 28 unit/set;
- Tersedianya perangkat computer yang terinstal perangkat legal (windows 8 profesional di seluruh SKPD) sebanyak 79 unit;
- Terselenggaranya Orientasi Strategi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik untuk e-Government di 56 SKPD;
- Terproteksinya data-data elektronik dari virus/spyware yang terkoneksi WAN dan LAN di 52 SKPD;
- Tercapainya updating data potensi daerah sebanyak 56 SKPD;
- Tercapainya peningkatan kapasitas backbone Jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Terpeliharanya Alat dan pengembangan persandian sebanyak 42 unit;
- Tercapainya monitoring dan evaluasi SIM yang ada pada SKPD SEBANYAK 30 SIM;
- Terwujudnya kelancaran pengembangan administrasi desa/kelurahan;
- Terbangunnya telecenter di Kecamatan Balongpanggang;
- Pengembangan Jaringan backbone WAN;
- Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup Penataan dan Pembangunan Bersama;
- Tercapainya peningkatan kemampuan operator sandi terhadap kode-kode pembicaraan melalui radio VHF sebanyak 25 orang (SKPD);
- Terfasilitasinya operasional kegiatan komite TIK Kabupaten Gresik sebanyak 30 orang;
- Tercapainya peningkatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- Tercapainya pengembangan SDM bagi usaha kecil dan pendidikan di pedesaan/perkotaan sebanyak 25 unit usaha kecil dan 25 SD;
- Tersedianya media untuk mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah;
- Tersedianya leaflet, booklet dokumentasi foto dan video/audio visual;
- Tersedianya media untuk mempublikasikan kegiatan DPRD;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2012 sebagai berikut:

- Keberadaan website Pemerintah Daerah ditargetkan ada realisasinya ada;
- Pengunjung website setiap tahun ditargetkan 665.113 netter realisasi 747.808 netter;
- Sistem informasi yang tersedia ditargetkan 27 buah realisasi 31 buah;
- Jumlah pemberitaan di media ditargetkan 370 kali terealisasi 693 kali;
- Persuratan secara elektronik ditargetkan ada terealisasi ada.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Komunikasi dan Informatika adalah:

- Information, Communication, Technology (ICT) Pura Kategori Utama Tingkat Nasional dari Menteri Koinfo RI Tahun 2012.

26. Urusan Perpustakaan

Pada tahun 2012 Urusan Perpustakaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 4 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp687.664.500,00 terealisasi sebesar Rp676.032.920,00 tidak terserap Rp11.631.580,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terwujudnya masyarakat pembelajar;
- Terlaksananya pembinaan pustakawan dalam mengelola perpustakaan;
- Terlaksananya pengelola perpustakaan umum kecamatan;

- Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perpustakaan tahun 2012 sebagai berikut:

- Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan ditargetkan 104.142 buku realisasi 85.712 buku;
- Pengunjung perpustakaan ditargetkan 529.458 orang pengunjung realisasi 196.306 orang pengunjung;
- Jumlah anggota Perpustakaan ditargetkan 26.830 anggota realisasi 22.592 anggota.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Perpustakaan antara lain:

1. Koleksi buku belum mencapai target disebabkan jumlah buku yang ditargetkan harus sesuai dengan renstra sedangkan jumlah anggaran lebih kecil dari rencana yang telah ditetapkan.
2. Jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan dibawah target dikarenakan minat membaca masyarakat masih rendah dan koleksi buku edisi baru sedikit.

C. Urusan Pilihan

Dalam rangka penyelenggaraan 8 urusan pilihan dialokasikan anggaran sebesar Rp18.281.940.055,00, terealisasi sebesar Rp15.102.063.263,00, tidak terserap sebesar Rp3.179.876.792,00. Adapun penyelenggaraan masing-masing urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pertanian

Pada tahun 2012 Urusan Pertanian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 13 program terdiri 29 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp6.363.229.000,00

teralisasi sebesar Rp5.868.073.765,00 tidak terserap Rp495.155.235,00 rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 5 program terdiri 14 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.870.189.000,00 terealisasi sebesar Rp4.575.894.265,00 tidak terserap Rp294.294.735,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp 188.732.535,00
 - 2) Kegiatan tidak dilaksanakan Rp 105.562.200,00
- 1.2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melaksanakan 3 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp191.620.000,00 terealisasi sebesar Rp190.753.500,00 tidak terserap Rp866.500,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp 422.500,00
 - 2) Sisa Lelang Rp 444.000,00
- 1.3. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 3 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp522.700.000,00 tidak terserap Rp127.300.000,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp 25.175.000,00
 - 2) Kegiatan tidak dilaksanakan Rp 102.125.000,00
- 1.4. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp651.420.000,00 terealisasi sebesar Rp578.726.000,00 tidak terserap Rp72.694.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pelatihan agribisnis;
- Meningkatnya kualitas manajemen koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);

- Tersaluranya bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) bagi petani korban bencana banjir/kekeringan;
- Terlaksananya promosi produk unggulan daerah;
- Tersedianya alat mesin pertanian;
- Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi bercocok tanam;
- Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kesuburan tanah;
- Tersedianya alat dan bahan obat pengendalian hama dan penyakit;
- Tersedianya dokumen data pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) / Jaringan Irigasi Desa (JIDES);
- Terlaksananya pembangunan sumur bor;
- Terlaksananya pembangunan rumah kaca;
- Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan tembakau;
- Terjalinnnya Kerjasama antara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan pelaku usaha;
- Tersusunya Program Kerja Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
- Terbentuknya Posko Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) disetiap Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K);
- Terlaksananya Diklat peningkatan kapasitas penyuluh Swadaya;
- Terlaksananya pelatihan Vaksinasi Hewan Ternak bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) petani peternak.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pertanian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Produksi Pertanian Padi yang ditargetkan 382.952 ton terealisasi 386.800 ton;
- Produksi Pertanian Jagung yang ditargetkan 105.032 ton teralisasi sebesar 152.274 ton;
- Produksi Pertanian kedelai yang ditargetkan 3.345 ton terealisasi sebesar 2.132 Ton;

- Produksi Pertanian Kacang tanah yang ditargetkan 4.965 ton terealisasi sebesar 3.756 ton;
- Produksi Pertanian Kacang hijau yang ditargetkan 2.140 ton terealisasi sebesar 1.537 ton;
- Produksi Pertanian Ubi kayu yang ditargetkan 27.524 ton terealisasi sebesar 14.953 ton;
- Produksi Pertanian Ubi jalar yang ditargetkan 5.737 ton terealisasi sebesar 2.797 Ton;
- Produksi Bawang merah yang ditargetkan 3.332 ton terealisasi sebesar 21 ton;
- Produksi Sawi yang ditargetkan 592 ton terealisasi sebesar 752 ton.
- Produksi Kacang panjang yang ditargetkan 506 ton terealisasi sebesar 961 ton;
- Produksi Cabe yang ditargetkan 769 ton terealisasi sebesar 1.259 ton.
- Produksi Tomat yang ditargetkan 357 ton terealisasi sebesar 604 ton;
- Produksi Terong yang ditargetkan 8.826 ton terealisasi sebesar 852 ton;
- Produksi Ketimun yang ditargetkan 783 ton terealisasi sebesar 130 ton;
- Produksi Labu Siam yang ditargetkan 592 ton terealisasi sebesar 194 ton;
- Produksi Kangkung yang ditargetkan 1.133 ton terealisasi sebesar 1.633 ton;
- Produksi Bayam yang ditargetkan 609 ton terealisasi sebesar 1.163 ton;
- Produksi Jambu biji yang ditargetkan 5.423 Kuintal terealisasi sebesar 17.240 Kuintal;
- Produksi Jeruk yang ditargetkan 1.852 Kuintal terealisasi sebesar 5.343 Kuintal;
- Produksi Mangga yang ditargetkan 316.646 Kuintal terealisasi sebesar 634.417 Kuintal;
- Produksi Pepaya yang ditargetkan 8.628 Kuintal terealisasi sebesar 6.924 Kuintal;

- Produksi Pisang yang ditargetkan 176.774 Kuintal terealisasi sebesar 268.381 Kuintal;
- Produksi Belimbing yang ditargetkan 2.367 Kuintal terealisasi sebesar 5.633 Kuintal;
- Produksi Sawo yang ditargetkan 1.131 Kuintal terealisasi sebesar 2.531 Kuintal;
- Produksi Sirsak yang ditargetkan 966 Kuintal terealisasi sebesar 832 Kuintal;
- Produksi Tembakau yang ditargetkan 11 ton terealisasi sebesar 46,8 ton;
- Produksi Tebu yang ditargetkan 8.114 ton terealisasi sebesar 9.971 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Kelapa yang ditargetkan 3.153 ton terealisasi sebesar 1.635 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Cengkeh yang ditargetkan 29 ton terealisasi sebesar 1 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Kopi yang ditargetkan 50 ton terealisasi sebesar 4,31 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Jambu mente yang ditargetkan 119 ton terealisasi sebesar 60 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Kapuk Randu yang ditargetkan 54 ton terealisasi sebesar 10,28 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Kakao yang ditargetkan 3 ton terealisasi sebesar 7,52 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Kunyit yang ditargetkan 925 ton terealisasi sebesar 760,9 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Siwalan yang ditargetkan 930 ton terealisasi sebesar 17 ton.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Pertanian antara lain:

3. Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura Kedelai, Ubi Kayu dan Ubi Jalar tidak tercapai karena biaya produksi yang tinggi dan harga jual yang rendah sehingga petani kurang berminat menanam.
4. Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura Kacang Tanah tidak tercapai karena curah hujan yang tinggi menyebabkan produksi menurun.
5. Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura Sayur Bawang Merah, Terong, dan Ketimun serta buah Sirsat tidak tercapai karena curah hujan yang tinggi mengakibatkan kurang mendukung untuk tanaman Sayuran sehingga petani kurang berminat dan beralih ke komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang lain.
6. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Buah Pepaya tidak tercapai karena kurangnya peremajaan tanaman Pepaya yang mengakibatkan produksi buah kurang maksimal.
7. Produksi Perkebunan Cengkeh tidak tercapai karena banyak pohon yang ditebang.
8. Produksi Perkebunan Kopi tidak tercapai karena tanaman kopi kurang produktif.

Selain beberapa alasan diatas, produksi pertanian menurun juga disebabkan serangan Penyakit dan Organisme Pengganggu Tanaman (POPT).

2. Urusan Kehutanan

Pada tahun 2012 Urusan Kehutanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 4 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp340.697.045,00, terealisasi sebesar Rp327.805.045,00, tidak terserap Rp12.892.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya penanaman bibit sengon, jati, mangga dan nangka;
- Terlaksananya pembangunan sumur resapan;
- Terlaksananya sosialisasi penataan hasil hutan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kehutanan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ditargetkan sebesar 0,013% terealisasi 3,10%;
- Produksi hasil hutan Kayu Jati yang ditargetkan 600 m³ terealisasi sebesar 121,86 m³;
- Produksi hasil hutan Non Kayu Jati yang ditargetkan 50 m³ terealisasi sebesar 360,77 m³.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Kehutanan antara lain:

- Produksi Hasil Hutan Kayu Jati tidak tercapai karena penebangan telah dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga tahun ini pertumbuhannya lambat.

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada tahun 2012 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah serta Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 6 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp843.125.000,00, terealisasi sebesar Rp706.614.600,00, tidak terserap Rp136.510.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 4 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp780.125.000,00, terealisasi sebesar Rp643.676.750,00, tidak terserap Rp136.448.250,00, disebabkan adanya efisiensi.

1) Efisiensi	Rp	18.597.500,00
2) Sisa Lelang	Rp	1.798.000,00
3) Belum dilaksanakan	Rp	116.052.750,00

3.2. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp63.000.000,00, terealisasi

sebesar Rp62.937.850,00, tidak terserap Rp62.150,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya Peraturan Bupati tentang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan bidang Pertambangan Mineral Non Logam;
- Tersedianya Dokumen Laporan hasil Study Kelistrikan Tenaga Matahari;
- Terlaksananya Sosialisasi Energi Baru Terbarukan, Konversi Energi dan Penghematan Energi;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penghemat energi.

Capaian Indikator Kinerja RPJM :

Presentase ABT berijin yang membayar pajak, ditargetkan sebesar 71,47 % terealisasi.

4. Urusan Pariwisata

Pada tahun 2012 Urusan Pariwisata di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 9 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.271.467.000,00, terealisasi sebesar Rp1.245.956.700,00, tidak terserap Rp25.510.300,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 13.891.600,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 11.618.700,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap potensi wisata gresik;
- Terpilihnya duta wisata yang berkualitas;
- Terlaksananya pengenalan/promosi potensi daerah/ciri khas Gresik;
- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarana pariwisata untuk kawasan objek wisata;

- Terlaksananya pelatihan manajemen kepariwisataan bagi pengusaha jasa pariwisata;
- Terlaksananya pemantauan pelayanan jasa usaha kepariwisataan;
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pariwisata tahun 2012 adalah Jumlah kunjungan wisata ditargetkan sebanyak 1.325.000 orang realisasi 1.500.000 orang.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pariwisata adalah:

- Penghargaan komitmen dan kepedulian yang tinggi dalam membangun sektor pariwisata.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2012 Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 22 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp7.629.416.260,00 terealisasi sebesar Rp5.462.634.343,00 tidak terserap Rp2.166.781.917,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp	98.391.100,00
2) Sisa Lelang	Rp	308.390.817,00
3) Lelang gagal	Rp	1.760.000.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya sosialisasi penggunaan alat tangkap yang dilarang;
- Terlaksananya patroli pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan;
- Tersedianya sarana laboratorium kelautan, perikanan dan peternakan;
- Terlaksananya demplot udang vannamee nila dan bandeng;
- Terlaksananya pembangunan tempat pelelangan ikan;
- Lancarnya pendaratan perahu/kapal perikanan;

- Terlaksananya sosialisasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan, Program Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dan Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya peningkatnya mutu hasil perikanan dan produksi ikan;
- Terlaksananya investasi pasar ikan dan udang;
- Tersedianya infrastruktur Balai Benih Budidaya Multi Spesies.

Adapun permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah:

- Masih adanya pelanggaran dalam pemanfaatan Sumber Daya Kelautan perikanan oleh masyarakat pesisir/nelayan;
- Masih adanya konflik nelayan yang terjadi dalam daerah maupun dengan luar daerah;
- Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pasar ikan belum dapat dilaksanakan.

Solusi permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah:

- Perlu dilakukan penyuluhan hukum secara berkelanjutan;
- Dilakukan musyawarah nelayan dalam dan antar daerah untuk menyelesaikan konflik;
- Proses kerjasama dengan Badan Usaha dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Produksi Daging yang ditargetkan 10.821,71 ton realisasi sebesar 10.311,97 ton.
- Produksi Telur yang ditargetkan 2.516,39 ton ditahun realisasi sebesar 2.691,73 ton.
- Produksi Susu yang ditargetkan 352,69 ton realisasi sebesar 304,80 ton.
- Produksi ternak sapi potong yang ditargetkan 52.984 ekor realisasi sebesar 58.268 ekor.
- Populasi ternak sapi perah yang ditargetkan 851 ekor realisasi sebesar 415 ekor.

- Populasi ternak kerbau yang ditargetkan 208 ekor realisasi sebesar 297 ekor.
- Populasi ternak kambing yang ditargetkan 52.600 ekor realisasi sebesar 62.210 ekor.
- Populasi ternak domba yang ditargetkan 30.067 ekor realisasi sebesar 30.396 ekor.
- Populasi ternak kuda yang ditargetkan 245 ekor realisasi sebesar 236 ekor.
- Populasi ternak ayam buras yang ditargetkan 649.159 ekor realisasi sebesar 645.838 ekor.
- Populasi ternak ayam ras petelur yang ditargetkan 130.878 ekor realisasi sebesar 133.045 ekor.
- Populasi ternak ayam ras pedaging yang ditargetkan 2.558.090 ekor realisasi sebesar 2.600.000 ekor.
- Populasi ternak itik yang ditargetkan 25.640 ekor realisasi sebesar 27.990 ekor.
- Populasi ternak entok dan angsa yang ditargetkan 13.282 ekor realisasi sebesar 13.260 ekor.

Capaian indikator sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan di Urusan Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

- Produksi Perikanan Budi daya udang windu yang ditargetkan 1.420,00 ton realisasi sebesar 3.027,66 ton.
- Produksi Perikanan Budi daya udang vannamae yang ditargetkan 3.874,00 ton realisasi sebesar 7.428,71 ton.
- Produksi Perikanan Budi daya bandeng yang ditargetkan 29.400,00 ton realisasi sebesar 47.700,30 ton.
- Produksi Perikanan Budi daya kerapu yang ditargetkan 9,90 ton realisasi sebesar 9,90 ton.
- Produksi Perikanan Budi daya nila yang ditargetkan 1.032,00 ton ditahun realisasi sebesar 1.737,18 ton.

- Produksi Perikanan Budi daya penangkapan yang ditargetkan 16.900,00 ton sedangkan realisasi sebesar 16.965,00 ton.
- Produksi Perikanan Budi daya perairan umum yang ditargetkan 525,00 ton realisasi sebesar 420 ton.
- Produksi tambak payau yang ditargetkan 92,49 ton/Ha realisasi sebesar 222,94 ton/Ha.
- Produksi tambak tawar yang ditargetkan 111,09 ton/Ha realisasi sebesar 233,10 ton/Ha.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Capaian indikator Meningkatnya produksi dan populasi peternakan Produksi Peternakan Susu ditargetkan sebesar 10.821,71 ton, terealisasi sebesar 10.311,97 ton , sehingga capaian indikator tersebut tidak tercapai karena Harga sapi naik, sehingga banyak yang dijual akibatnya produksi daging mengalami penurunan.
2. Capaian indikator Meningkatnya produksi dan populasi peternakan Produksi Peternakan Susu ditargetkan sebesar 352,69 ton, terealisasi sebesar 304,80 ton , sehingga capaian indikator tersebut tidak tercapai karena Harga sapi turun, sehingga banyak yang dijual akibatnya produksi susu mengalami penurunan.
3. Capaian indikator Meningkatnya produksi dan populasi peternakan Produksi Peternakan Sapi Perah ditargetkan sebesar 851 ton, terealisasi sebesar 415 ton , sehingga capaian indikator tersebut tidak tercapai karena Banyak sapi yang dijual.
4. Capaian indikator Meningkatnya produksi dan populasi peternakan Produksi Peternakan Ayam Buras ditargetkan sebesar 649.159 ton, terealisasi sebesar 645.838 ton , sehingga capaian indikator tersebut tidak tercapai karena Terkena wabah penyakit.
5. Capaian indikator Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan Produksi Perikanan Perairan Umum ditargetkan sebesar 525 ton,

teralisasi sebesar 420 ton , sehingga capaian indikator tersebut tidak tercapai karena Terjadinya banjir dan anomaly iklim.

6. Urusan Perdagangan

Pada tahun 2012 Urusan Perdagangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 8 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp916.986.500,00 terealisasi sebesar Rp892.418.260,00 tidak terserap Rp24.568.240,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 6.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 5 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp803.767.500,00 terealisasi sebesar Rp780.056.260,00 tidak terserap Rp23.711.240,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 6.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp113.219.000,00 terealisasi sebesar Rp112.362.000,00 tidak terserap Rp857.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pengawasan komoditi barang yang memenuhi standar mutu;
- Terlaksananya pelatihan kewirausahaan;
- Tersusunnya dokumen perencanaan pembentukan Perusahaan Daerah (PD) pasar Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan;
- Terlaksananya pemeliharaan pasar kabupaten.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perdagangan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan penerbitan SIUP yang ditargetkan 10,8 % realisasi sebesar 7 %.
- Pertumbuhan penerbitan TDP yang diterbitkan sebanyak 9,6% realisasi 62%;
- Pertumbuhan penerbitan TDG yang ditargetkan 15,8 % realisasi sebesar 62 %.
- Pertumbuhan nilai investasi perdagangan yang ditargetkan 1,4 % realisasi sebesar 1,5 %.
- Jumlah Pameran/Ekspo per tahun yang ditargetkan 3 even realisasi sebesar 4 even.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Perdagangan antara lain:

- Capaian indikator pertumbuhan penerbitan SIUP tidak tercapai karena diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 bahwa pelaku usaha mikro yang modalnya sampai Rp50.000.000,00 tidak diwajibkan memiliki SIUP.

7. Urusan Industri

Pada tahun 2012 Urusan Industri di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 7 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp888.581.250,00 terealisasi sebesar Rp570.122.550,00, tidak terserap Rp318.458.700,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pelatihan bagi industri kecil dan menengah yang memproduksi batik;
- Tersedianya pedoman perencanaan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
- Terlaksananya pelatihan standar mutu barang yang ber SNI;

- Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi produk hasil tembakau.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Industri tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan jumlah industri yang ditargetkan 1 % realisasi sebesar 1 %.
- Pertumbuhan nilai produksi yang ditargetkan 2,5 % realisasi sebesar 2,5 %.

8. Urusan Transmigrasi

Pada tahun 2012 Urusan Transmigrasi di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 1 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp28.438.000,00 terealisasi sebesar Rp28.438.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya penyampaian informasi tentang program transmigrasi dan timbulnya minat keluarga pra sejahtera menjadi transmigran;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Transmigrasi tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Pembinaan transmigrasi ditargetkan 25 % realisasi sebesar 30 %.

D. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran untuk belanja Hibah sebesar Rp118.228.801.000,00 terealisasi sebesar Rp112.124.659.700,00, tidak terserap Rp6.104.141.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp450.000.000,00.
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk KODIM Gresik (TMMd) dan KODAM V BRAWIJAYA (TMMD) dialokasikan sebesar Rp350.000.000,00 terealisasi Rp350.000.000,00;

2. Bagian Perlengkapan Setda Kab. Gresik untuk BPS Gresik dialokasikan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp100.000.000,00.
- b. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta sebesar Rp23.864.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.036.250.000,00 tidak terserap sebesar Rp3.827.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk bantuan PKK Kabupaten, PKK 18 Kecamatan, Dharma Wanita Kabupaten dan BUMDES dengan alokasikan sebesar Rp1.055.000.000,00 terealisasi Rp1.055.000.000,00;
 2. Dinas Pendidikan untuk PGRI, LP. Ma'arif Gresik, Dewan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Dharma Wanita, Majelis Pendidikan Muhamadiyah, LP Maarif Bawean, Perguruan NU, Muhamadiyah Bawean dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia dengan alokasi sebesar Rp900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp800.000.000,00 tidak terserap Rp100.000.000,00.
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Yayasan Al Baitul Mubarakah, Pengurus Daerah Muhamadiyah Gresik, Pengurus Cabang Muhamadiyah Panceng, Persatuan Wredatama Republik Indonesia, MWC NU Mentaras Dukun, MWC NU Pekalongan Tambak, MWC NU Kedamean, MWC NU Wringinanom, MWC NU Bawean, Persatuan Istri Veteran RI, dengan alokasi sebesar Rp1.170.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.160.000.000,00 tidak terserap Rp10.000.000,00.
 4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk Dewan Kesenian Gresik, Pramuka dan KONI Gresik dengan alokasi sebesar Rp4.550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.628.750.000,00 tidak terserap Rp1.921.250.000,00.
 5. Bagian Humas untuk KWG dengan alokasi sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp50.000.000,00.

6. Dinas Kesehatan untuk Badan Penanggulangan Aids, PMI, Badan Narkoba Kabupaten, Balai Kesehatan NU, BKIA MWC NU Manyar dengan alokasi sebesar Rp312.500.000,00 terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 tidak terserap Rp212.500.000,00.
 7. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk Koperasi Wanita sebanyak 21 lembaga dengan alokasi sebesar Rp525.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp525.000.000,00.
 8. Bagian Administrasi Pembangunan untuk SMA Sederajat direncanakan 40 Lembaga realisasi 40 lembaga, SMP Sederajat direncanakan 58 lembaga realisasi 55 Lembaga, SD Sederajat direncanakan 191 Lembaga realisasi 182 lembaga dan TK/TPQ/PAUD/RA direncanakan 312 lembaga realisasi 278 lembaga dan Ponpes direncanakan 39 Ponpes realisasi 32 Ponpes dengan alokasi sebesar Rp15.301.500.000,00 terealisasi sebesar Rp14.322.500.000,00 tidak terserap Rp979.000.000,00.
- c. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp10.688.500.000,00 terealisasi sebesar Rp9.601.000.000,00 tidak terserap Rp1.087.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Dinas Kelautan dan Perikanan untuk KUB Rukun Nelayan Tirta Buana dan KUB Rukun Nelayan Muara Solo dengan alokasi sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi Rp100.000.000,00;
 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk kegiatan Renovasi Sanggar Candi Busana Dusun Petal dengan alokasi sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi Rp10.000.000,00;
 3. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk Bantuan Pembelian Seperangkat Alat Pertanian Kelompok Tani dengan alokasi sebesar Rp40.000.000,00 terealisasi Rp40.000.000,00;
 4. Dinas Koperasi, UKM dan Perindag untuk Bantuan Pengadaan Alat Batik Bina Usaha Batik Sundari dan UKM Sinar Utama Domas dengan alokasi sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi Rp10.000.000,00 tidak terserap Rp40.000.000,00;

5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk LPTQ 18 Kecamatan, Majelis Ta'lim Tarbiyatun Nisa Desa Soko Kec. Wringinanom dan Tempat Ibadah 1601 tempat ibadah dengan alokasi sebesar Rp10.488.500.000,00 terealisasi Rp9.441.000.000,00 tidak terserap 1.047.500.000,00.
- d. Belanja Hibah Dana BOS Daerah sebesar Rp56.564.122.000,00 terealisasi sebesar Rp55.806.086.000,00 tidak terserap Rp758.036.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan untuk BOS SD Sederajat (613 lembaga), BOS SMP Sederajat (201 lembaga), BOS SMA/SMK/MA/PAKET C/SMALB / BOS-BKSM (SMA 48 lembaga, SMK 38 lembaga, Paket C 31 lembaga, SMALB 5 lembaga, MA 61 lembaga), BOS SDLB dan SMPLB, BOS Paket A, BOS Paket B, BOS Paket C, BOS Program Keaksaraan Fungsional, BOS TPA/TPQ/MADIN 1645 lembaga, BOS PAUD/TK/RA 1190 lembaga, BOS Ujian Nasional SMA/MA/SMA Swasta, BOS Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Swasta, BOS Pondok Pesantren 122 Ponpes, BOS UNAS Program Paket A setara SD, BOS UNAS Program Paket B setara SMP, BOS UNAS Program Paket C setara SMA dengan alokasi sebesar Rp56.564.122.000,00 terealisasi Rp55.806.086.000,00 tidak terserap 758.036.000,00.
- e. Belanja Hibah Dana BOS Provinsi sebesar Rp18.978.720.000,00 terealisasi sebesar Rp18.957.120.000,00 tidak terserap Rp21.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan untuk BPPDGS dan BOS SMA / SMK (BKSM) dengan alokasi sebesar Rp18.978.720.000,00 terealisasi sebesar Rp18.957.120.000,00 tidak terserap Rp21.600.000,00.

f. Belanja Hibah Konversi Dari Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp7.683.459.000,00 terealisasi sebesar Rp7.274.203.700,00 tidak terserap Rp409.255.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi sebesar Rp1.791.912.000,00 terealisasi sebesar Rp1.766.653.500,00 tidak terserap Rp25.258.500,00;
2. Badan Lingkungan Hidup dengan alokasi sebesar Rp24.000.000,00 terealisasi sebesar Rp23.760.000,00 tidak terserap Rp240.000,00;
3. Kantor KB dan PP dengan alokasi sebesar Rp40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp38.500.000,00 tidak terserap Rp1.500.000,00;
4. Sekretariat Daerah dengan alokasi sebesar Rp1.090.500.000,00 terealisasi sebesar Rp989.232.000,00 tidak terserap Rp101.268.000,00;
5. Kantor Ketahanan Pangan dengan alokasi sebesar Rp243.000.000,00 terealisasi sebesar Rp989.241.140.000,00 tidak terserap Rp1.860.000,00;
6. Kantor PMD dengan alokasi sebesar Rp4.920.000,00 terealisasi sebesar Rp4.920.000,00;
7. Kantor Arsip dengan alokasi sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
8. Dinas Pertanian dengan alokasi sebesar Rp4.238.760.000,00 terealisasi sebesar Rp3.962.948.200,00 tidak terserap Rp275.811.800,00;
9. Dinas Kelautan dengan alokasi sebesar Rp240.367.000,00 terealisasi sebesar Rp237.050.000,00 tidak terserap Rp317.000,00.

Sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp28.459.379.065,00, terealisasi sebesar Rp17.618.925.345,00, tidak terserap Rp10.840.453.720,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan alokasi sebesar Rp28.339.379.065,00, terealisasi sebesar Rp17.500.125.345,00, tidak terserap Rp10.839.253.720,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial/Santunan Kemasyarakatan terdiri dari:
 - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk Bantuan Santunan Kematian Penduduk Miskin, Bantuan Santunan Kepada Yatim Piatu 9.776 anak, dan Bantuan Santunan kepada Janda Miskin / Veteran 6.000 orang, Bantuan untuk Pekerja Sosial 26.598 orang, Bantuan Kuliah Siswa Berprestasi serta JAMKESMASDA dengan alokasi sebesar Rp23.884.379.065,00 terealisasi sebesar Rp13.135.125.345,00 tidak terserap Rp10.749.253.720,00.
 - Dinas Pekerjaan Umum untuk bantuan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin 297 Keluarga Miskin dengan alokasi sebesar Rp4.555.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.365.000.000,00 tidak terserap Rp190.000.000,00.
- c. Belanja Bantuan Sosial Konversi dari Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dengan alokasi sebesar Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp118.800.000,00 tidak terserap sebesar Rp 1.200.000,00 yaitu:
 - Dinas Sosial dengan alokasi sebesar Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp118.800.000,00 tidak terserap sebesar Rp1.200.000,00.

E. Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan kepada Desa dialokasikan sebesar Rp109.009.070.000,00 terealisasi sebesar Rp106.280.881.000,00 tidak terserap Rp2.728.189.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Tunjangan Kades, Sekdes Non PNS, Perangkat Desa),

- Bantuan Purna Tugas Kades dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Kompensasi Pemberhentian Sekdes Non PNS, Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dialokasikan dana sebesar Rp74.931.820.000,00 terealisasi sebesar Rp72.822.631.000,00 tidak terserap Rp2.109.189.000,00.
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk Tunjangan RT/RW dialokasikan sebesar Rp988.750.000,00 terealisasi sebesar Rp988.750.000,00.
 3. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk Bantuan Jalan Poros Desa (JPD), Jalan Desa/Kelurahan, Bantuan SDB yang diarahkan dan Bantuan Jalan Poros Desa dialokasikan sebesar Rp30.705.500.000,00 terealisasi sebesar Rp30.174.000.000,00 tidak terserap Rp531.500.000,00.
 4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik untuk Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dialokasikan sebesar Rp438.000.000,00 terealisasi sebesar Rp430.000.000,00 tidak terserap Rp8.000.000,00.
 5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk Kegiatan PNPM – MP (Perdesaan), Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, Pasar Desa Wadeng, Pasar Desa Dapet Balongpanggang, Pasar Desa Kedanyang Kebomas, Pasar Desa Duduksampeyan, Pasar Desa Sekargadung Kecamatan Dukun, Pasar Desa Sembayat Kecamatan Manyar, TTG untuk Desa Sidogedungbatu Sangkapura, Pasar Desa Daun Sangkapura dialokasikan sebesar Rp1.030.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.025.000.000,00 tidak terserap Rp5.000.000,00.
 6. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah digunakan untuk Bantuan Pilkades dialokasikan dana sebesar Rp65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp25.000.000,00 tidak terserap Rp40.000.000,00.
 7. Kantor Ketahanan Pangan untuk Pembangunan Lumbung Padi dialokasikan dana sebesar Rp850.000.000,00 terealisasi sebesar Rp850.000.000,00.

F. Belanja Bantuan Partai Politik

Belanja Bantuan Partai Politik pada tahun 2012 pada Kantor Kesbang Pol Linmas untuk Belanja Bantuan Partai Politik Hati Nurani Rakyat, Partai Politik Gerakan Indonesia Raya, Partai Politik Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Politik Amanat Nasional, Partai Politik Kebangkitan Bangsa, Partai Politik Golongan Karya, Partai Politik Persatuan Pembangunan, Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Politik Demokrat, Partai Politik Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Politik Buruh dialokasikan dana sebesar Rp782.061.300,00 terealisasi Rp782.061.300,00

G. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi Rp1.220.210.057,00 tidak terserap Rp1.779.789.943,00.

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran untuk belanja Hibah sebesar Rp58.453.825.588,00 terealisasi sebesar Rp56.779.203.000,00, tidak terserap Rp1.674.622.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

- g. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp58.333.825.588,00 terealisasi sebesar Rp56.659.203.000,00, tidak terserap Rp1.674.622.588,00

3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk PKK Kabupaten dan Kecamatan, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) dan Darma Wanita Kabupaten dialokasikan sebesar Rp755.000.000,00 terealisasi Rp754.999.750,00 tidak terserap Rp250 rupiah;
4. Dinas Pendidikan untuk biaya operasional PGRI, bantuan operasional LP Ma'arif Gresik, Operasional Dewan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Dharma Wanita, bantuan operasional Majelis Pendidikan Muhammadiyah, biaya operasional LP Ma'arif Bawean, rehabilitasi sekolah swasta, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Nasional 9 tahun dan Program Pendidikan Menengah dialokasikan sebesar Rp17.775.618.088,00 terealisasi sebesar Rp17.488.475.450,00 tidak terserap Rp287.142.638,00;
5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk Majelis Ulama Indonesia Gresik, Dewan Masjid Indonesia Gresik, Dewan Kesenian Gresik, Giri Nada, Palang Merah Indonesia (PMI), Pramuka, Kawasan Industri Gresik (KWG), KORPegawai Republik Indonesia (KORPRI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Narkotika Kabupaten dan Badan Penanggulangan AIDS dialokasikan sebesar Rp10.747.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.164.720.800,00, tidak terserap Rp582.279.200,00.
6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk Polres dalam kegiatan Lomba Cipta Kampung Aman dengan alokasi sebesar Rp50.000.000,00, tidak terealisasi.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk kelompok/UKM (240), dan bantuan kelompok/paguyuban PKL dengan alokasi sebesar Rp390.000.000,00 terealisasi sebesar Rp140.000.000,00 tidak terserap Rp250.000.000,00.
8. Dinas Pekerjaan Umum untuk INKAFA dengan alokasi sebesar Rp40.000.000,00 tidak terealisasi.

9. Dinas Kesehatan untuk pembangunan BKIA dengan alokasi sebesar Rp20.000.000,00 tidak terealisasi.
- Dana Bos kepada Sekolah Swasta dengan alokasi sebesar Rp28.556.207.500,00 terealisasi sebesar Rp28.111.007.000,00 tidak terserap Rp445.200.500,00.
- h. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp120.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
9. Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk bantuan KUBE INSANI dengan alokasikan sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi Rp20.000.000,00.
10. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan untuk kegiatan pengembangan budidaya ikan air tawar dan penguatan kelembagaan peternakan kambing desa dengan alokasi sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp100.000.000,00.

Sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp105.645.463.994,83, terealisasi sebesar Rp101.130.470.048,00, tidak terserap Rp4.514.993.946,83 dengan rincian sebagai berikut:

- d. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan untuk Program Pendidikan Belajar Diknas Sembilan Tahun, Pendidikan Non Formal dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga dengan alokasi sebesar Rp54.576.900.000,00 terealisasi sebesar Rp53.757.720.000,00 tidak terserap Rp819.190.000,00.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk Bantuan Dana Operasional Masjid, Bantuan Tempat Ibadah/ponpes, Bantuan Dana Sertifikat Tanah Masjid, Bantuan Dana Operasional Pesantren, Bantuan LPTQ Kecamatan, Bantuan Organisasi lainnya dan Bantuan ADKASI dan APKASI dengan alokasi sebesar Rp10.347.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.968.800.000,00 tidak terserap Rp378.200.000,00.

e. Belanja Bantuan Sosial / Santunan Kemasyarakatan terdiri dari:

- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk Bantuan Santunan Kematian, Bantuan Santunan Kepada Yatim Piatu, Fuqoroh, Jamkesmasda GAKIN dan bantuan tunjangan kesejahteraan dengan alokasi sebesar Rp36.371.563,994,83 terealisasi sebesar Rp33.315.960.048,00 tidak terserap Rp3.055.603.946,83.
- Badan Kepagawaian Daerah untuk Bantuan Pemulangan Pegawai Pensiun dengan alokasi sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.880.000.000,00 tidak terserap Rp120.000.000,00.
- Dinas Pekerjaan Umum untuk bantuan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin dengan alokasi sebesar Rp1.350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.208.000.000,00 tidak terserap Rp142.000.000,00.

H. Pelaksanaan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp278.500.000,00 terealisasi sebesar Rp242.590.500,00 tidak terserap Rp35.909.500,00.

Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp94.746.741.500,00 terealisasi Rp90.082.754.550,00 tidak terserap Rp4.663.986.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

8. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Kelurahan (ADK), Tunjangan Kades dan Perangkat Desa, Bantuan Pelaksanaan Pilkades, Bantuan Purna Tugas Kades dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Cadangan Purna Tugas Sekdes dialokasikan sebesar Rp68.898.920.000,00 terealisasi sebesar Rp65.095.202.000,00 tidak terserap Rp3.807.718.000,00.
9. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Gresik untuk Bantuan Jalan Poros Desa (JPD), Bantuan SDB yang diarahkan

dialokasikan sebesar Rp17.970.000.000,00 terealisasi sebesar Rp17.916.750,00 tidak terserap Rp53.250.000,00.

10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik untuk Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dialokasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp740.000.000,00 tidak terserap Rp260.000.000,00.

11. Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk Program Gardutaskin, PNPM-MP Perdesaan, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah, Hadiah Lomba Desa/Kelurahan/PKK, Bantuan Peralatan TTG, Revitalisasi Posyandu, PWTAD, Program Bantuan untuk Bundes, Bantuan untuk Pasar Desa, Bantuan untuk Pasar Hewan, Sharing Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan, Sharing Pendidikan Kemasyarakatan, Sharing Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Sumber Mata Air, Sharing Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan TT, Sharing Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Sharing Pengembangan Pasar Desa, Sharing CCB, Tunjangan Ketua RT/RW dialokasikan sebesar Rp5.962.821.500,00 terealisasi sebesar Rp5.433.741.250,00 tidak terserap Rp518.540.250,00.

12. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik untuk Pembangunan Pagar Makam Sukorame, Renovasi Makam Purbonegoro Sawah Mulyo dialokasikan sebesar Rp115.000.000,00 terealisasi sebesar Rp115.000.000,00.

I. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi Rp2.182.359.020,00 tidak terserap Rp817.640.980,00.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sehingga tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efisien dan efektif.

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Gresik menerima tugas pembantuan dari Pemerintah sebanyak 6 (enam) urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan pemberdayaan masyarakat;
2. Urusan tenaga kerja;
3. Urusan pertanian;
4. Urusan kelautan dan perikanan;
5. Urusan Kesehatan;
6. Urusan Pekerjaan Umum.

I. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1. Dasar Hukum
 - a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - c. UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011
 - d. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian ABPP dan SARKALAK No. STAP 010.05.13-0/AG/2012 dan DNA No. 05/010.05/2012
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

**1.1. Kegiatan : Peningkatan Kemandirian Masyarakat
Perdesaan (PNPM)**

Lokasi	: 13 Kecamatan
Realisasi Fisik	: 100 %
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp. 14.866.508.000,00
- Realisasi	: Rp. 14.866.508.000,00 (100 %)
Keluaran	: Adanya peningkatan kapasitas perdesaan (SDM) dan sarana prasarana perdesaan
- Target	: 13 Kecamatan
- Realisasi	: 13 Kecamatan
Hasil	: Meningkatnya SDM dan sarana prasarana pedesaan
- Target	: 100 %
- Realisasi	: 100 %

**1.2. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan Kelurahan**

Lokasi	: 1 desa 1 kecamatan
Realisasi Fisik	: 100 %
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp. 210.000.000,00
- Realisasi	: Rp. 210.000.000,00 (100 %)
Keluaran	: Bangunan balai desa

- Target : 1 desa 1 kecamatan
- Realisasi : 1 desa 1 kecamatan
- Hasil : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
- Target : 100%
- Realisasi : 100%

1.3. Kegiatan : Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

- Lokasi : 1 desa 1 kecamatan
- Realisasi Fisik : 100 %
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : Rp. 115.000.000,00
- Realisasi : Rp. 115.000.000,00 (100 %)
- Keluaran : Bangunan pasar desa
- Target : 1 desa 1 kecamatan
- Realisasi : 1 desa 1 kecamatan
- Hasil : Meningkatnya ekonomi masyarakat
- Target : 100%
- Realisasi : 100%

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp. 15.191.508.000,00
- APBD : Rp. 13.093.960.000,00
- Jumlah : Rp. 28.285.468.000,00

II. URUSAN TENAGA KERJA

1. Dasar Hukum :

- DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1587/026-04.4.01/15/2012

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan:

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Bidang Penempatan Perluasan Kerja

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

1.1. Kegiatan : Administrasi Kegiatan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp. 73.000.000,00

- Realisasi : Rp. 71.794.000,00 (98,98 %)

Keluaran : Kelancaran Administrasi Kegiatan

- Target : 1 tahun

- Realisasi : 1 tahun

Hasil : Terselenggaranya Administrasi Kegiatan dengan Lancar

- Target : 100 %

- Realisasi : 100 %

1.2. Kegiatan : Padat Karya Produktif (Ternak Kambing)

Lokasi : Ds. Serah Kec. Panceng

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan :

- Target : Rp. 150.000.000,00

- Realisasi : Rp. 149.902.650,00 (99,94 %)

Keluaran : Pemberdayaan penganggur

- Target : Penyerapan Tenaga Kerja 88 orang/Paket
- Realisasi : Terserap Tenaga Kerja 88 orang/Paket (100 %)
- Hasil : Kelompok Usaha
- Target : Pembentukan 1 kelompok (10 orang) Ternak Kambing
- Realisasi : Pembentukan 1 kelompok (10 orang) Ternak Kambing

1.3. Kegiatan : Padat Karya Produktif (Budidaya Tambak Ikan Tawar)

- Lokasi : Ds. Kandangan Kec. Duduk Sampeyan
- Realisasi Fisik : 100 %
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : Rp. 150.000.000,00
- Realisasi : Rp. 149.888.900,00 (99,93 %)
- Keluaran : Pemberdayaan penganggur
- Target : Penyerapan Tenaga Kerja 88 orang/Paket
- Realisasi : Terserap Tenaga Kerja 88 orang/Paket (100 %)
- Hasil : Kelompok Usaha
- Target : Pembentukan 1 kelompok (10 orang) Budidaya Tambak Ikan Air Tawar
- Realisasi : Pembentukan 1 kelompok (10 orang) Budidaya Tambak Ikan Air Tawar

1.4. Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur (perbaikan Jalan Desa/Lingkungan (Paving))

- Lokasi : Ds. Babak Bawo Kec. Dukun
- Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan :

- Target : Rp. 136.000.000,00

- Realisasi : Rp. 135.975.900,00 (99,98 %)

Keluaran : Pemberdayaan penganggur

- Target : Penyerapan Tenaga Kerja 88 orang/Paket

- Realisasi : Terserap Tenaga Kerja 88 orang/Paket (100 %)

Hasil : Perbaikan Jalan Desa /Lingkungan (Paving)

- Target : Perbaikan Jalan Desa : 125 m

- Realisasi : Perbaikan Jalan Desa : 125 m

1.5. Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur (perbaikan Jalan Desa/Lingkungan (Paving))

Lokasi : Ds. Sekar Putih Kec. Balongpanggang

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan :

- Target : Rp. 136.000.000,00

- Realisasi : Rp. 135.980.410,00 (99,99 %)

Keluaran : Pemberdayaan penganggur

- Target : Penyerapan Tenaga Kerja 88 orang/Paket

- Realisasi : Terserap Tenaga Kerja 88 orang/Paket (100 %)

Hasil : Perbaikan Jalan Desa /Lingkungan (Paving)

- Target : Perbaikan Jalan Desa : 145 m

- Realisasi : Perbaikan Jalan Desa : 145 m

1.6. Kegiatan : Terapan Teknologi Tepat Guna (Pembuatan Kerupuk Ikan)

Lokasi : Ds. Indrodelik Kec. Bungah

Realisasi Fisik	:	100 %
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	
- Target	:	Rp. 142.000.000,00
- Realisasi	:	Rp. 141.962.800,00 (99,97 %)
Keluaran	:	Pemberdayaan penganggur
- Target	:	20 orang
- Realisasi	:	20 orang
Hasil	:	Kelompok Usaha
- Target	:	1 kelompok (20 orang) usaha pembuatan kerupuk
- Realisasi	:	1 kelompok (20 orang) usaha pembuatan kerupuk

III. URUSAN PERTANIAN

1. Dasar Hukum

- SP DIPA No. 5916/018-03.4.01/15/2012
- SP DIPA No. 6648/018-04.4.01/15/2012

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- Kementrian Pertanian

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

1.1. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan	:	Jumlah dana
- Target	:	Rp. 2.505.700.000,00
- Realisasi	:	Rp. 2.490.884.000,00 (99,41%)
Keluaran	:	1. Luas areal SL-PTT serealialia
		2. Jumlah laporan SL-PTT
		3. Jumlah laporan produksi serealialia
- Target	:	1. 12.135 Ha
		2. 2 Laporan
		3. 1 Laporan
- Realisasi	:	1. 12.135 Ha
		2. 2 Laporan
		3. 1 Laporan
Hasil	:	Terlaksananya SL-PTT tanaman serealialia
- Target	:	100%
- Realisasi	:	100%

1.2. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Lokasi	:	Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	:	100%
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah dana
- Target	:	Rp. 139.500.000,00
- Realisasi	:	Rp. 125.790.000,00 (90,17%)
Keluaran	:	1. Jumlah penangkar benih yang diberdayakan
		2. Jumlah laporan kegiatan perbenihan
- Target	:	1. 1 Unit
		2. 2 Laporan
- Realisasi	:	1. 1 Unit
		2. 2 Laporan

Hasil : Terlaksananya pemberdayaan penangkar benih

- Target : 100%

- Realisasi : 100%

1.3. Kegiatan : Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah dana

- Target : Rp. 100.000.000,00

- Realisasi : Rp. 98.834.100,00 (98,83%)

Keluaran : 1. Jumlah gerakan pengendalian OPT tanaman pangan

2. Jumlah sarana penanggulangan OPT/DPI

- Target : 1. 1 Kali

2. 1 Paket

- Realisasi : 1. 1 Kali

2. 1 Paket

Hasil : Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman pangan

- Target : 100%

- Realisasi : 100%

1.4. Kegiatan : Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan	:	Jumlah dana
- Target	:	Rp. 295.000.000,00
- Realisasi	:	Rp. 293.710.000,00 (99,56%)
Keluaran	:	1. Jumlah laporan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan 2. Jumlah kelompok penerima bantuan sarana pasca panen tanaman pangan
- Target	:	1. 1 Laporan 2. 2 Kelompok
- Realisasi	:	1. 1 Laporan 2. 2 Kelompok
Hasil	:	Terlaksananya bantuan sarana pasca panen tanaman pangan
- Target	:	100%
- Realisasi	:	100%

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

2.1. Kegiatan : Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran

Lokasi	:	Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	:	100%
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah dana
- Target	:	Rp. 520.785.000,00
- Realisasi	:	Rp. 518.255.000,00 (99,51%)
Keluaran	:	Luas pengembangan kawasan tanaman sayuran
- Target	:	50 Ha

- Realisasi : 50 Ha
- Hasil : Terlaksananya pengembangan kawasan tanaman sayuran
- Target : 100%
- Realisasi : 100%

2.2. Kegiatan : SL-GAP Cabe

- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Fisik : 100%
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah dana
- Target : Rp. 40.000.000,00
- Realisasi : Rp. 39.910.000,00 (99,78%)
- Keluaran : Jumlah kelompok SL-GAP Cabe
- Target : 2 Kelompok
- Realisasi : 2 Kelompok
- Hasil : Terlaksananya SL-GAP Cabe
- Target : 100%
- Realisasi : 100%

2.3. Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Fisik : 100%
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah dana
- Target : Rp. 20.000.000,00
- Realisasi : Rp. 19.960.000,00 (99,80%)
- Keluaran : Jumlah lembaga kelompok tani yang diberdayakan
- Target : 2 lembaga kelompok tani
- Realisasi : 2 lembaga kelompok tani

Hasil : Terlaksananya pemberdayaan
kelembagaan usaha
- Target : 100%
- Realisasi : 100%

2.4. Kegiatan : Sarana Prasarana

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah dana

- Target : Rp. 105.000.000,00

- Realisasi : Rp. 104.681.200,00 (99,70%)

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana

- Target : 2 Unit motor roda tiga

1 Paket alat pasca panen

- Realisasi : 2 Unit motor roda tiga

1 Paket alat pasca panen

Hasil : Terlaksananya pengadaan sarana dan
prasarana

- Target : 100%

- Realisasi : 100%

2.5. Kegiatan : SL-GHP Cabe

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah dana

- Target : Rp. 25.000.000,00

- Realisasi : Rp. 24.950.000,00 (99,80%)

Keluaran : Jumlah kelompok SL-GHP-Cabe

- Target : 2 Kelompok

- Realisasi : 2 Kelompok
- Hasil : Terlaksananya SL-GHP Cabe
- Target : 100%
- Realisasi : 100%

2.6. Kegiatan : Dukungan Manajemen

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah dana

- Target : Rp. 60.000.000,00

- Realisasi : Rp. 46.100.000,00 (76,83%)

Keluaran : Jumlah dukungan operasional
pelaksanaan kegiatan Ditjen Hortikultura

- Target : 1 Paket

- Realisasi : 1 Paket

Hasil : Terlaksananya laporan kegiatan Ditjen
Hortikultura

- Target : 100%

- Realisasi : 100%

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : Honor KPA dan PPK tidak terserap

- Solusi : Pengembalian uang

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp. 3.910.985.000.000,00

- APBD : Rp. 0,00

Jumlah : Rp. 3.910.985.000.000,00

IV. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. 1 Dasar Hukum

a. DIPA , No: 5020.032-04.4.08/15/2012

b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.
KEP.177/MEN/KU.611/2011

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Ditjen Perikanan
Budidaya

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakannya adalah Dinas
Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

**1.1. Kegiatan : Pengembangan Sistem Prasarana dan
Sarana Pembudidayaan Ikan**

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Anggaran Kegiatan

- Target : Rp. 1.401.800.000,00

- Realisasi : Rp. 1.271.496.000,00 (90,70%)

Keluaran : Kawasan perikanan budidaya yang
memiliki prasarana dan sarana yang
memadai untuk kawasan laut, payau dan
tawar.

- Target : 1 kawasan

- Realisasi : 1 kawasan

Hasil :

- Target : Kawasan minapolitan yang berbasis
perikanan budidaya

- Realisasi : Kawasan minapolitan yang berbasis
perikanan budidaya

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
- Solusi : Proses Identifikasi data petambak garam lebih ditingkatkan

1.2. Kegiatan : Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Anggaran Kegiatan

- Target : Rp. 11.550.000,00

- Realisasi : Rp. 11.550.000,00 (100%)

Keluaran : Pembudidaya yang diberdayakan melalui pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP)

- Target : 15 Kelompok

- Realisasi : 15 Kelompok

Hasil : Kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan

- Target : 15 Kelompok

- Realisasi : 15 Kelompok

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : Masih ditemui kelompok bentukan baru yang kurang representatif
- Solusi : Proses Identifikasi dan verifikasi data pembudidaya ditingkatkan

1.3. Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya

Lokasi : Kabupaten Gresik
 Realisasi Fisik : 100 %
 Tolok Ukur Kinerja
 Masukan : Anggaran Kegiatan
 - Target : Rp. 86.650.000,00
 - Realisasi : Rp. 84.583.600,00 (97,62%)
 Keluaran : Pengelolaan satker, Pengelolaan Keuangan, aset milik negara dan administrasi persuratan serta perangkat pengolahan data dan komunikasi.
 - Target : 100%
 - Realisasi : 100%
 Hasil : Pengelolaan satker selama 12 bulan, Pengelolaan Keuangan, aset milik negara dan administrasi persuratan sebanyak 1 dokumen serta perangkat pengolahan data dan komunikasi sebanyak 2 unit.
 - Target : 100%
 - Realisasi : 100%

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp. 1.500.000.000,00
 - APBD : Rp. 0
 Jumlah : Rp. 1.500.000.000,00

1. 1. a. Dasar Hukum DIPA Nomor 4708/032-06.4.01/15/2012
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.209/MEN/KU.611/2012
2. Instansi Pemberian Tugas Pembantuan
 Instansi Yang memberikan Tugas Pembantuan adalah Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satker yang melaksanakan Tugas Pembantuan adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

1.1 Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolak Ukur Kinerja

Masukan : Anggaran Kegiatan

- Target : Rp. 255.000.000,00

- Realisasi : RP. 250.550.000,00 (98,25%)

Keluaran : Sarana dan Prasarana pengolahan hasil perikanan

- Target : 2 Paket

- Realisasi : 1 paket

Hasil : Sarana dan Prasarana pengolahan hasil perikanan untuk diserahkan ke masyarakat

- Target : 1 Paket

- Realisasi : 1 paket

1.2 Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolak Ukur Kinerja

Masukan : Anggaran Kegiatan

- Target : Rp. 95.000.000,00

- Realisasi : RP. 85.972.300,00 (90,50%)

Keluaran : Dokumen perencanaan dan pelaporan
 - Target : 1 Paket
 - Realisasi : 1 Paket
 Hasil : Tersusunnya laporan kegiatan
 - Target : 1 paket
 - Realisasi : 1 paket

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBN : Rp. 350.000.000,00
 APBD : Rp. 0
 JUMLAH : Rp. 350.000.000,00

c. 1. a. Dasar Hukum DIPA No. 4709/032-07.4.01/15/2012

b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.
 KEP.130/MEN/KU.611/2012

2. Instansi Pemberian Tugas Pembantuan

Instansi Yang memberikan Tugas Pembantuan adalah Ditjen
 Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satker yang melaksanakan Tugas Pembantuan adalah Dinas Kelautan,
 Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

**1. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Laut,
 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

**1.1 Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
 Pengembangan Usaha**

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolak Ukur Kinerja

Masukan : Anggaran Kegiatan

- Target : Rp. 525.300.000,00

- Realisasi : RP. 516.123.200,00 (98,25%)

Keluaran : BLM Petambak Garam
 - Target : Rp. 300.000.000,00
 - Realisasi : Rp. 300.000.000,00 (100 %)
 Hasil :
 - Target : 19 Kelompok Usaha Garam
 - Realisasi : 19 Kelompok Usaha Garam
 Permasalahan dan Solusi
 - Permasalah : Alih fungsi lahan (lahan garam semakin menyempit)
 - Solusi : Proses Identifikasi data petambak garam lebih ditingkatkan

V. Urusan Kesehatan

1. Dasar Hukum : Permenkes No :
2556/MENKES/PER/XII/2011
2. Instansi Pemberi : Kemenkes R.I
Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kab Gresik
Perangkat Daerah
yang melaksanakan
4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:
 - 1. Program Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak**
 - 1.1. Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan (Bok)**

Lokasi : Kabupaten dan 32 Puskesmas
 Realisasi Fisik : 99,87 %
 Tolok Ukur Kinerja
 Masukan : Jumlah Dana
 - Target : Rp. 2,787,500,000 ,-
 - Realisasi : Rp. 2.784.047.500 ,- (99,87 %)
 Keluaran : Terlaksanannya kegiatan operasional

- dan pelayanan kesehatan di Puskesmas
- Target : 32 Puskesmas
 - Realisasi : 32 Puskesmas
 - Hasil : Peningkatan kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan di Puskesmas
 - Target : 100%
 - Realisasi : 99,87%

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp.
- APBD : Rp.
- Jumlah : Rp.

VI. Pekerjaan Umum

- a. 1. Dasar Hukum : DIPA Nomor: 1029/033-05.1.01/15/2012
2. Instansi Pemberi : Kementerian Pekerjaan Umum
Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum
Perangkat Daerah
yang melaksanakan
4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

1.1. Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan

- Lokasi : Kec. Gresik dan Manyar
- Realisasi Fisik : 100 %
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp. 6.650.000.000,00
- Realisasi : Rp. 4.200.000.000,00 (63,16 %)
- Keluaran : Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mandiri di Kab. Gresik
- Target : 2 Kecamatan (Gresik dan Manyar)
- Realisasi : 15 desa (Roomo, Trate, Tlogopojok, Sukorame, Yosowilangun, Sukomulyo, Karangkiring, Sukorejo, Bedilan, Singosari, Gapurosukolilo, Sidorukun, Karangpoh, Lumpur dan Kramatinggil)
- Hasil : Peningkatan kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan di Puskesmas
- Target : 19%
- Realisasi : 19%

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp. 6.650.000.000,00
- APBD : Rp. 550.000.000,00
- Jumlah : Rp. 10.850.000.000,00

- b. 1. Dasar Hukum : DIPA Nomor: 1029/033-05.5.01/15/2012
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementerian Pekerjaan Umum
3. Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum
Perangkat Daerah yang melaksanakan

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

1.2. Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

Lokasi	: 5 Kecamatan
Realisasi Fisik	: 100 %
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp. 8.312.500.000,00
- Realisasi	: Rp. 8.170.000.000,00 (98,29 %)
Keluaran	: Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mandiri di Kab. Gresik
- Target	: 5 Kecamatan (Driyorejo, Menganti, Kebomas, Gresik dan Manyar)
- Realisasi	: Penanggulangan kemiskinan di 103 desa
Hasil	: Meningkatnya kinerja Tim Fasilitator Kab. Gresik
- Target	: 100%
- Realisasi	: 100%

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN	: Rp. 8.312.500.000,00
- APBD	: Rp. 438.600.000,00
Jumlah	: Rp. 8.751.600.000,00

a.1. Dasar Hukum

- Surat Mendagri Nomor : 193.05-370 tanggal 6 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCB-DP: ADB Loan Nomor 1964-INO) Tahun Anggaran 2009;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 20 Desember 2010 Nomor : 3126/010-07.4.01/15/2011 tentang Pencairan Dana Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCBD);
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) – (REVISI KE-1 TANGGAL 7 JUNI 2011) tanggal 20 Desember 2010 Nomor : 3126/010-07.4.01/15/2011 tentang Pencairan Dana Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCBD).
1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik

3. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

**1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah**

**1.1. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas
Berkelanjutan untuk
Desentralisasi (SCBD)**

Lokasi	: Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	: 100 %
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Dana yang tersedia
- Target	: Rp. 4.349.674.000,00
- Realisasi	: Rp. 4.245.082.544,00 (97,60%)
Keluaran	: Kegiatan CBAP yang dapat diselesaikan
- Target	: 100 %
- Realisasi	: 100 %
Hasil	: Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Kabupaten Gresik
- Target	: 100 %
- Realisasi	: 100 %

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN	Rp. 4.349.674.000,00
- APBD	Rp. 1.275.000.000,00
Jumlah	Rp. 5. 624.674.000,00

b.1. Dasar Hukum

- Surat Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : KU.0809 – C6/394 tanggal 19 April 2011 tentang Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan TA. 2011
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 20 Desember 2010 Nomor :1029/033-05.1.01/15/2011 tentang Pembangunan infastruktur perkotaan di Kabupaten Gresik (PNPM Perkotaan).

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

1.1. Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

Lokasi	: Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	: 100 %
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Dana yang tersedia
- Target	: Rp. 12.885.000.000,00
- Realisasi	: Rp. 12.200.000.000,00 (94,68%)
Keluaran	: Terbangunnya Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat perkotaan
- Target	: 100 %
- Realisasi	: 100 %
Hasil	: Terselenggaranya penanggulangan

kemiskinan di perkotaan

- Target : 100 %

- Realisasi : 100 %

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN Rp. 11.885.000.000,00

- APBD Rp. 1 000.000.000,00

Jumlah Rp. 12.885.000.000,00

b. Perauran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pada tahun 2012 penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan

1.2. Kegiatan : Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Pendistribusian Air Minum Olahan kepada Kabupaten Gresik

Daerah yang bekerjasama : **Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Nomor : 180/ 8370 /437.12/2012

Nomor : 180/ 01 /437.12/2012

SKPD yang melaksanakan : PDAM Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Pemanfaatan mata air umbulan dan pendistribusian air minum olahan

- outcome/Hasil :

Jangka Waktu :

1.2. Kegiatan : Kerjasama Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah

Daerah yang bekerjasama : **Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Dasar Hukum : - Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik

Nomor : 120.1/66/01/2012

Nomor : 180/2/437.12/2012

tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang

Nomor : 120.1/15089/09/2012

Nomor : 440/8359/437.12/2012

tentang Perubahan Atas Perjanjian Kerjasama tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah

SKPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Tersedianya Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi masyarakat Jawa Timur yang masuk JAMKESDA.

- outcome/Hasil : Terlaksananya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit /BP4/BKMM Kelas III bagi masyarakat pemegang kartu peserta JAMKESDA

Jangka Waktu :

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1.1. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

Kerjasama dengan : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) Cabang Gresik

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Gresik

Nomor: 180 /8455/437.12/2012

Nomor : 050/001/PKS/BPD. GRS

tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana

Deposito Berjangka

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) Cabang Gresik dalam bentuk Deposito Berjangka

- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah

Jangka Waktu : 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis serta dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa disertai biaya.

1.2. Kegiatan : Pembukaan Rekening Deposito Berjangka

Kerjasama dengan : PT. Bank Tabungan Negara (Persero Tbk)

Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero Tbk)

Nomor: 180 / /437.12/2012

Nomor : 050/ / PKS/GRS.III/IX/2012

tentang Pembukaan Rekening Berjangka

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero Tbk) dalam bentuk Deposito Special Rate dengan fasilitas khusus

- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah

Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

1.3. Kegiatan : Kerjasama Penggunaan Wilayah Kabupaten Gresik sebagai Sarana Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Universitas Airlangga

Kerjasama dengan : Universitas Airlangga
Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Airangga Surabaya
Nomor: / / /2012
Nomor : 050
tentang Penggunaan Wilayah Kabupaten Gresik sebagai Sarana Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa
SKPD yang : Badan Kepegawaian Daerah, Bappeda
melaksanakan Kabupaten Gresik
Lokasi : Kabupaten Gresik
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- outcome/Hasil :
Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun

1.4. Kegiatan : Kerjasama Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya

Kerjasama dengan : Universitas Brawijaya
Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Brawijaya
NOMOR : 180/6930/437.12/2012
NOMOR : 34/UN10/DN/2012
tentang Kerjasama Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya
SKPD yang : Bappeda Kabupaten Gresik

melaksanakan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- outcome/Hasil :

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun

1. Kebijakan

1.5. Kegiatan : Pengembangan Manajemen Aset Daerah

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya

Dasar Hukum : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya
NOMOR : 028/ /437.61/2012

NOMOR : S-11/MoU/WKN.10/2012

tentang Pengembangan Manajemen Aset Daerah

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

melaksanakan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Pengelolaan Barang Milik Daerah/aset Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah, Piutang Daerah, Lelang Barang Milik Daerah

- outcome/Hasil : Terlaksananya penguatan sistem inovasi daerah

Jangka Waktu :

1. Kebijakan

1.6. Kegiatan : Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2012

Pihak Ketiga yang : Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian

bekerjasama : Pekerjaan Umum

Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kepala Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian

NOMOR :

NOMOR : 180/8367 /437.12/2012

tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2012

SKPD yang melaksanakan : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Terlaksananya Program PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, yang meliputi perbaikan infrastruktur, social, ekonomi dan tata pemerintahan

- outcome/Hasil : Terlaksananya penguatan sistem inovasi daerah

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun

1.6. Kegiatan : Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Dasar Hukum : - Perda Kab. Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang APBD Tahun Anggaran 2012

- Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Daerah Tahun Anggaran 2012

SKPD yang melaksanakan : Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Terselenggaranya Rapat Koordinasi Unsur Forpimda

- outcome/Hasil : Terciptanya kestabilan sosial, politik dan

keamanan, serta ketertiban masyarakat

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun anggaran 2012

Sumber dan Jumlah Dana

-APBD : Rp. 878.740.000,00

-Pihak Ketiga : Rp. -

- Jumlah : **Rp. 878.740.000,00**

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : Perlunya kestabilan sosial, politik dan keamanan, serta ketertiban masyarakat
- Solusi : Adanya pertemuan dan pembahasan yang rutin dan intern dari unsur pimpinan

C. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.1. Kegiatan : **Penegasan Batas Wilayah Kabupaten**

Daerah/Kecamatan/Desa/ Kelurahan yang berbatasan : Kabupaten Gresik

Dasar Hukum : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Top Dam V Brawijaya Nomor 136/66/437.12/2012 dan Nomor B/01/II/2012 tentang Survey dan Penataan Batas Daerah

SKPD yang melaksanakan : Bagian Administrasi pemerintahan Umum (secretariat Daerah)

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan : Terpasangnya pilar batas dan peta garis batas antara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya

Sumber dan Jumlah Dana

-APBD Kab. Gresik : Rp. 311.298.000,00

-APBD/Kota/Prop : Rp. -

- Jumlah : **Rp. 311.298.000,00**

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : Terdapat beberapa patok batas yang letaknya tepat di tengah sungai atau di tengah jalan dan didalam areal pabrik
- Solusi : Pemasangan patok Letaknya digeser di tempat yang aman yang penting masih dalam garis batas dan masing-masing ada berita acaranya

1.2. Kegiatan : Penegasan Batas Wilayah Kelurahan/ Desa

- Daerah/Kecamatan/Desa/ Kelurahan yang berbatasan : Kabupaten Gresik
- Dasar Hukum : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Top Dam V Brawijaya Nomor 136/66/437.12/2012 dan Nomor B/01/II/2012 tentang Survey dan Penataan Batas Daerah
- SKPD yang melaksanakan : Bagian Administrasi pemerintahan
- Realisasi Pelaksanaan : Terpasangnya Pilar Batas Kegiatan Kelurahan/Desa dan Peta Garis Batas Desa/Kelurahan
- Sumber dan Jumlah Dana
- APBD Kab. Gresik : Rp. 198.975.000,00
- APBD/Kota/Prop : Rp. -
- Jumlah : **Rp. 198.975.000,00**

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Angin Puting Beliung

- a. Tanggal kejadian 14 Januari 2012 berlokasi di Cerme Korban Abd Rochim, H. Abdul Ghofur, A. Kahim, Uduung Duriat, Abu Ali, Munasih, Bibit Santuso, Saji, Martika, Sutris, Pujiyanto, Fatimah kerugian sebesar

Rp.8000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. Tanggal kejadian 26 Januari 2012 berlokasi di Dsn. Dalean Lor Kec. Cerme Korban Arjo & Sugiman kerugian sebesar Rp.200.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Tanggal kejadian 27 Januari 2012 berlokasi di Dsn. Balongpanggang Kec. Balongpanggang Korban Ibu Narti sebesar Rp.10.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Tanggal kejadian 7 Pebruari 2012 berlokasi di Ds. Kemuteran Kec. Gresik Korban Amin Syaifudin sebesar Rp.6.675.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Tanggal kejadian 7 Pebruari 2012 berlokasi di Kepatihan Kec. Gresik Korban Hadi sebesar Rp.35.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Tanggal kejadian 14 Pebruari 2012 berlokasi di Sidoraharjo Kec. Kedamean Korban Jemain sebesar Rp.20.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Tanggal kejadian 13 Maret 2012 berlokasi di Ds. Kedungsum ber Kec. Balongpanggang Korban Wati sebesar Rp.25.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Tanggal kejadian 14 Maret 2012 berlokasi di Ngimboh Kec. Ujung pangka Korban MI Ma'arif AT- Taufiq sebesar Rp.10.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Tanggal kejadian 17 Maret 2012 berlokasi di GKA Kec. Kebomas Korban Trisusilo sebesar Rp.15.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Tanggal kejadian 26 Maret 2012 berlokasi di Ds. Munggugianti, Ds. Munggugebang, Ds. Banter dan Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng Korban H. Bambang Rp. 5.000.000,00 Senapi Rp. 10.000.000,00 Remin Rp.

2.000.000,00 Rawono Rp. 30.000.000,00 Segal Rp. 10.000.000,00 sebesar Rp.15.000.000,00 Gdg SDN Banter Rp.40.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- k. Tanggal kejadian 05 Desember 2012 berlokasi di Brangkal Kec. Balongpanggang Korban Nadi 2.000.000,00 Satim 2.000.000,00 Muslikan 3.000.000,00 Wardi 2.000.000,00 Siem 2.000.000,00 sukarlan 3.000.000,00 Sulasih 3.000.000,00 Juki 3.000.000,00 Harto 3.000.000,00 Ramiadi 3.000.000,00 Suwati 2.000.000,00 Suparto 2.000.000,00 Samiran 2.000.000,00 Jaelan 3.000.000,00.. SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Bencana Kebakaran

- a. Tanggal kejadian 27 Januari 2012 berlokasi di Dsn. Pengampon/ Ds. Setro Kec. Menganti Korban An. Kwat kerugian Rp.100.000.000,00, An.Suroso, An. Arisbianto kerugian Rp.150.000.000,00 An. Adi Sunaryo kerugian Rp.30.000.000,00 Ibu Suriyah Rp. SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Tanggal kejadian 1 Maret 2012 berlokasi di Dsn. Medeo, Ds Cerme Kec. Kedamean Korban An. Marwan kerugian Rp.12.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Tanggal kejadian 26 Maret 2012 berlokasi di Ds. Mojotengah Kec. Menganti Korban An. Manab, Saskiyah, Par, Nur, Siska Kerugian Rp.100.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Tanggal kejadian 14 Juni 2012 berlokasi di Kelurahan Lumpur Kec. Gresik Korban An. Sukandar, Ernawati Kerugian Rp.10.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- e. Tanggal kejadian 23 Juli 2012 berlokasi di Gresik Korban An. urul Aini, Zarkasi, Narifin Kerugian Rp.150.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Tanggal kejadian 9 Agustus 2012 berlokasi di Romo Kec. Manyar Korban An. Endah, Mardhiyah Kerugian Rp.250.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.12.500.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- g. Tanggal kejadian 13 Agustus 2012 berlokasi di Klotok Kec. Balongpanggang Korban An. Agus Budiono Kerugian Rp.75.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.3.750.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- h. Tanggal kejadian 13 Agustus 2012 berlokasi di Mriyuran Kec. Sidayu Korban An. Mustopo Kerugian Rp.50.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.2.500.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- i. Tanggal kejadian 27 Agustus 2012 berlokasi di Tebuwung Kec. Dukun Korban An. Yaim Kerugian Rp.25.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.3.750.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- j. Tanggal kejadian 27 Agustus 2012 berlokasi di Tebuwung Kec. Dukun Korban An. Yaim Kerugian Rp.25.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.3.750.000,00 dan An. Quriah Kerugian Rp.200.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar

Rp.1.250.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- k. Tanggal kejadian 28 September 2012 berlokasi di Manyar Korban An. Jonah kerugian Rp.200.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.10.000.000,00 An. Sumiyah kerugian Rp.100.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.5.000.000,00 An. Syafiudin kerugian Rp.1.000.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.5.000.000,00 An. Ridwan Rp.50.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan pemberian santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.2.500.000,00 An. kerugian Ahmadi Rp.100.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.7.500.000,00 An. Murtadho kerugian Rp.50.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.2.500.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- l. Tanggal kejadian 30 September 2012 berlokasi di Sidomoro Kec. Kebomas Korban An. Mulyaji Kerugian Rp.100.000.000,00 dilakukan tindakan penanganan Pemberian Santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.5.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- m. Tanggal kejadian 7 Oktober 2012 berlokasi di Sukorame Kec. Gresik Korban An. Maratussholiha Kerugian 100.000.000,00, diberikan santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.5.000.000,00 An. Aminah Kerugian 20.000.000,00 diberikan santunan dari Pemda Gresik An. Yasin Kerugian 15.000.000,00 diberikan santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.7.500.000,00 An. Yati Kerugian 15.000.000,00 diberikan santunan dari

Pemda Gresik sebesar Rp.7.500.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- n. Tanggal kejadian 13 Oktober 2012 berlokasi di Bulangan Kec. Dukun Korban An. Wandu Kerugian 100.000.000,00, diberikan santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.5.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- o. Tanggal kejadian 22 Oktober 2012 berlokasi di Tebalan Kec. Dudusampeyan Korban An. Garun Kerugian 50.000.000,00, diberikan santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.2.500.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- p. Tanggal kejadian 28 Oktober 2012 berlokasi di Balongpanggang Korban Stand Pasar 10 Unit Kerugian 700.000.000,00, diberikan santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.50.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- q. Tanggal kejadian 31 Oktober 2012 berlokasi di Mbeton Kec. Menganti Korban An. Karmali Kerugian Rp.65.000.000,00 diberikan santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.3.250.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- r. Tanggal kejadian 30 Nopember 2012 berlokasi di Ketanen Kec. Panceng Korban An. Suwarno Kerugian Rp.300.000.000,00, diberikan santunan dari Pemda Gresik sebesar Rp.15.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Bencana Semburan Gas Metan

Tanggal kejadian 13 s/d 19 Nopember 2012 berlokasi di Metatu Kec. Benjeng Korban rumah tindakan penanganan dengan membuat tanggul dan gedek dari Pemda Gresik SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Bencana Tumpahan Minyak di Pantai Ujungpangkah

Tanggal kejadian 27 Nop 2012 berlokasi di Ujungpangkah Korban 1.922 KK tindakan penanganan dengan memberikan santunan sebesar Rp.384.600.000,00 dari Pemda SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5. Bencana Banjir

- a. Tanggal kejadian 13 Januari 2012 berlokasi di Ds.Lundo & Belek Sumber yang menggenangi area sawah 50 Ha Jln Desa 500 m 100 buah Rumah di desa Lundo dan sawah 40 Ha, jalan desa 1000m, rumah 150 buah di desa Delik sumber SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Tanggal kejadian 18 Januari 2012 berlokasi di Tirem Enggal Kec. Dukun yang menyebabkan kerusakan Tanah Pertanian seluas 25 Ha SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Tanah Longsor

- a. Tanggal kejadian 17 Januari 2012 berlokasi di Desa Jono Kec. Cerme yang menyebabkan kerusakan Tanggul Lonsor dengan kerugian sebesar Rp.9.500.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Tanggal kejadian 17 Januari 2012 berlokasi di Desa Pandu Kec. Cerme yang menyebabkan kerusakan Tanggul Lonsor dengan kerugian sebesar Rp. 7.500.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Tanggal kejadian 1 Pebruari 2012 berlokasi di Desa Tirem Enggal Kec. Dukun korban An. Materon, Sapa'ah, Alimin, Soltoni, Muasan, Kabani, Muanan, Tunik, Sukariyah dengan kerugian sebesar Rp. 65.000.000,00 SKPD yang menangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Kekeringan

NO	LOKASIBENCANA		WAKTU KEJADIAN	TINDAKAN PENANGULANGAN	BANTUAN AIR YANG DIBERIKAN	
	KECAMATAN	DESA			PIHAK YANG MEMBANTU	AIR BERSIH TANGKI
1.	Driyorejo	Wedoroanom	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	6
		Mojosarirejo	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	6
2.	Wringinanom	Kesamben Kulon	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	6
		Sembungan	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	6
3.	Kedamean	Cermen	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	5
					BNPB/ Pusat	10
		Katimoho	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Tulung	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	5
					BNPB/ Pusat	10
		Glindah	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Lampah	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	6

NO	LOKASIBENCANA		WAKTU KEJADIAN	TINDAKAN PENANGULA NGAN	BANTUAN AIR YANG DIBERIKAN	
	KECAMATAN	DESA			PIHAK YANG MEMBANTU	AIR BERSIH TANGKI
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Turirejo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
4.	Menganti	Pranti	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Beton	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
5.	Benjeng	Lundo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Balongtanjung	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Balongmojo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Bulangkulon	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10

NO	LOKASIBENCANA		WAKTU KEJADIAN	TINDAKAN PENANGULA NGAN	BANTUAN AIR YANG DIBERIKAN	
	KECAMATAN	DESA			PIHAK YANG MEMBANTU	AIR BERSIH TANGKI
		Bengkelolor	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Gluranploso	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Munggugianti	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					BNPB/ Pusat	10
		Bulurejo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					BNPB/ Pusat	10
		Kedungrukem	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					Provinsi Jatim	5
					BNPB/ Pusat	10
		Sedapurklagen	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Sirnoboyo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Kalipadang	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Karangankidul	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					BNPB/ Pusat	10
		Deliksumber	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					Provinsi Jatim	4

NO	LOKASIBENCANA		WAKTU KEJADIAN	TINDAKAN PENANGULA NGAN	BANTUAN AIR YANG DIBERIKAN	
	KECAMATAN	DESA			PIHAK YANG MEMBANTU	AIR BERSIH TANGKI
					BNPB/ Pusat	10
		Dermo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					BNPB/ Pusat	10
		Klampok	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					BNPB/ Pusat	10
		Kedungsekar	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					BNPB/ Pusat	10
		Metatu	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					BNPB/ Pusat	10
		Banter	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					BNPB/ Pusat	10
		Jogodalu	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					BNPB/ Pusat	10
		Jatirambe	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					BNPB/ Pusat	10
		Munggugebang	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	8
					BNPB/ Pusat	10
		Pundutrate	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					BNPB/ Pusat	10
6.	Balong P.	Brangkal	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Dampet	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Wotansari	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Karangsemanding	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Sekarputih	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Banjaragung	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4

NO	LOKASIBENCANA		WAKTU KEJADIAN	TINDAKAN PENANGULANGAN	BANTUAN AIR YANG DIBERIKAN	
	KECAMATAN	DESA			PIHAK YANG MEMBANTU	AIR BERSIH TANGKI
		Pucung	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Balongpanggang	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Kedungpring	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
7.	Cerme	Dooro	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Worowudi	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	-
					BNPB/ Pusat	10
		Dampaan	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Dadapkuning	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	-
					Provinsi Jatim	3
		Pandu	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	5
					BNPB/ Pusat	10
		Lengkonng	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Jono	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Kandangan	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	-
					BNPB/ Pusat	10

NO	LOKASIBENCANA		WAKTU KEJADIAN	TINDAKAN PENANGULANGAN	BANTUAN AIR YANG DIBERIKAN	
	KECAMATAN	DESA			PIHAK YANG MEMBANTU	AIR BERSIH TANGKI
		Dungus	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Gedangkulut	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Kambingan	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	-
					BNPB/ Pusat	10
		Suko Anyar	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	-
					BNPB/ Pusat	10
8.	Kebomas	Kedanyang	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Kembangan	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Gulomantung	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
9.	Duduk s.	Pandanan	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Glanggang	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Kemudi	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Sumari	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Kandangan	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	5
					BNPB/ Pusat	10

NO	LOKASIBENCANA		WAKTU KEJADIAN	TINDAKAN PENANGULANGAN	BANTUAN AIR YANG DIBERIKAN	
	KECAMATAN	DESA			PIHAK YANG MEMBANTU	AIR BERSIH TANGKI
		Tambakrejo	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Kawisto Windu	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Setrohadi	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	3
					BNPB/ Pusat	10
		Wadak Lor	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Kramat	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Panjunan	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Wadak Kidul	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					Provinsi Jatim	4
					BNPB/ Pusat	10
		Gredek	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
					BNPB/ Pusat	10
10.	Manyar	Morobakung	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
		Sumberejo	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
		Ngampel	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
		Betoyoguci	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	4
		Pejanggalan	Juli - Nop	Pemberian Drolling Air	Pemda Gresik	6

NO	LOKASIBENCANA		WAKTU KEJADIAN	TINDAKAN PENANGULANGAN	BANTUAN AIR YANG DIBERIKAN	
	KECAMATAN	DESA			PIHAK YANG MEMBANTU	AIR BERSIH TANGKI
		Banyuwangi	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Karangrejo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Tanggulrejo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
11.	Bungah	Pegundan	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Kemangi	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Gumeng	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
12.	Sidayu	Ngawen	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Mojoasem	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Randuboto	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Sidumulyo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Mriyun	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Bunderan	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Racikulon	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Purwodadi	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Asempapak	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Srowo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Racitengah	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Sedagaran	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6

NO	LOKASIBENCANA		WAKTU KEJADIAN	TINDAKAN PENANGULA NGAN	BANTUAN AIR YANG DIBERIKAN	
	KECAMATAN	DESA			PIHAK YANG MEMBANTU	AIR BERSIH TANGKI
13.	Dukun	Karangcangkring	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Bangeran	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Gedonggedo'an Tebuwung	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
			Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Baron	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	6
		Babaksari	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Padang Bandung	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Kalirejo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Jrebeng	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Sekargadung	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Madumulyorejo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Babakbawo	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Dukuhkembar	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Tiremenggal	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
		Bulangan	Juli - Nop	Pemberian Dropping Air	Pemda Gresik	4
Jumlah					Pemda Gresik Provinsi Jatim BNPB/ Pusat	600 140 530

a. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di Kabupaten Gresik dilakukan upaya antara lain:

1. Melakukan identifikasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya bencana banjir melalui penelusuran daerah aliran sungai dari lokasi terjadinya banjir hingga muara sungai;
2. Mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk melaksanakan normalisasi aliran sungai bengawan solo dan kali lamong agar aliran air menuju muara menjadi lancar;
3. Mengupayakan segera terlaksananya pembangunan Bendung Gerak Sembayat dan Pembangunan Tanggul untuk mengantisipasi luapan air pada musim penghujan;
4. Mensiagakan SATKORLAK penanggulangan bencana agar dapat segera mengantisipasi dan mengambil tindakan penanggulangan jika terjadi bencana;
5. Mensiagakan satuan petugas pemadam kebakaran Pemerintah Kabupaten Gresik dan berkoordinasi dengan satuan pemadam kebakaran perusahaan di Kabupaten Gresik guna mengantisipasi terjadinya kebakaran;
6. Menerbitkan perizinan usaha industri secara selektif pada lokasi rawan bencana banjir untuk meminimalisir timbulnya bencana banjir;
7. Telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk penanggulangan bencana dan antisipasi terjadinya bencana di Kabupaten Gresik.

b. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Beberapa potensi terjadinya bencana di Kabupaten Gresik antara lain :

1. Bencana banjir akibat luapan sungai benawan solo dan kali lamong dimusim penghujan;

2. Bencana kebakaran akibat konseleting aliran listrik maupun kompor gas;
3. Bencana angin puting beliung yang terjadinya sulit diprediksi dan diantisipasi;
4. Bencana kekeringan di musim kemarau yang mengakibatkan berkurangnya sumber air dan gagal panen;
5. Bencana akibat polusi dan pencemaran industri;
6. Bencana tanah longsor.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Jenis Gangguan : Keamanan dan Ketertiban umum
 SKPD/Unit Kerja yang menangani : Satuan Polisi Pamong Praja
 Tindakan Penanggulangan : Pembinaan secara terus-menerus untuk menjadikan masyarakat sadar hukum.
 Kendala dalam penanggulangan : Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA.
 Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan : Menjadikan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap Peraturan
 Sumber Dan Jumlah Anggaran : DPA T.A. 2012 Rp. 1.050.379.000,00

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pada tahun 2012 penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

A. Kerjasama Antar Daerah

s. Kebijakan

- 1.2. Kegiatan : Kerjasama Pembangunan Daerah**
Daerah yang bekerjasama : Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Dasar Hukum : Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah
Nomor : 180/168/437.12/2011
Nomor : 180/04/433.032/2011
- SKPD yang melaksanakan : Sekretariat Daerah Kab. Gresik (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam).**
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Rintisan kerja sama dalam rangka kepemilikan working interest KKS Blok Madura Offshore.
 - outcome/Hasil :
 - Jangka Waktu : Lima (5) tahun
- Sumber dan Jumlah Dana**
- APBD Kab. Gresik : Rp.
 - APBD/Kota/Prop : Rp.
 - Jumlah : **Rp.**
- Permasalahan dan Solusi**
- Permasalahan : -
 - Solusi : -
-
- 1.2. Kegiatan : Kerjasama Pembangunan Kota Baru Gresik Selatan**
Daerah yang bekerjasama : Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur
Dasar Hukum : Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dewan Pengurus Daerah REI
Nomor : 120.1/47/012/2011
Nomor : 180/175/437.12/2011
- SKPD yang melaksanakan : BAPPEDA Kabupaten Gresik**

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : 1. Penyusunan Masterplan dan rencana detail
2. Penyediaan dan konsolidasi lahan sesuai kepentingan masterplan dan rencana detail
3. Penyediaan dan pembangunan infrastruktur.
- outcome/Hasil : Hasil yang diharapkan adalah penyediaan rumah bagi masyarakat dan kepentingan usaha dengan alokasi lahan seluas 10.000 hektar

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun

Sumber dan Jumlah Dana

- APBD Kab. Gresik : Rp. -
- APBD/Kota/Prop : Rp. -
- Jumlah : Rp. -

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : -
- Solusi : -

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan

1.1. Kegiatan :

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
- Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Gresik NOMOR :

180 /8455/437.12/2012 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi : Pemerintah Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran :
- outcome/Hasil :
- Jangka Waktu :

Sumber dan Jumlah Dana

- APBD : Rp.
- Pihak Ketiga : Rp. -
- Jumlah : **Rp.**

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Kebijakan

1.1. Kegiatan : **Rapat Koordinasi Unsur Muspida**

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Muspida Plus

Dasar Hukum : Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011

SKPD yang melaksanakan : Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Terlaksananya Rakor Unsur Muspida
- outcome/Hasil : Terciptanya kestabilan politik, social dan keamanan
- Jangka Waktu : 12 bulan

Sumber dan Jumlah Dana

- APBD : Rp. 350.000.000,00
- Pihak Ketiga : Rp. -
- Jumlah : **Rp. 350.000.000,00**

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.1. Kegiatan : Penegasan Batas Wilayah Kabupaten*

Daerah/Kecamatan/Desa/ Kelurahan yang berbatasan	: Kabupaten Gresik
Dasar Hukum	:
SKPD yang melaksanakan	: Bagian Administrasi pemerintahan
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	: Terpasangnya pilar batas dan peta garis batasantara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya
Sumber dan Jumlah Dana	
-APBD Kab. Gresik	: Rp. 311.298.000,00
-APBD/Kota/Prop	: Rp. -
- Jumlah	: Rp. 311.298.000,00
Permasalahan dan Solusi	
- Permasalahan	: Pemasangan patok bila tepat ditengah sungai atau ditengah jalan dan didalam areal pabrik
- Solusi	: Letaknya digeser ditempat yang aman yang penting masih dalam garis batas dan masing-masing ada berita acaranya

1.2. Kegiatan : Penegasan Batas Wilayah Kelurahan/ Desa*

Daerah/Kecamatan/Desa/ Kelurahan yang berbatasan	: Kabupaten Gresik
Dasar Hukum	: ...
SKPD yang melaksanakan	: Bagian Administrasi pemerintahan
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	: Terpasangnya Pilar Batas Kelurahan/Desa dan Peta Garis Batas Desa/Kelurahan

Sumber dan Jumlah Dana

-APBD Kab. Gresik	: Rp. 198.975.000,00
-APBD/Kota/Prop	: Rp. -
- Jumlah	: Rp. 198.975.000,00

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan	: Letak patok bila di dalam area Pabrik
- Solusi	: Ditempatkan di tempat yang aman yang penting masih dalam jalur batas dan masing-masing ada berita acaranya

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Angin Puting Beliung

NO	TANGGAL KEJADIAN	DESA	KERUSAKAN	KERUGIAN (dalam ribuan)	BANTUAN (dalam ribuan)	TINDAKAN PENANGANAN	SKPD YANG MENANGANI
1	2	4	7	8	9	10	11
2.	13 Jan 2011	Campurejo, Panceng	6 rumah	70.000.000	16.600.000	Bantuan dana	Bag. Adm. Kesra
4.	12 Feb 2011	Lengkong, Cerme	25 rumah	28.500.000	6.105.000	Bantuan dana	Bag. Adm. Kesra
	12 Feb 2011	Dungus, Cerme	1 rumah	9.000.000	3.500.000	Bantuan dana	Bag. Adm. Kesra
3.	16 Feb 2011	Jombangdelik, Balongpanggang	6 rumah	6.000.000	2.705.000	Bantuan dana	Bag. Adm. Kesra
5.	18 Feb 2011	Kramat, Bungah	1 rumah	10.000.000	3.605.000	Bantuan dana	Bag. Adm. Kesra
1.	4 Nop 2011	Ngabetan, Cerme Lor	Rumah	30.000	7.500	Cek Lokasi	BPBD

2.	13 Nop 2011	Raci Tengah, Sidayu	Kantor Kec. Sidayu, SMA I Sidayu	125.000	40.250	Cek Lokasi	BPBD
4.	8 Des 2011	Lundo, Benjeng		8.225. 000			BPBD

2. Bencana Kebakaran Gas LPIJI

NO	TANGGAL KEJADIAN	DESA	KERUSAKAN	KERU GIAN (dalam ribuan)	BANTUAN (dalam ribuan)	TINDAKAN PENANGANAN	SKPD YANG MENA NGANI
1	2	4	7	8	9	10	11
1.	4 Nop 2011	Wedani, Cerme	Rumah	175.000	22.500	Cek lokasi	BPBD

3. Bencana Kebakaran Rumah

NO	TANGGAL KEJADIAN	DESA	KERUSAKAN	KERU GIAN (dalam ribuan)	BANTUAN (dalam ribuan)	TINDAKAN PENANGANAN	SKPD YANG MENA NGANI
1	2	4	7	8	9	10	11
1.	7 Okt 2011	Tlogopatut, Gresik	Rumah	400.000	40.000	Cek lokasi	BPBD
2.	18 Okt 2011	Bandung Sekaran	Rumah	50.000	15.000	Cek lokasi	BPBD
3.	17 Nop 2011	Sidokumpul, Gresik	Rumah	475.500	95.000	Cek lokasi	BPBD

4. Bencana Banjir

NO	TANGGAL KEJADIAN	DESA	KERUSAKAN	KERU GIAN (dalam ribuan)	BANTUAN (dalam ribuan)	TINDAKAN PENANGANAN	SKPD YANG MENA NGANI
1	2	4	7	8	9	10	11

NO	TANGGAL KEJADIAN	DESA	KERUSAKAN	KERUGIAN (dalam ribuan)	BANTUAN (dalam ribuan)	TINDAKAN PENANGANAN	SKPD YANG MENANGANI
1	2	4	7	8	9	10	11
1.	Jan 2011	Balongpanggang, Cerme, Benjeng, Kedamean	Rumah dan lahan persawahan	-	96.217.900	Pemberian bantuan sembako dan karung palstik	BPBD
2.	Maret 2011	Balongpanggang, Cerme, Kedamean	Rumah dan lahan persawahan	-	119.287.600	Pemberian bantuan sembako dan karung palstik	
1.	8 Des 2011	Lundo, Benjeng		8.225			BPBD

a. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di Kabupaten Gresik dilakukan upaya antara lain:

8. Melakukan identifikasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya bencana banjir melalui penelusuran daerah aliran sungai dari lokasi terjadinya banjir hingga muara sungai;
9. Mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk melaksanakan normalisasi aliran sungai bengawan solo dan kali lamong agar aliran air menuju muara menjadi lancar;
10. Mengupayakan segera terlaksananya pembangunan Bendung Gerak Sembayat dan Pembangunan Tanggul untuk mengantisipasi luapan air pada musim penghujan;
11. Mensiagakan SATKORLAK penanggulangan bencana agar dapat segera mengantisipasi dan mengambil tindakan penanggulangan jika terjadi bencana;

12. Mensiagakan satuan petugas pemadam kebakaran Pemerintah Kabupaten Gresik dan berkoordinasi dengan satuan pemadam kebakaran perusahaan di Kabupaten Gresik guna mengantisipasi terjadinya kebakaran;
13. Menerbitkan perizinan usaha industri secara selektif pada lokasi rawan bencana banjir untuk meminimalisir timbulnya bencana banjir;
14. Telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk penanggulangan bencana dan antisipasi terjadinya bencana di Kabupaten Gresik.

b. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Beberapa potensi terjadinya bencana di Kabupaten Gresik antara lain :

7. Bencana banjir akibat luapan sungai benawan solo dan kali lamong dimusim penghujan;
8. Bencana kebakaran akibat konseleting aliran listrik maupun kompor gas;
9. Bencana angin puting beliung yang terjadinya sulit diprediksi dan diantisipasi;
10. Bencana kekeringan di musim kemarau yang mengakibatkan berkurangnya sumber air dan gagal panen;
11. Bencana akibat polusi dan pencemaran industri;
12. Bencana tanah longsor.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Jenis Gangguan : Gangguan Trantibum (Pelanggar PERDA)
SKPD/Unit Kerja yang : Satpol PP Kab. Gresik

menangani

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan : Sebagaimana data di buku lampiran

Sumber Dana : APBD TA. 2011

Jumlah Dana : Operasi Penertiban Pelanggaran PERDA Rp. 903.702.500,00
Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar PERDA Rp. 5.850.000,00
Operasi Penertiban Larangan Peredaran Minuman Keras (Miras) Rp. 45.890.000,00
Operasi Penertiban Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul (PSK) Rp. 50.057.500,00

Penanggulangan : Operasi Penertiban dan Patroli Wilayah
Kendalanya : Nihil
Keikutsertaan Aparat : Polres Gresik, Kodim 0817 Gresik,
Keamanan Dalam Subgarnisun Gresik, Kejari Gresik, PN
Penanggulangan Gresik, Kantor Kesbangpolinmas, Dinas Kesehatan, MUI.

2. Jenis Gangguan : Gangguan Keamanan Kegiatan (Masyarakat dan Pemerintahan)

SKPD/Unit Kerja yang menangani : Satpol PP Kab. Gresik

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan : Sebagaimana data di buku lampiran

Sumber Dana	: APBD TA. 2010
Jumlah Dana	: Pengamanan kegiatan masyarakat Rp. 65.643.750,00
	Pengamanan kegiatan pemerintahan Rp. 591.841.250,00
Penanggulangan	: Pengamanan PBHI, PHBN, kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintahan
Kendalanya	: Nihil
Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan	: Polres Gresik, Kodim 0817 Gresik, Subgarnisun Gresik, Kantor Kesbangpolinmas.
2. Jenis Gangguan	: Konflik antar Desa perbatasan Gresik - Lamongan
SKPD/Unit Kerja yang menangani	: Kecamatan Panceng
Tindakan Penanggulangan	: Koordinasi dengan Kepolisian dan Instansi terkait baik tingkat Kecamatan maupun vertikal tingkat Kabupaten
Kendala dalam penanggulangan	: - Belum cukup dana yang dianggarkan - Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan sangat terbatas
Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan	: Aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI sangat mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan ketentraman dan ketertiban
Sumber Dan Jumlah Anggaran	: 40.000.000,-

BAB VII

P E N U T U P

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2012 ini, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2011-2015 yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Bhakti 2010-2015.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2012 merupakan hasil kerja sama yang baik antara eksekutif, legislatif maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian, Saya menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya sebagai implementasi hubungan kemitraan yang setara antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif, diharapkan adanya saran konstruktif yang berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik ke depan. Dengan demikian hubungan timbal balik yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terjalin dengan baik.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2012 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk mewujudkan **"Gresik bisa lebih baik"**.

Gresik, Maret 2013

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Gresik, Maret 2013

BUPATI GRESIK

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sambari Halim Radianto', is written over the official stamp of the Bupati Gresik.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si